



Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten Sleman

#GISA
GERAKAN INDONESIA SADAR
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Ruang Lingkup.....	4
1.5 Pengertian Umum.....	5
1.5.1 Kependudukan.....	5
1.5.2 Tenaga Kerja.....	7
1.5.3 Sosial.....	8
1.5.3.1 Pendidikan.....	8
1.5.3.2 Kesehatan.....	9
BAB 2 GAMBARAN UMUM KABUPATEN SLEMAN	21
2.1 Kondisi Geografis.....	21
2.2 Kondisi Demografis Kabupaten Sleman.....	22
2.3 Kondisi Ekonomi Daerah.....	24
2.4 Potensi Kabupaten Sleman.....	26
BAB 3 SUMBER	
DATA	28
3.1 Sumber Data Hasil Registrasi.....	28
3.2 Sumber Data Hasil Non-Registrasi.....	29
3.3 Sumber Data dari Lintas Sektor.....	29
BAB 4 PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN	30
4.1 Data Kuantitas Penduduk.....	30
4.1.1 Jumlah dan Persebaran Penduduk.....	30
4.1.2 Laju Pertumbuhan Penduduk.....	34
4.1.3 Karakteristik Penduduk Menurut Kondisi Demografi.....	37
4.1.3.1 Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin.....	37
4.1.3.2 Rasio Jenis Kelamin.....	40
4.1.3.3 Umur Median (Median Age).....	43
4.1.3.4 Piramida Penduduk.....	47
a) Piramida Penduduk Kecamatan Gamping.....	49
b) Piramida Penduduk Kecamatan Godean.....	50

c) Piramida Penduduk Kecamatan Moyudan.....	52
d) Piramida Penduduk Kecamatan Minggir.....	53
e) Piramida Penduduk Kecamatan Seyegan.....	54
f) Piramida Penduduk Kecamatan Mlati.....	55
g) Piramida Penduduk Kecamatan Depok.....	56
h) Piramida Penduduk Kecamatan Berbah.....	57
i) Piramida Penduduk Kecamatan Prambanan.....	58
j) Piramida Penduduk Kecamatan Kalasan.....	59
k) Piramida Penduduk Kecamatan Ngemplak.....	60
l) Piramida Penduduk Kecamatan Ngaglik.....	62
m) Piramida Penduduk Kecamatan Sleman.....	63
n) Piramida Penduduk Kecamatan Tempel.....	64
o) Piramida Penduduk Kecamatan Turi.....	65
p) Piramida Penduduk Kecamatan Pakem.....	66
q) Piramida Penduduk Kecamatan Cangkringan.....	67
4.1.3.5 Rasio Ketergantungan.....	68
4.1.4 Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Status Kawin.....	70
4.1.4.1 Angka Perkawinan Umum.....	74
4.1.4.2 Angka Perceraian Umum.....	75
4.1.5 Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga.....	76
4.1.5.1 Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga.....	79
4.1.5.2 Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga (SHDK).....	80
4.1.5.3 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin.....	81
4.1.5.4 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin.....	83
4.1.5.5 Karakteristik Kepala keluarga Berdasarkan Status Bekerja.....	84
4.1.6 Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial.....	86
4.1.6.1 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan.....	86
4.1.6.2 Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan.....	89
4.1.7 Kelahiran.....	92
4.1.7.1 Jumlah Kelahiran Menurut Kapanewon.....	92
4.1.7.2 Angka Kelahiran Kasar Menurut Kapanewon.....	93
4.2 Data Kualitas Penduduk.....	94
4.2.1 Kesehatan.....	96
4.2.1.1 Rasio Anak Perempuan.....	97
4.2.1.2 Angka Kematian Bayi.....	98

4.2.1.3 Angka Kematian Anak dan Balita.....	105
4.2.1.4 Angka Kematian Ibu.....	108
4.2.1.5 Fertilitas.....	110
4.2.1.6 Keluarga Berencana.....	115
4.2.1.7 Pernikahan, Talak, Rujuk.....	120
4.2.2 Pendidikan.....	123
4.2.3 Ekonomi.....	137
4.2.4 Sosial.....	143
4.2.4.1 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.....	143
4.2.4.2 Penyandang Dissabilitas.....	146
BAB 5 KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN.....	149
5.1 Kepemilikan Kartu Keluarga dan KTP.....	149
5.2 Kepemilikan Akta Kelahiran.....	151
5.3 Kepemilikan Akta Perkawinan.....	153
5.4 Kepemilikan Akta Perceraian.....	156

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah dan Pembagian Daerah Administratif Kabupaten Sleman	22
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Menurut Kapanewon dan Jenis Kelamin Berdasarkan Data SIAK Tahun 2023	23
Tabel 2.3	Produk Domestik Regional Bruto dan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sleman Tahun 2022 – 2023	25
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Sleman Tahun 2023	33
Tabel 4.2	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Sleman Tahun 2023	35
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023	39
Tabel 4.4	Rasio Jenis Kelamin menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2023	41
Tabel 4.5	Rasio Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur di Kabupaten Sleman Tahun 2023	42
Tabel 4.6	Jumlah Penduduk Lansia (Usia \geq 65 Tahun) Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Kapanewon Tahun 2023	46
Tabel 4.8	Rasio Ketergantungan di Kabupaten Sleman Menurut Kapanewon Tahun 2023	69
Tabel 4.9	Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin Berdasarkan Kapanewon Menurut Data SIAK Tahun 2023	73
Tabel 4.10	Banyaknya Nikah dan Angka Perkawinan Umum Menurut Kapanewon Tahun 2023	75
Tabel 4.11	Banyaknya Cerai, Angka Perceraian Kasar, dan Angka Perceraian Umum Menurut Kapanewon Tahun 2023	76
Tabel 4.12	Jumlah Penduduk, Jumlah Kepala Keluarga, dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga Tahun 2023	79
Tabel 4.13	Jumlah Penduduk Menurut Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga Tahun 2023	81
Tabel 4.14	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2023	82
Tabel 4.15	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Status Perkawinan dan Kapanewon Tahun 2023	83
Tabel 4.16	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Berdasarkan Data SIAK Tahun 2023	88
Tabel 4.17	Jumlah Penduduk Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Berdasarkan Data SIAK Tahun 2023	89
Tabel 4.18	Jumlah Penduduk Menurut Agama/Kepercayaan yang Dianut Berdasarkan Data SIAK Tahun 2023	91

Tabel 4.19	Jumlah Kelahiran Menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2023	93
Tabel 4.20	Distribusi Parameter Kelahiran di Kabupaten Sleman Tahun 2023	94
Tabel 4.21	Rasio Anak Perempuan Menurut Kapanewon Tahun 2023	98
Tabel 4.22	Distribusi Angka Kematian Bayi menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2023	101
Tabel 4.23	Distribusi Kematian Neonatal menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2023	102
Tabel 4.24	Distribusi Kematian Post-Neonatal menurut Kapanewon di Kabupaten Tahun 2023	103
Tabel 4.25	Distribusi Angka Kematian Anak menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman tahun 2023	106
Tabel 4.26	Distribusi Angka Kematian Balita menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2023	107
Tabel 4.27	Distribusi Angka Kematian Ibu menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2023	109
Tabel 4.28	Distribusi Parameter Kelahiran di Kabupaten Sleman Tahun 2023	111
Tabel 4.29	Rasio Anak dan Perempuan di Kabupaten Sleman Tahun 2023	113
Tabel 4.30	Parameter Keluarga Berencana menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2023	116
Tabel 4.31	Unmet Need Menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2023	120
Tabel 4.32	Distribusi Pernikahan Anak, Cerai, dan Rujuk menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2023	122
Tabel 4.33	Angka Partisipasi Kasar SD - SMP Kabupaten Sleman Tahun 2023	125
Tabel 4.34	Angka Partisipasi Kasar SD Kabupaten Sleman Tahun 2023	126
Tabel 4.35	Angka Partisipasi Murni SD Tepat Waktu Kabupaten Sleman Tahun 2023	127
Tabel 4.36	Angka Partisipasi Kasar SMP Kabupaten Sleman Tahun 2023	128
Tabel 4.37	Angka Partisipasi Murni SMP Tepat Waktu Kabupaten Sleman Tahun 2023	129
Tabel 4.38	Angka Partisipasi Kasar SMA Kabupaten Sleman Tahun 2023	130
Tabel 4.39	Angka Partisipasi Murni SMA Tepat Waktu Kabupaten Sleman Tahun 2023	131
Tabel 4.40	Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun Kabupaten Sleman Tahun 2023	132

bel 4.41	Angka Partisipasi Sekolah di Sleman 7-12 Tahun Kabupaten Sleman Tahun 2023	132
Tabel 4.42	Angka Partisipasi Sekolah di Luar Sleman 7-12 Tahun Kabupaten Sleman Tahun 2023	132
Tabel 4.43	Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun Kabupaten Sleman Tahun 2023	133
Tabel 4.44	Angka Partisipasi Sekolah di Sleman 13-15 Tahun Kabupaten Sleman Tahun 2023	133
Tabel 4.45	Angka Partisipasi Sekolah di Luar Sleman 13-15 Tahun Kabupaten Sleman Tahun 2023	133
Tabel 4.46	Angka Partisipasi Sekolah 7-52 Tahun Kabupaten Sleman Tahun 2023	134
Tabel 4.47	Angka Partisipasi Sekolah di Sleman 7-15 Tahun Kabupaten Sleman Tahun 2023	134
Tabel 4.48	Angka Partisipasi Sekolah di Luar Sleman 7-15 Tahun Kabupaten Sleman Tahun 2023	134
Tabel 4.49	Data Angkatan Kerja, Bukan Angkatan Kerja, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sleman Tahun 2023	138
Tabel 4.50	Data Angkatan Kerja Kabupaten Sleman Tahun 2023	139
Tabel 4.51	Data Jenis Pekerjaan Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2023	141
Tabel 4.52	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2023	145
Tabel 4.53	Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman Tahun 2023	148
Tabel 5.1	Capaian Persentase Kepemilikan KK dan KTP	150
Tabel 5.2	Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran	153
Tabel 5.3	Kepemilikan Akta Perkawinan	155
Tabel 5.4	Kepemilikan Akta Perceraian	155

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Analisis Kuadran Antara Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Kepadatan Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2023	36
Gambar 4.2	Jumlah Penduduk Menurut Kapanewon dan Jenis Kelamin Berdasarkan Data SIAK Tahun 2023	38
Gambar 4.3	Analisis Rasio jenis kelamin menurut Kelompok Umur di Kabupaten Sleman Tahun 2023	42
Gambar 4.4	Piramida Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2023	48
Gambar 4.5	Piramida Penduduk Kapanewon Gamping Tahun 2023	50
Gambar 4.6	Piramida Penduduk Kapanewon Godean Tahun 2023	51
Gambar 4.7	Piramida Penduduk Kapanewon Moyudan Tahun 2023	52
Gambar 4.8	Piramida Penduduk Kapanewon Minggir Tahun 2023	53
Gambar 4.9	Piramida Penduduk Kapanewon Seyegan Tahun 2023	54
Gambar 4.10	Piramida Penduduk Kapanewon Mlati Tahun 2023	55
Gambar 4.11	Piramida Penduduk Kapanewon Depok Tahun 2023	56
Gambar 4.12	Piramida Penduduk Kapanewon Berbah Tahun 2023	58
Gambar 4.13	Piramida Penduduk Kapanewon Prambanan Tahun 2023	59
Gambar 4.14	Piramida Penduduk Kapanewon Kalasan Tahun 2023	60
Gambar 4.15	Piramida Penduduk Kapanewon Ngemplak Tahun 2023	61
Gambar 4.16	Piramida Penduduk Kapanewon Ngaglik Tahun 2023	62
Gambar 4.17	Piramida Penduduk Kapanewon Sleman Tahun 2023	63
Gambar 4.18	Piramida Penduduk Kapanewon Tempel Tahun 2023	64
Gambar 4.19	Piramida Penduduk Kapanewon Turi Tahun 2023	65
Gambar 4.20	Piramida Penduduk Kapanewon Pakem Tahun 2023	66
Gambar 4.21	Piramida Penduduk Kapanewon Cangkringan Tahun 2023	67
Gambar 4.22	Persentase Penduduk Sleman Menurut Status Perkawinan Berdasarkan Data SIAK Tahun 2023	73
Gambar 4.23	Persentase Kepala Keluarga Menurut Status Bekerja Tahun 2023	85
Gambar 4.24	Persentase Penduduk Sleman Menurut Agama/Kepercayaan yang Dianut Berdasarkan Data SIAK Tahun 2023	92
Gambar 4.25	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sleman Tahun 2023	147
Gambar 5.1	Capaian Persentase Kepemilikan KK	150
Gambar 5.2	Capaian Persentase Rekam KTP	151
Gambar 5.3	Kepemilikan Akta Perkawinan	154
Gambar 5.4	Kepemilikan Kartu Identitas Anak	158
Gambar 5.5	Kepemilikan Kartu Identitas Anak Menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman	158

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses pembangunan sebuah wilayah tidak bisa dipisahkan dari aspek kependudukan. Faktor kependudukan penting dalam perencanaan pembangunan karena jumlah penduduk dan komposisinya akan mempengaruhi permintaan akan sumber daya, tenaga kerja, infrastruktur, dan layanan publik.

Kependudukan merupakan isu strategis dalam kerangka pembangunan nasional. Pertama, kependudukan atau dalam hal ini penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program yang dilakukan. Kedua, keadaan atau kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan pemerintah. Ketiga, dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka yang panjang. Keempat, karena luasnya cakupan masalah kependudukan.

Pembangunan kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan. Secara garis besar pembangunan kependudukan dapat dijabarkan dalam 5 (lima) dimensi, yaitu: Pertama, berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain: jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk. Kedua, berkaitan dengan kualitas penduduk yang berhubungan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan. Ketiga adalah mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antara perkotaan dan perdesaan. Keempat adalah data dan informasi penduduk dan kelima

adalah penyerasian kebijakan kependudukan. Pembangunan Kependudukan dan KB di Indonesia harus benar-benar dapat memanfaatkan jendela peluang demografi untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa indikator utama dari hasil pembangunan dinyatakan melalui tingkat pendapatan atau distribusinya, tingkat partisipasi kerja, status pendidikan dan kesehatan, serta kualitas lingkungan. Pembangunan ini akan berdampak pada kualitas manusia sebagai elemen kependudukan.

Penduduk merupakan subjek dan objek pembangunan. Pentingnya komponen penduduk dalam pembangunan menjadikan kebutuhan akan data kependudukan sebagai hal yang sangat mendasar. Data dapat menjadi bukti empiris dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan (*evidence-based policy*). Sehubungan dengan hal tersebut, data kependudukan dibutuhkan untuk mengakomodasi empat hal penting yaitu: peningkatan kualitas, pengendalian kuantitas, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, serta terakhir administrasi penduduk.

Kebutuhan data dan informasi kependudukan yang lengkap dan akurat untuk menunjang perencanaan pembangunan sangat penting dan menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program-program kependudukan dan pembangunan lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan mengamanatkan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan.

Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi kependudukan di Kabupaten Sleman dan prediksi prospek kependudukan di masa yang akan datang untuk menunjang pemenuhan kebutuhan informasi kependudukan dalam merencanakan kebijakan sektor maupun program sektoral terkait dalam upaya peningkatan kualitas dan kesejahteraan

penduduk. Dengan profil perkembangan kependudukan ini, akan diketahui jumlah sumber daya manusia yang dimiliki, menurut umur, jenis kelamin, persebaran, laju pertumbuhannya, maupun karakteristik lainnya. Informasi pada Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini diambil dari informasi pada rentang waktu tahun 2023.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan profil perkembangan kependudukan adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- c) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan
- g) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- h) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010/Nomor 162/Menkes/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan adalah :

- a) Menyediakan informasi perkembangan kependudukan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan.
- b) Mengetahui jumlah sumber daya manusia yang ada, menurut umur, jenis kelamin maupun karakteristik yang lainnya.
- c) Mengetahui keadaan dan persebaran penduduk dari waktu ke waktu, agar penyebarannya serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

1.4 Ruang Lingkup

Laporan ini menyajikan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sleman Tahun 2023. Profil ini merupakan hasil olahan rekaman data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) bersumber dari hasil kompilasi dan konsolidasi registrasi KTP-el. Di KTP-el terekam data dasar demografi menyangkut umur, tahun kelahiran, jenis kelamin, pendidikan, dan kegiatan penduduk. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengolah data itu dan dijadikan sebagai data dasar kependudukan di Indonesia. Sejak tahun 2013, hasil olahan itu oleh Kemendagri khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), digunakan sebagai data dasar penyusunan profil kependudukan di tiap kabupaten/kota dan provinsi.

Laporan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sleman membahas tentang perkembangan kependudukan yang terdiri atas data kuantitas, kualitas, dan kepemilikan dokumen kependudukan lingkup wilayah Kabupaten Sleman yang meliputi 17 kapanewon yaitu Kapanewon Gamping, Kapanewon Godean,

Kapanewon Moyudan, Kapanewon Minggir, Kapanewon Seyegan, Kapanewon Mlati, Kapanewon Depok, Kapanewon Berbah, Kapanewon Prambanan, Kapanewon Kalasan, Kapanewon Ngemplak, Kapanewon Ngaglik, Kapanewon Sleman, Kapanewon Tempel, Kapanewon Turi, Kapanewon Pakem dan Kapanewon Cangkringan. Data kuantitas penduduk, meliputi komposisi dan persebaran penduduk, jumlah komposisi dan persebaran penduduk, penduduk menurut karakteristik demografi. Data kualitas penduduk, meliputi kondisi kependudukan dari sisi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial. Data kepemilikan dokumen kependudukan berupa kepemilikan Kartu Keluarga, KTP-el, Kartu Identitas Anak, dan Akta meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, dan akta kematian.

1.5 Pengertian Umum

Pengertian umum terhadap istilah yang digunakan dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan:

1.5.1 Kependudukan

Beberapa pengertian umum dalam konsep kependudukan diantaranya.

- a) **Penduduk** adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- b) **Data Kependudukan** adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- c) **Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)** adalah sistem

informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.

- d) **Kependudukan** adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
- e) **Perkembangan Kependudukan** adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.
- f) **Profil perkembangan kependudukan** adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan.
- g) **Persebaran penduduk** adalah kondisi sebaran penduduk menurut keruangan.
- h) **Penyebaran penduduk** adalah upaya mengubah persebaran penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- i) **Umur median** (*median age*) adalah umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama, yaitu bagian yang pertama lebih muda dan bagian yang kedua lebih tua dari umur median.
- j) **Rasio jenis kelamin** (*sex ratio*) adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu.
- k) **Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan** (*dependency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia di bawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun).
- l) **Rasio kepadatan penduduk** (*density ratio*) adalah angka yang

menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada periode tahun tertentu.

- m) **Laju pertumbuhan penduduk** adalah rata-rata tahunan laju perubahan jumlah penduduk di suatu daerah selama periode waktu tertentu.
- n) **Piramida penduduk adalah** grafik berbentuk piramida yang merupakan gambaran secara visual dari komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin.
- o) **Rata-rata usia kawin pertama** (*singulate mean age at marriage*) adalah perkiraan rata-rata umur kawin pertama berdasarkan jumlah penduduk yang tetap lajang (belum kawin).
- p) **Keluarga** adalah sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya.
- q) **Jumlah kelahiran** adalah banyaknya kelahiran hidup yang terjadi pada waktu tertentu pada wilayah tertentu.
- r) **Angka Kelahiran Umum** (*General Fertility Rate/GFR*), adalah angka yang menunjukkan jumlah bayi yang lahir dari setiap 1.000 wanita pada usia reproduksi atau melahirkan yaitu pada kelompok usia 15-49 tahun.
- s) **Angka Kelahiran Kasar** (*Crude Birth Rate/CBR*), adalah angka kelahiran yang menunjukkan jumlah kelahiran perseribu penduduk dalam suatu periode.
- t) **Rasio anak dan perempuan** (*CWR= child women ratio*) adalah rasio antara jumlah anak dibawah lima tahun di suatu tempat pada suatu waktu, dengan penduduk perempuan usia 15-49 tahun.
- u) **Tingkat Kematian Kasar** (*Crude Death Rate/CDR*), adalah angka yang menunjukkan rata-rata kematian perseribu penduduk dalam satu tahun.
- aa) **Tingkat Kematian Bayi** (*Infant Mortality Rate/IMR*), adalah angka yang

menunjukkan banyaknya bayi yang meninggal dari setiap 1.000 bayi yang lahir hidup.

1.5.2 Tenaga Kerja

Beberapa pengertian umum dalam konsep ketenagakerjaan diantaranya.

- a) **Penduduk** adalah penduduk yang berdomisili atau menetap di wilayah tersebut.
- b) **Penduduk usia kerja** adalah penduduk yang berumur 15 tahun atau lebih.
- c) **Angkatan kerja** adalah penduduk usia 15 tahun atau lebih yang sudah bekerjadan yang belum bekerja tetapi punya keinginan bekerja (masih menganggur).
- d) **Bukan angkatan kerja** adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas dengan kegiatan utama sekolah, ibu rumah tangga, pensiunan, dan penduduk dengan status disabilitas.
- e) **Penganggur terbuka** adalah penduduk dengan usia 15 tahun atau lebih yang tidak bekerja tetapi punya keinginan bekerja/sedang mencari pekerjaan atau disebut penganggur murni. Pada definisi ini benar-benar tidak bekerja, tidak membantu orang lain termasuk orang tua dalam pekerjaannya meskipun tidak dibayar.
- f) **Setengah pengangguran** adalah angkatan kerja yang bekerja namun belum termanfaatkan secara maksimal. Pemanfaatan tersebut diukur dengan jam kerja. Setengah pengangguran adalah angkatan kerja yang bekerja dengan jam kerja kurang dari 35 jam per minggu.
- g) **Usia Bekerja** adalah penduduk dengan usia 15 tahun atau lebih yang bekerja untuk memperoleh pendapatan, atau membantu memperoleh pendapatan.

- h) **Usia Sekolah** adalah penduduk dengan usia 15 tahun atau lebih yang masih sekolah, sedangkan anak sekolah tetapi usianya di bawah 15 tahun tidak termasuk definisi ini, tetapi masuk definisi anak.
- i) **Mengurus Rumah Tangga** adalah penduduk dengan usia 15 tahun atau lebih yang mengurus rumah tangga, karena sesuatu alasan misalnya pendapatan sudah cukup, mengurus anak dan alasan lain sehingga tidak ingin bekerja atau mencari pekerjaan lagi.
- j) **Penerima pendapatan dan lainnya** adalah penduduk dengan usia 15 tahun atau lebih yang tidak bekerja karena alasan telah menerima pendapatan dari pensiun, simpanan/sewa atas milik dan karena alasan usia tua, pensiun, cacat dan alasan lainnya.
- k) **Anak.** Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

1.5.3 Sosial

Beberapa pengertian umum dalam konsep aspek sosial diantaranya.

1.5.3.1 Pendidikan

- a) **Angka Partisipasi Sekolah** adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang sekolah dengan jumlah penduduk menurut umur tertentu.
- b) **Angka Partisipasi Kasar** adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk menurut umur jenjang pendidikan tertentu. Contoh Angka Partisipasi Kasar SD merupakan perbandingan antara jumlah siswa SD dibandingkan dengan jumlah penduduk berumur 7-12 tahun.

- c) **Angka Partisipasi Murni** adalah jumlah penduduk menurut usia tertentu dengan kegiatan utama sekolah. Contoh Angka partisipasi murni SD merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang sekolah dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun pada suatu wilayah.
- d) **Angka melek huruf** adalah perbandingan jumlah penduduk yang mampu membaca dan berhitung menurut jumlah penduduk pada suatu wilayah tertentu.
- e) **Angka harapan sekolah** adalah tingkat pendidikan yang diproyeksi bisa ditempuh masyarakat yang terlahir pada suatu kelompok tertentu.

1.5.3.2 Kesehatan

- a) **Angka Kematian Bayi** adalah jumlah bayi yang mati menurut jumlah kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu di suatu wilayah
- b) **Angka kematian Ibu** adalah jumlah ibu yang meninggal karena proses kelahiran dibandingkan dengan jumlah ibu yang melahirkan hidup pada suatu tahun tertentu di suatu wilayah

Dua puluh enam jenis PMKS dengan batasan pengertian dan kriteria antara lain adalah sebagai berikut ini.

- c) **Anak Balita Terlantar** adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang diterlantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
 - 1. Yatim piatu atau tidak dipelihara, ditinggalkan oleh orang tuanya pada orang lain, di tempat umum, rumah sakit, dan sebagainya.

2. Tidak pernah/tidak cukup diberi ASI dan/atau susu tambahan/pengganti.
3. Makan makanan pokok tidak mencukupi.
4. Anak dititipkan atau ditinggal sendiri yang menimbulkan keterlantaran
5. Apabila sakit tidak mempunyai akses Kesehatan modern (di bawake Puskesmas, dll)
6. Mengalami eksploitasi

d) **Anak Terlantar** (sesuai SK Permensos RI No 27 tahun 1984) adalah seorang anak berusia 5 (lima) sampai <18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Kriteria :

1. Berasal dari keluarga fakir miskin
2. Anak yang mengalami perlakuan salah (kekerasan dalam rumah tangga)
3. Ditelantarkan oleh orang tua/keluarga
4. Anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga
5. Anak yang tidak pernah sekolah atau tidak sekolah lagi dan tidak tamat SMP
6. Makan makanan pokok kurang dari 2 kali sehari
7. Memiliki pakaian kurang dari 4 stel layak pakai
8. Bila sakit tidak diobati
9. Yatim, piatu atau yatim piatu
10. Tinggal bersama dengan bukan orang tua kandung yang miskin
11. Anak yang berusia kurang dari 18 tahun dan bekerja

- e) **Anak berhadapan dengan hukum** (sesuai UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak) adalah seorang anak yang berusia 6 (enam) sampai <18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, 1) yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana; 2) yang menjadi korban tindak pidana atau melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Kriteria:

1. Anak diindikasikan (terlaporkan di kepolisian) melakukan pelanggaran hukum
 2. Anak yang mengikuti proses peradilan
 3. Anak yang berstatus diversi (pengalihan hak asuh anak kepada pihak lain atas keputusan pengadilan)
 4. Anak yang telah menjalani masa hukuman pidana atau sedang mengikuti pembinaan dalam bimbingan kemasyarakatan lepas
 5. Anak yang menjadi korban perbuatan pelanggaran hukum
 6. Anak yang menjadi korban sengketa hukum akibat perceraian orang tua: perdata
 7. Anak yang karena suatu sebab menjadi saksi tindak pidana
- f) **Anak Jalanan** adalah seorang anak yang berusia 5 sampai <18 tahun, dan anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Kriteria:

1. Anak yang rentan bekerja di jalanan karena suatu sebab
2. Anak yang melakukan aktivitas di jalanan
3. Anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan

4. Jangka waktu di jalanan lebih dari 6 (enam) jam per hari dan dihitung untuk 1 (satu) bulan yang lalu

g) **Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)** adalah seseorang yang berusia 18 tahun kebawah yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi- fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Kriteria:

1. Anak dengan disabilitas fisik: tubuh, netra, rungu, wicara
2. Anak dengan disabilitas mental: mental retardasi dan eks psikotik
3. Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda
4. Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari

h) **Anak yang memerlukan perlindungan khusus** adalah anak usia 0-<18 tahun dalam situasi darurat, anak korban perdagangan/penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak korban eksploitasi, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat terpencil, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta anak yang terinfeksi HIV/AIDS.

Kriteria:

1. Anak dalam situasi darurat
2. Anak korban perdagangan
3. Anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental

4. Anak korban eksploitasi
 5. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adatterpencil
 6. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta
 7. Anak yang terinfeksi HIV/AIDS
- i) **Lanjut Usia Terlantar** adalah seseorang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Kriteria:

1. Tidak ada keluarga yang mengurusnya
2. Keterbatasan kemampuan keluarga yang mengurusnya
3. Tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari
4. Menderita minimal 1 (satu) jenis penyakit yang dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan hidupnya
5. Lanjut usia yang hidup dalam keluarga fakir miskin

Untuk Lanjut Usia Terantar terbagi menjadi 2 kriteria yaitu:

LUT Potensial : lanjut usia terlantar yang masih mampu melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa

LUT Tidak Potensial : lanjut usia terlantar yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sehingga hidupnya tergantung pada bantuan orang lain.

- j) **Penyandang disabilitas** adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani

maupunsosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental.

Kriteria:

1. Mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktivitas sehari-hari
2. Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari
3. Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai
4. Penyandang disabilitas fisik: tubuh, netra, rungu wicara
5. Penyandang disabilitas mental: mental retardasi dan eks psikotik
6. Penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda

k) **Tuna susila** adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

Kriteria :

1. Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun
2. Menjajakan diri di tempat umum di lokasi atau tempat pelacuran (bordil), dan tempat terselubung (warung remang-remang, hotel, mall dan diskotik)

l) **Gelandangan** adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai mata pencaharian dan tempat tinggal yang tetap sertamengembara di tempat umum.

Kriteria:

1. Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun, tinggal disembarang tempat dan hidup mengembara atau menggelandang di tempat-tempat umum, biasanya di kota-kota besar
 2. Tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri, berperilaku kehidupan bebas/liar, terlepas dari norma kehidupan masyarakat pada umumnya
 3. Tidak mempunyai pekerjaan tetap, meminta-minta atau mengambil sisa makanan atau barang bekas, dan lain-lain.
- m) **Pengemis** adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Kriteria:

1. Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun
 2. Meminta-minta di rumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan (lampu lalu lintas), pasar, tempat ibadah dan tempat umum lainnya
 3. Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan berpura-pura sakit, merintih, dan kadang-kadang mendoakan dengan bacaan-bacaan ayat suci, dengan alasan meminta sumbangan untuk organisasi tertentu
 4. Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, membaaur dengan penduduk pada umumnya
- n) **Pemulung** adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara mengais langsung dan pendaur-ulang barang-barang bekas.

Kriteria: Tidak mempunyai pekerjaan tetap atau mengais langsung dan

mendaur-ulang barang bekas, dan lain-lain

- o) **Kelompok minoritas** adalah individu atau kelompok yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk seperti waria, gay dan lesbian.

Kriteria:

1. Tidak dominan dengan ciri khas, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk
2. Mempunyai perilaku menyimpang

- p) **Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP)** adalah seseorang yang telah selesai atau dalam 3 (tiga) bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

Kriteria:

1. Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun
 2. Telah selesai atau segera keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana
 3. Kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat
 4. Sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap
 5. Berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya
- q) Orang **dengan HIV/AIDS (ODHA)** adalah seseorang yang telah terinfeksi HIV dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

Kriteria:

1. Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun
 2. Telah terinfeksi HIV/AIDS
- r) Korban **penyalahgunaan NAPZA** adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan NAPZA karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA.

Kriteria:

1. Seseorang (laki-laki/perempuan)
 2. Pernah menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya termasuk minuman keras, yang dilakukan sekali, lebih sekali atau dalam taraf coba-coba
 3. Secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang
 4. Tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya
- s) Korban **trafficking** adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)

Kriteria:

1. Mengalami tindak kekerasan
2. Mengalami eksploitasi seksual
3. Mengalami penelantaran
4. Mengalami pengusiran (deportasi)
5. Ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara

tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu

- t) Korban **tindak kekerasan** adalah orang (baik individu, keluarga maupun kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria: Individu, kelompok maupun kesatuan masyarakat yang mengalami:

1. tindak kekerasan
 2. penelantaran
 3. eksploitasi
 4. diskriminasi
 5. bentuk-bentuk tindak kekerasan lainnya
- u) Pekerja **Migran Bermasalah Sosial (PMBS)** adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial seperti tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidakmampuan menyesuaikan diri ditempat kerja baru atau di negara tempatnya bekerja, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi sosial.

Kriteria:

1. Calon pekerja migran
2. Pekerja migran internal
3. Pekerja migran lintas negara
4. Eks pekerja migran

yang mengalami masalah sosial dalam bentuk:

1. tindak kekerasan
2. eksploitasi
3. penelantaran
4. pengusiran (deportasi)
5. ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempatnya bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu

v) **Korban bencana alam** adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Kriteria: Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

1. Korban jiwa
2. Kerusakan lingkungan
3. Kerugian harta benda, dan
4. Dampak psikologis

w) **Korban bencana sosial** adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Kriteria: Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

1. Korban jiwa manusia
2. Kerusakan lingkungan

3. Kerugian harta benda, dan
4. Dampak psikologis

x) **Perempuan Rawan Sosial Ekonomi** adalah seorang perempuan dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria:

1. Perempuan berusia 18-59 tahun
2. Istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan
3. Menjadi pencari nafkah utama keluarga
4. Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak .

y) **Fakir miskin** adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.

Kriteria:

1. Penghasilan rendah atau berada di bawah garis sangat miskin yang dapat diukur dari tingkat pengeluaran per orang per bulan berdasarkan standar BPS per wilayah provinsi dan kabupaten/kota
2. Ketergantungan pada bantuan pangan untuk penduduk miskin (seperti zakat/beras untuk orang miskin/santunan sosial)
3. Keterbatasan kepemilikan pakaian untuk setiap anggota keluarga per tahun (hanya mampu memiliki 1 stel pakaian lengkap per orang per tahun)
4. Tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu anggota

keluarga sakit

5. Tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun bagi anak- anaknya
6. Tidak memiliki harta (asset) yang dapat dimanfaatkan hasilnya atau dijual untuk membiayai kebutuhan hidup selama tiga bulan atau dua kali batas garis sangat miskin
7. Tinggal di rumah yang tidak layak huni
8. Sulit memperoleh air yang bersih

aa) **Keluarga bermasalah sosial psikologis** adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar

Kriteria:

1. Suami atau istri sering tanpa saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi
2. Suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga
3. Hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak maubergaul/berkomunikasi
4. Kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi.

2 GAMBARAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

2.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas wilayah Kabupaten Sleman 574,82 Km² atau 18% dari luas wilayah DIY, terbentang di antara 110°33'00" dan 110°13'00" Bujur Timur, serta 7°34'51" dan 7°47'03" Lintang Selatan. Di sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Magelang, serta di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Gunungkidul.

Wilayah Kabupaten Sleman memiliki ketinggian antara 100 meter hingga 2.500 meter di atas permukaan laut. Bagian selatan relatif datar dengan peruntukan utama sebagai lahan pertanian, industri, dan permukiman, sedangkan bagian utara merupakan lereng Gunung Merapi yang memiliki banyak potensi sumber air. Bagian lereng selatan Gunung Merapi terdapat dua buah bukit, yaitu Bukit Turgo dan Bukit Plawangan yang merupakan bagian dari kawasan wisata Kaliurang. Beberapa sungai yang mengalir melalui Kabupaten Sleman menuju Pantai Selatan antara lain Sungai Progo, Krasak, Sempor, Kuning, Boyong, Winongo, Gendol dan Opak.

Secara administratif, Kabupaten Sleman terbagi atas 17 kecamatan, 86 kelurahan, dan 1.212 pedukuhan. Adapun detail pembagian wilayah yang ada di kabupaten sleman adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Luas Wilayah dan Pembagian Daerah Administratif Kabupaten Sleman

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Desa	Jumlah Pedukuhan
1.	Gamping	2,925	5	59
2.	Godean	2,684	7	77
3.	Moyudan	2,762	4	65
4.	Minggir	2,727	5	68
5.	Seyegan	2,663	5	67
6.	Mlati	2,852	5	74
7.	Depok	3,555	3	58
8.	Berbah	2,299	4	58
9.	Prambanan	4,135	6	68
10.	Kalasan	3,584	4	80
11.	Ngemplak	3,571	5	82
12.	Ngaglik	3,852	6	87
13.	Sleman	3,132	5	83
14.	Tempel	3,249	8	110
15.	Turi	4,309	4	42
16.	Pakem	4,384	5	61
17.	Cangkringan	4,799	5	73
KABUPATEN SLEMAN		57,482	86	1.212

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman, 2014

2.2 Kondisi Demografis Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman menjadi salah satu wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki daya tarik bagi para pendatang. Salah satu potensi tersebut disebabkan oleh adanya perguruan tinggi ternama, seperti UGM, UNY, UPN, dan UIN Sunan Kalijaga; empat perguruan tinggi negeri kedinasan (STPN, AAU, MMTC, dan STTN-BATAN), serta 46 perguruan tinggi swasta, seperti UII, USD, dan UAJ. Berdasarkan data SIAK Tahun 2023 seperti dalam Tabel 2.2, jumlah penduduk Kabupaten Sleman sebanyak 1.112.616 jiwa, yang terdiri atas laki-laki sebesar 550.915 jiwa atau 49,52 persen dan perempuan sebesar 561.701 jiwa atau 50,48 persen.

**Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Menurut Kapanewon dan Jenis Kelamin
Tahun 2023**

No.	Kapanewon	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		Laki2	Persen	Perempuan	Persen	Jumlah
1	Gamping	47,895	8.69	48,464	8.63	96,359
2	Godean	35,774	6.49	36,145	6.43	71,919
3	Moyudan	16,850	3.06	17,050	3.04	33,900
4	Minggir	15,909	2.89	16,758	2.98	32,667
5	Seyegan	26,114	4.74	26,518	4.72	52,632
6	Mlati	47,299	8.59	47,713	8.49	95,012
7	Depok	62,018	11.26	63,765	11.35	125,783
8	Berbah	28,404	5.16	28,978	5.16	57,382
9	Prambanan	27,255	4.95	27,960	4.98	55,215
10	Kalasan	42,994	7.80	43,779	7.79	86,773
11	Ngemplak	32,479	5.90	33,020	5.88	65,499
12	Ngaglik	50,634	9.19	51,987	9.26	102,621
13	Sleman	35,606	6.46	36,302	6.46	71,908
14	Tempel	27,293	4.95	27,882	4.96	55,175
15	Turi	19,132	3.47	19,205	3.42	38,337
16	Pakem	19,283	3.50	19,845	3.53	39,128
17	Cangkringan	15,976	2.90	16,330	2.91	32,306
Kabupaten Sleman		550,915	100	561,701	100	1.112.616

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023

Berdasarkan jumlah penduduk menurut wilayah di Kabupaten Sleman pada tahun 2023, diketahui jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kapanewon Depok yang mencapai 125.783 jiwa (11,31 persen), terbesar kedua adalah Kapanewon Ngaglik sebanyak 102.621 jiwa (9,22 persen). Wilayah dengan jumlah penduduk paling rendah adalah Kapanewon Cangkringan dengan jumlah penduduk 32.306 jiwa (2,90 persen).

Kondisi jumlah penduduk menurut wilayah dapat memberikan gambaran tingkat kemajuan suatu wilayah. Suatu daerah yang memiliki daya tarik, terutama dalam

bidang sosial, ekonomi, maupun pendidikan, menjadi tujuan bagi para penduduk untuk migrasi ke wilayah tersebut, baik penduduk dari kabupaten lain maupun luar provinsi. Empat kapanewon dengan penduduk terpadat di Sleman tersebut (Depok, Ngaglik, Gamping, dan Mlati) merupakan wilayah aglomerasi perkotaan Yogyakarta sehingga tumbuh pesat menjadi pusat pertumbuhan, baik pendidikan, industri, perdagangan, maupun jasa. Kapanewon Cangkringan yang memiliki jumlah penduduk terkecil merupakan wilayah yang mempunyai fungsi khusus atau wilayah penyangga (*buffer zone*) bersama dengan Kapanewon Tempel, Turi, dan Pakem yang berada di lereng Gunung Merapi.

2.3 Kondisi Ekonomi Daerah

Struktur ekonomi sebuah wilayah terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha yang menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Struktur perekonomian di Kabupaten Sleman didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan; Konstruksi; Jasa Pendidikan; Informasi dan Komunikasi; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sleman.

Pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) di Kabupaten Sleman pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 8,65 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, semua lapangan usaha di tahun 2023 mengalami pertumbuhan yang positif. Sektor lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah sektor transportasi dan pergudangan dengan pertumbuhan sebesar 14,66 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum dengan pertumbuhan 12,64 persen, jasa perusahaan dengan pertumbuhan 12,41 persen, dan paling rendah ada di administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib sebesar 4,15 persen.

Tabel 2.3 Produk Domestik Regional Bruto dan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sleman Tahun 2022-2023

Lapangan Usaha		Nilai PDRB (milyarrupiah)		Laju Pertumbuhan PDRB (%)
		2022	2023	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.352.960,62	4.788.572,74	10,01
B	Pertambangan dan Penggalian	177.389,71	198.378,96	11,83
C	Industri Pengolahan	6.886.434,77	7.392.844,76	7,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas	60.624,13	68.085,61	12,31
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	25.536,88	26.885,49	5,28
F	Konstruksi	6.304.254,39	6.708.270,84	6,41
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.221.435,60	4.566.587,62	8,18
H	Transportasi dan Pergudangan	2.291.889,92	2.627.862,50	14,66
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.411.919,15	6.096.231,16	12,64
J	Informasi dan Komunikasi	5.725.177,25	6.107.981,12	6,69
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.969.171,70	2.206.364,80	12,05
L	Real Estate	4.212.194,00	4.480.735,08	6,38
M,N	Jasa Perusahaan	866.906,28	974.498,39	12,41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3.532.970,65	3.679.640,65	4,15
P	Jasa Pendidikan	5.579.832,22	6.047.075,71	8,37
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.631.118,28	1.837.922,65	12,68
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1.452.647,03	1.623.598,16	11,77
Produk Domestik Regional Bruto		54.702.462,58	59.431.536,25	8,65

Sumber: Kabupaten Sleman Dalam Angka 2023

2.4 Potensi Kabupaten Sleman

Pengembangan sumber daya alam didasarkan pada 4 kawasan, yaitu: pertama, pengembangan sumber daya alam Kawasan lereng gunung Merapi, wilayah yang masuk dalam Kawasan ini adalah Kapanewon Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan sampai dengan Puncak Gunung Merapi. Pengembangan wilayah yang ada di Kawasan ini adalah bertumpu pada eksplorasi sumber daya air dan potensi ekowisata yang mengandalkan aktivitas gunung Merapi dan ekosistemnya.

Pengembangan Kawasan kedua, adalah Kawasan Timur Sleman yang meliputi Kapanewon Prambanan, Kalasan, dan Berbah. Wilayah ini banyak terdapat situs yang merupakan tempat peninggalan purbakala (candi) sebagai pusat wisata budaya dan daerah lahan kering serta sumber bahan batu putih. Ketiga, kawasan Tengah Sleman yang merupakan wilayah aglomerasi perkotaan Yogyakarta yang meliputi Kapanewon Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok, dan Gamping. Wilayah ini berkembang pesat karena menjadi pusat pendidikan, perdagangan, jasa, dan industri. Keempat, kawasan Barat Sleman yang meliputi Kapanewon Godean, Minggir, Seyegan, dan Moyudan. Wilayah ini merupakan wilayah yang sangat subur sehingga dikembangkan sebagai daerah dengan pertanian lahan basah dan penghasilan bahan baku kegiatan industri kerajinan.

Pada aspek pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, Kabupaten Sleman terbagi menjadi 3 kawasan. Pertama, wilayah aglomerasi perkotaan Yogyakarta, meliputi Kapanewon Depok, Gamping, serta sebagian wilayah Kapanewon Ngaglik, Ngemplak, Kalasan Berbah, Sleman, dan Mlati. Kedua, wilayah sub-urban, meliputi kota Kapanewon Godean, Sleman, dan Ngaglik, menjadi pusat pertumbuhan karena letaknya cukup jauh dari kota Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan kegiatan masyarakat di wilayah kapanaewon sekitarnya. Ketiga, wilayah fungsi khusus atau wilayah penyangga, meliputi Kapanewon Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan, yang merupakan pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya.

Pada aspek pengembangan wilayah sebagai akibat dari adanya jalur lintas antar daerah, Kabupaten Sleman dianggap sebagai salah satu wilayah yang strategis sebagai tujuan pengembangan Kawasan industri, perdagangan dan jasa. Wilayah

Kabupaten Sleman dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi penghubung wilayah Sleman dengan beberapa kota pelabuhan seperti Semarang, Surabaya, Jakarta. Jalur tersebut melintasi wilayah Kapanewon Prambanan, Kalasan, Depok, Mlati, dan Gamping. Selain itu, terdapat beberapa wilayah yang dilalui jalan lingkar (ring road) sebagai jalan arteri primer yaitu Kapanewon Depok, Mlati dan Gamping. Wilayah kapanewon dapat dengan cepat berkembang dari pertanian menjadi kawasan industri, perdagangan dan jasa.

Kabupaten Sleman juga merupakan daerah pendidikan dengan beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta ternama seperti UGM, UNY, UPN, UIN, UII, STIE YKPN. Dengan banyaknya perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Sleman, tentu berkembang pula kawasan hunian kost-kostan bagi mahasiswa sehingga sektor perdagangan dan jasa juga sangat pesat diwilayah tersebut terutama makanan dan minuman.

3 SUMBER DATA

Laporan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sleman berdasarkan pada data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dilengkapi dengan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Sleman, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Kementerian Agama, BPS Kabupaten Sleman serta instansi-instansi terkait.

Dari beberapa sumber data yang disebutkan diatas dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu sumber data hasil registrasi, sumber data non-registrasi dan sumber data lintas sektor. Adapun detail dari masing-masing sumber data tersebut adalah sebagai berikut:

3.1 Sumber Data Hasil Registrasi

Sumber data hasil registrasi penduduk merupakan sumber data yang berasal dari sistem registrasi yang dilaksanakan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Data hasil registrasi meliputi komponen data penduduk yang dinamis yaitu pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan tempat tinggal dan perubahan pekerjaan. Komponen-komponen ini dapat berubah kapan saja sehingga diperlukan registrasi penduduk yang dapat berubah setiap saat.

Kelebihan penggunaan data hasil registrasi penduduk ini diantaranya adalah datanya relative lengkap manakala setiap penduduk di Kabupaten Sleman mau mendaftarkan diri, akurasi datanya sangat baik apabila semua data dapat dilaporkan, dan sifat datanya terus menerus atau *real time*. Adapun kekurangan dari sumber data hasil registrasi adalah datanya bersifat *de jure*, informasi yang disajikan relative sedikit, kelengkapan data sangat tergantung pada kesadaran penduduk untuk melaporkan, dan kecermatan data sangat bergantung pada kontinuitas pencatatan dan sistem.

3.2 Sumber Data Hasil Non-Registrasi

Sumber data yang berasal dari hasil Non-registrasi berasal dari data sensus dan survei. Jenis data yang digunakan dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan Kabupaten Sleman Tahun 2023 dari sumber non-registrasi sangat minim. Kondisi ini disebabkan karena aksesibilitas terhadap data sulit untuk didapatkan. Upaya yang dilakukan dalam pemanfaatan data sumber non-registrasi hanya mengacu pada hasil data yang sudah dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman. data tersebut diantaranya adalah profil ekonomi Kabupaten Sleman.

3.3 Sumber Data dari Lintas Sektor

Sumber data yang berasal dari lintas sektor dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan Kabupaten Sleman sangat banyak. Data-data tersebut diperoleh dari Dinas teknis diantaranya data dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, DP3AP2KB, dan juga data dari Kementrian Agama tingkat kabupaten. Beberapa data yang dikumpulkan tersebut diantaranya adalah:

1. Data terkait Kesehatan ibu dan bayi
2. Data terkait Pendidikan
3. Data ketenagakerjaan
4. Data terkait penggunaan alat kontrasepsi

4 PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

4.1 Data Kuantitas Penduduk

Komponen pokok kependudukan yang perlu di kaji dalam profil perkembangan kependudukan adalah proses kependudukan dan struktur kependudukan. Proses kependudukan mencakup aspek kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk. Struktur kependudukan mencakup aspek komposisi antara lain komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin, status perkawinan, dan lain-lain. Hasil dari dua komponen baik proses maupun struktur adalah dasar bagi proses pembangunan secara keseluruhan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bahwa dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas perlu dilakukan berbagai program antara lain pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan.

4.1.1 Jumlah dan Persebaran Penduduk

Jumlah dan persebaran penduduk dapat dilihat dari tingkat kepadatan penduduk. Tingkat kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah manusia pada suatu batas ruang tertentu dengan luas ruangnya (Sarwono, 1992). Sementara menurut Mantra (2003), kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang dihuni. Kepadatan penduduk merupakan indikator terjadinya tekanan penduduk di suatu daerah. Kepadatan di suatu daerah

dibandingkan dengan luas tanah yang ditempati dinyatakan dengan banyaknya penduduk per kilometer persegi. Menurut BPS (1995), kepadatan penduduk dibagi menjadi tiga jenis yaitu.

- a. Kepadatan penduduk kasar (*Crude Population Density*), yaitu menunjukkan banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah.
- b. Kepadatan fisiologis (*Physiological Density*), yang menyatakan banyaknya penduduk untuk setiap kilometer persegi wilayah. Lahan yang ditanami (*Cultivable Land*).
- c. Kepadatan agraris (*Agriculture Density*), menunjukkan banyaknya penduduk petani untuk setiap kilometer persegi wilayah *Cultivable Land*. Ukuran ini menggambarkan intensitas pertanian dari petani terhadap lahan yang mencerminkan efisiensi teknologi pertanian dan intensitas tenaga kerja pertanian.

Kepadatan penduduk kasar merupakan ukuran persebaran penduduk yang umum digunakan, karena selain data dan cara penghitungannya sederhana, ukuran ini sudah distandarisasi dengan luas wilayah. Angka kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk setiap 1 (satu) kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk, menunjukkan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Selain itu, indikator kepadatan penduduk berguna untuk melihat kerapatan jumlah penduduk dalam satu satuan keruangan. Sedangkan persebaran (distribusi) penduduk adalah kondisi sebaran penduduk menurut keruangan.

Kepadatan penduduk merupakan kondisi yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun, karena perubahan jumlah penduduk di satu wilayah, baik secara alami maupun karena perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lainnya. Indikator kepadatan penduduk berguna untuk melihat kerapatan jumlah penduduk dalam satu satuan keruangan. Sedangkan persebaran (distribusi) penduduk adalah kondisi sebaran penduduk menurut keruangan. Berdasarkan karakteristik sumberdaya, wilayah Kabupaten Sleman terbagi menjadi empat kawasan, salah satunya adalah Kawasan Tengah yaitu wilayah aglomerasi perkotaan Yogyakarta yang meliputi

Kapanewon Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok, dan Gamping. Wilayah ini cepat berkembang, merupakan pusat pendidikan, industri, perdagangan, dan jasa, sehingga tidak mengherankan jika Kapanewon Depok, Mlati, dan Gamping memiliki kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan dengan kapanewon yang lain.

Karakteristik perkembangan wilayah dipengaruhi oleh kepadatan penduduk yakni gambaran densitas penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Selain itu kepadatan juga menunjukkan persebaran penduduk pada setiap bagian wilayah di suatu daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 56/PRP/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang membagi tingkat kepadatan penduduk menjadi 4 kriteria, yaitu:

- (a) Tidak padat, dengan tingkat kepadatan 1-50 jiwa/km²;
- (b) Kurang padat antara 51-250 jiwa/km²;
- (c) Cukup padat 251-400 jiwa/km²; dan
- (d) Sangat padat dengan tingkat kepadatan lebih besar dari 401 jiwa/km².

Kepadatan penduduk pada setiap kapanewon dapat dilihat pada Tabel 4.1 Kepadatan penduduk di Kabupaten Sleman pada tahun 2023 mencapai 1.935,59 jiwa per km² dan wilayah paling padat adalah Kapanewon Depok tercatat sebanyak 3.538,20 jiwa per km². Kapanewon Depok merupakan pusat perkembangan Kabupaten Sleman, karena banyaknya perguruan tinggi di Depok sehingga menjadi daya tarik bagi pendatang. Wilayah terpadat kedua adalah Kapanewon Mlati yang mencapai 3.331,42 jiwa per km² dan ketiga adalah Kapanewon Gamping yang mencapai 3.294,32 jiwa per km². Sementara itu, wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah adalah Kapanewon Cangkringan yang hanya mencapai 673,18 jiwa per km². Untuk melihat lebih detail terkait jumlah penduduk tiap kapanewon beserta tingkat kepadatannya tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
di Kabupaten Sleman Tahun 2023**

No.	Kapanewon	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	Persentase Persebaran Penduduk	Kepadatan Penduduk
1.	Gamping	29,25	96.359	8,66%	3.294,32
2.	Godean	26,84	71.919	6,46%	2.679,55
3.	Moyudan	27,62	33.900	3,05%	1.227,37
4.	Minggir	27,27	32.667	2,94%	1.197,91
5.	Seyegan	26,63	52.632	4,73%	1.976,42
6.	Mlati	28,52	95.012	8,54%	3.331,42
7.	Depok	35,55	125.783	11,31%	3.538,20
8.	Berbah	22,99	57.382	5,16%	2.495,95
9.	Prambanan	41,35	55.215	4,96%	1.335,31
10.	Kalasan	35,84	86.773	7,80%	2.421,12
11.	Ngemplak	35,71	65.499	5,89%	1.834,19
12.	Ngaglik	38,52	102.621	9,22%	2.664,10
13.	Sleman	31,32	71.908	6,46%	2.295,91
14.	Tempel	32,49	55.175	4,96%	1.698,21
15.	Turi	43,09	38.337	3,45%	889,70
16.	Pakem	43,84	39.128	3,52%	892,52
17.	Cangkringan	47,99	32.306	2,90%	673,18
KABUPATEN SLEMAN		574,82	1.112.616	100,00%	1.935,59

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2023

Berdasarkan data pada Tabel 4.1 di atas terlihat bahwa kepadatan penduduk di Kabupaten Sleman tidak merata. Kepadatan penduduk tertinggi ada di wilayah kapanewon yang berada/berbatasan dengan kawasan perkotaan yaitu Kapanewon Depok, Mlati, dan Gamping. Kepadatan rendah terjadi di wilayah kapanewon yang berbatasan dengan Gunung Api Merapi yaitu Kecamatan Turi, Pakem, dan Cangkringan. Apabila dilihat dari luas wilayah, tiga kapanewon tersebut memiliki wilayah terluas, tetapi kepadatan penduduknya justru terendah. Hal tersebut karena tidak semua wilayah di keempat kapanewon tersebut dapat dijadikan tempat hunian akibat letaknya yang berada di lereng Gunung Merapi, terutama Kapanewon

Cangkringan, Pakem, dan Turi. Wilayah tersebut sangat rentan bahaya terkait dengan aktivitas Gunung Merapi yang seharusnya tidak dimanfaatkan sebagai kawasan hunian. Penyebaran penduduk yang kurang merata juga perlu mendapat perhatian. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kepadatan penduduk yang heterogen menimbulkan munculnya berbagai aspek permasalahan yang berakibat pada kebijakan pengembangan wilayah yang berbeda pula. Meskipun demikian, fenomena kepadatan penduduk di kawasan perkotaan cukup tinggi, hal ini disebabkan fungsi Kabupaten Sleman sebagai penyangga Kota Yogyakarta, sebagai daerah tujuan untuk melanjutkan pendidikan, dan daerah pengembangan pemukiman/perumahan.

Padatnya penduduk disuatu wilayah pada batas tertentu akan mengganggu stabilitas kehidupan penduduk di wilayah itu sendiri. Wilayah yang padat akan menimbulkan banyak persoalan tidak saja masalah pemenuhan fasilitas tapi juga masalah keamanan, ekonomi, sosial, politik dan budaya. Sebaliknya kepadatan penduduk yang sangat rendah akan menyulitkan penduduk dalam mengakses fasilitas yang ada karena tempat tinggal penduduk menjadi sangat tersebar sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi relatif lebih mahal.

4.1.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Dibandingkan dengan tahun 2022, jumlah penduduk di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan sebanyak 14.661 jiwa atau sekitar 1,335 persen. Peningkatan jumlah penduduk sangat ditentukan oleh tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi. Peningkatan jumlah penduduk tentu membutuhkan kecukupan dukungan terutama pangan, sandang, dan papan yang lebih besar. Selain itu, kebutuhan sarana prasarana pendidikan, kesehatan, rekreasi dan sebagainya juga perlu diperhatikan. Dalam konteks ini, tidak akan ada masalah bila dukungan lingkungan dan sumber daya alam memadai. Tetapi apabila jumlah penduduk terus bertambah dan sumber daya alam tidak lagi mampu mendukung kehidupannya, maka akan menjadi masalah yang serius bagi penduduk yang bersangkutan. Karena bisa jadi akan terjadi kekurangan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan lainnya yang menyebabkan kualitas kehidupan penduduk tersebut terus

menurun.

Kapanewon dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi ada di Kapanewon Ngemplak, Ngaglik, Kalasan, Seyegan dan Pakem. Sedangkan kanewon dengan laju pertumbuhan penduduk terendah ada di Kecamatan Minggir, Moyudan, Depok, Tempel, dan Depok. Adapun detail laju pertumbuhan di tiap kapanewon dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 2 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Sleman Tahun 2023

No.	Kapanewon	Jumlah Penduduk 2022	Jumlah Penduduk 2023	Laju Pertumbuhan Penduduk
1.	Gamping	95.103	96.359	1,32
2.	Godean	70.898	71.919	1,44
3.	Moyudan	33.684	33.900	0,64
4.	Minggir	32.449	32.667	0,67
5.	Seyegan	51.984	52.632	1,25
6.	Mlati	93.721	95.012	1,38
7.	Depok	124.565	125.783	0,98
8.	Berbah	56.449	57.382	1,65
9.	Prambanan	54.624	55.215	1,08
10.	Kalasan	85.210	86.773	1,83
11.	Ngemplak	64.331	65.499	1,82
12.	Ngaglik	100.780	102.621	1,83
13.	Sleman	70.976	71.908	1,31
14.	Tempel	54.739	55.175	0,80
15.	Turi	37.914	38.337	1,12
16.	Pakem	38.563	39.128	1,47
17.	Cangkringan	31.965	32.306	1,07
Kabupaten Sleman		1.097.955	1.112.616	1,34

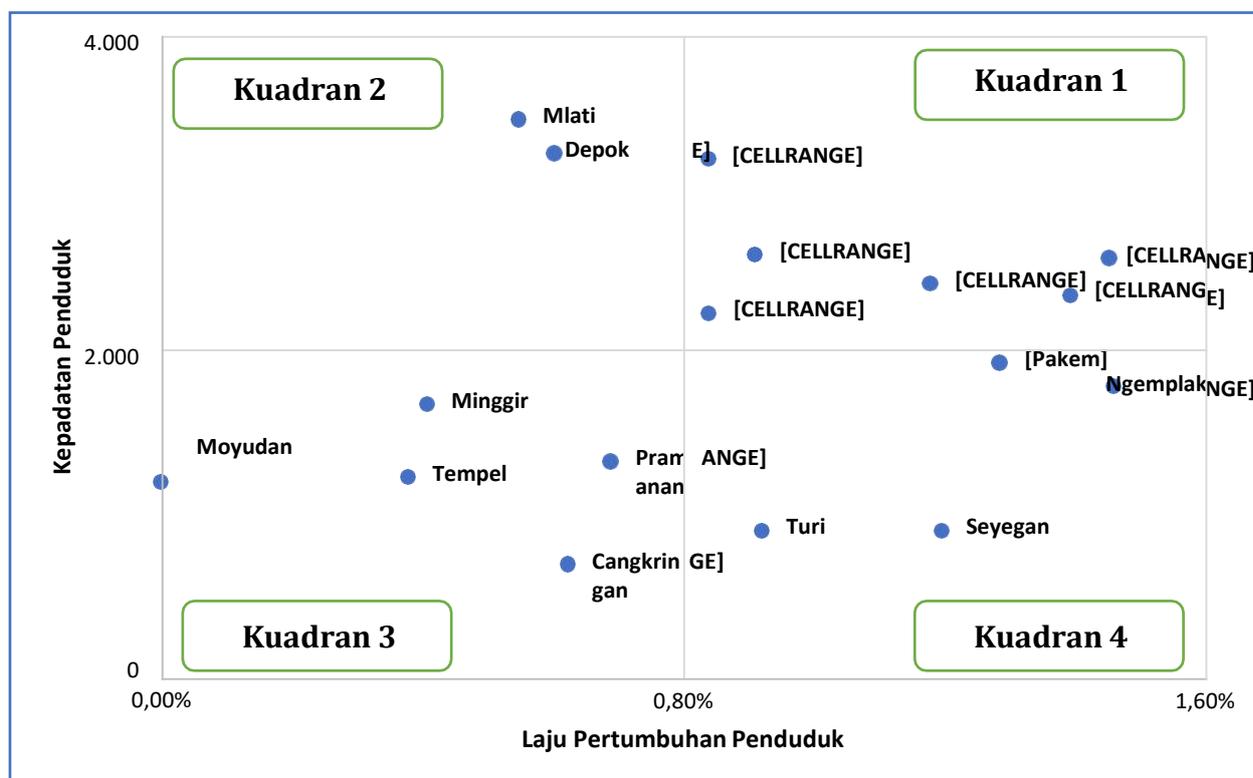
Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2023

Laju pertumbuhan penduduk memiliki hubungan yang sangat erat dengan kondisi ekonomi sebuah wilayah. Pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh daya dorong untuk pertumbuhan ekonomi, bertambahnya penduduk akan memperluas pasar, dan perluasan pasar akan mempertinggi tingkat spesialisasi dalam perekonomian. Sebagai dampak dari spesialisasi yang terjadi, maka tingkat kegiatan ekonomi akan bertambah. Adanya spesialisasi dan pembagian kerja diantara para tenaga kerja

akan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, karena adanya spesialisasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi.

Wilayah di Kabupaten Sleman yang memiliki pertumbuhan penduduk tinggi ternyata sebagian besar ada di wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi pula. Jika dilihat berdasarkan analisis kuadran terlihat bahwa kapanewon dengan laju pertumbuhan penduduk tinggi dan tingkat kepadatan tinggi terdapat enam kapanewon yaitu; Kapanewon Ngaglik, Kalasan, Berbah, Gamping, Godean, dan Sleman. sedangkan kapanewon dengan laju pertumbuhan penduduk rendah dan tingkat kepadatan penduduk tinggi terdapat dua kapanewon yaitu kecamatan Depok dan Mlati.

Kapanewon dengan laju pertumbuhan penduduk rendah dan tingkat kepadatan penduduk rendah terdapat lima kapanewon yaitu; Kapanewon Prambanan, Cangkringan, Moyudan, Tempel, dan Minggir. Kapanewon dengan laju pertumbuhan penduduk tinggi namun dengan tingkat kepadatan penduduk rendah adalah Kapanewon Pakem, Seyegan, Ngemplak dan Turi.



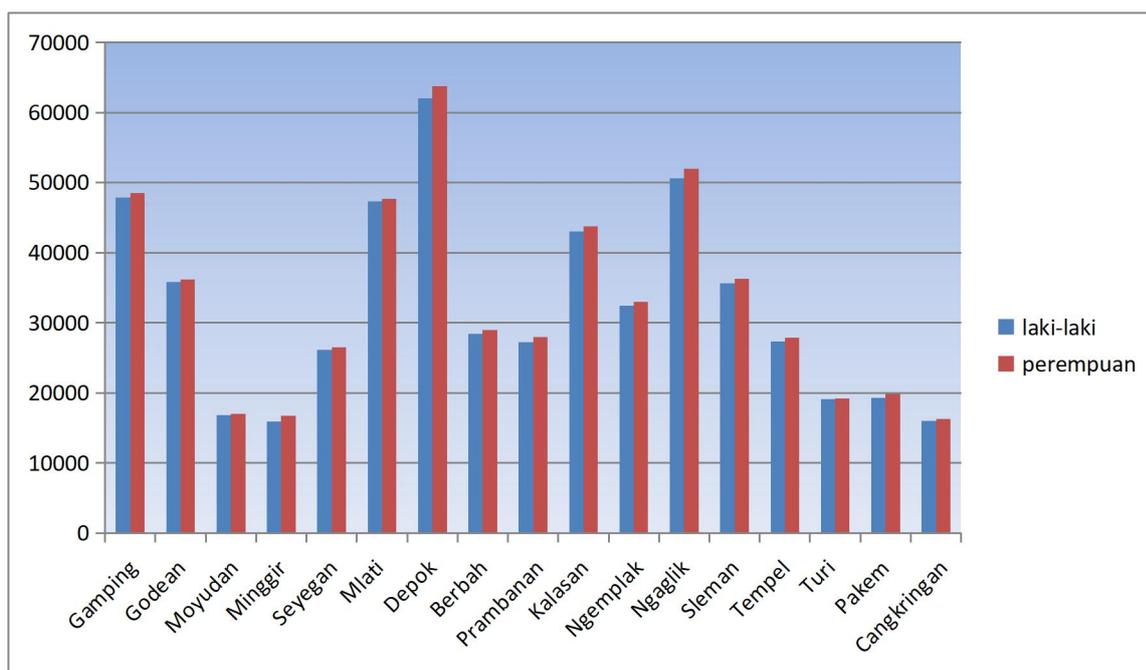
Gambar 4. 1 Analisis Kuadran Antara Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Kepadatan Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2023

Dari analisis kuadran ini terlihat sebuah pola yang cukup menarik. Pada kuadran 1, kecamatan-kecamatan yang masuk pada wilayah tersebut merupakan wilayah-wilayah pertumbuhan yang sangat pesat dengan aktifitas perdagangan dan jasa yang dari sisi akses dekat dengan dekat dengan Yogyakarta sehingga wajar jika diwilayah tersebut bermunculan banyak kompleks perumahan. Pada kuadran 2, justru diwilayah yang banyak terdapat kampus disana. Kondisi ini wajar manakala tingkat pertumbuhan penduduknya rendah tetapi tingkat kepadatan penduduknya sangat tinggi karena banyaknya mahasiswa diwilayah tersebut, sehingga pertumbuhan penduduk dimungkinkan banyak dipengaruhi oleh proses migrasi. Pada kuadran 3 dengan kondisi laju pertumbuhan penduduk rendah dan kepadatan rendah justru banyak diwilayah pertanian. Sedangkan pada kuadran 4 lebih banyak diwilayah yang dekat dengan lereng gunung Merapi.

4.1.3 Karakteristik Penduduk Menurut Kondisi Demografi

4.1.3.1 Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk yang besar dapat membawa keuntungan dan masalah yang rumit bagi suatu daerah. Keuntungan yang dapat diambil adalah apabila penduduk yang banyak tersebut mempunyai kualitas yang baik, sehingga dapat diandalkan menjadi pelaku pembangunan. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar akan menjadi masalah, kalau penduduk tersebut mempunyai kualitas yang rendah dan penyebaran yang tidak merata sehingga menjadi beban pembangunan. Selain jumlah penduduk, komposisi penduduk memegang peranan yang sangat penting dalam upaya untuk menciptakan stabilitas kehidupan dalam masyarakat suatu wilayah. Ukuran yang digunakan dalam komposisi penduduk antara lain struktur umur, rasio dan angka ketergantungan, dan rasio jenis kelamin. Ukuran-ukuran tersebut sering digunakan sebagai alat evaluasi kebijakan program pembangunan, terutama dibidang kependudukan. Komposisi penduduk juga mencerminkan tingkat kemajuan suatu bangsa atau wilayah.



Gambar 4. 2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2023

Komposisi penduduk juga mencerminkan tingkat kemajuan suatu wilayah. Struktur umur penduduk dapat dikategorikan sebagai penduduk ‘muda’, yakni jika penduduk usia 0-14 tahun lebih dari 40 persen. Penduduk dikatakan penduduk ‘tua’ jika yang usia 65 tahun ke atas lebih dari 10 persen dan ‘antara muda dan tua (*intermediate*)’ jika penduduk usia 0-14 tahun kurang dari 40 persen dan penduduk usia 65 tahun ke atas kurang dari 10 persen (Hobbs, 2004). Sebagai contoh, suatu wilayah dikatakan maju bila struktur umur penduduknya sebagian besar berada pada usia produktif (15-64 tahun) atau bentuk piramida penduduknya cenderung pada kelompok umur 15-19 tahun sampai kelompok umur 60-64 tahun. Tabel 4.3 menjelaskan secara rinci bahwa sebanyak 69,39 persen penduduk di Kabupaten Sleman tergolong dalam usia produktif. Usia produktif merupakan usia penduduk yang berada pada rentang usia antara 15 tahun sampai 64 tahun. Pada umur tersebut merupakan usia prima bagi seseorang sehingga dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan dalam kondisi yang terbaik. Di Kabupaten Sleman berdasarkan Data SIAK 2023 diketahui jumlah penduduk dalam kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun) sebanyak

774.245 jiwa (69,59 persen), penduduk usia muda (usia 0-14 tahun) sebanyak 227.370 jiwa (20,44 persen), dan penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) sebanyak 111.001 jiwa (9,98 persen).

Distribusi umur penduduk menggambarkan riwayat mortalitas dan fertilitas serta rata-rata usia penduduk suatu wilayah. Juga merefleksikan beban ketergantungan usia muda atau anak-anak (usia 0-14 tahun), dan beban tanggungan usia tua atau usia lanjut (usia 65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). Informasi tentang jumlah penduduk menurut jenis kelamin penting diketahui untuk mengetahui banyaknya orang yang tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu. Jumlah dan proporsi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat digunakan untuk merencanakan pelayanan sosial ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, sandang, pangan dan papan serta kebutuhan sosial dasar lainnya.

Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk					
		Laki-Laki	Persen	Perempuan	Persen	Jumlah	Persen
1	0-4	33.654	6,11%	31.546	5,62%	65.200	5,86%
2	5-9	39.809	7,23%	37.741	6,72%	77.550	6,97%
3	10-14	43.272	7,85%	41.348	7,36%	84.620	7,61%
4	15-19	40.731	7,39%	38.517	6,86%	79.248	7,12%
5	20-24	41.526	7,54%	39.734	7,07%	81.260	7,30%
6	25-29	40.280	7,31%	39.543	7,04%	79.823	7,17%
7	30-34	38.214	6,94%	38.715	6,89%	76.929	6,91%
8	35-39	37.634	6,83%	38.994	6,94%	76.628	6,89%
9	40-44	44.220	8,03%	44.714	7,96%	88.934	7,99%
10	45-49	41.248	7,49%	42.183	7,51%	83.431	7,50%
11	50-54	39.283	7,13%	40.843	7,27%	80.126	7,20%
12	55-59	33.751	6,13%	36.589	6,51%	70.340	6,32%
13	60-64	27.052	4,91%	30.474	5,43%	57.526	5,17%
14	65-69	21.298	3,87%	23.896	4,25%	45.194	4,06%
15	70-74	13.117	2,38%	14.936	2,66%	28.053	2,52%
16	≥75	15.826	2,87%	21.928	3,90%	37.754	3,39%
KABUPATEN SLEMAN		550.915	100%	561.701	100%	1.112.616	100%

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2023

Pada Tabel 4.3, data SIAK 2023 memperlihatkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Sleman untuk semua jenis kelamin terbanyak adalah pada kelompok umur 40-44 tahun, yaitu sebesar 88.934 jiwa atau 7,99 persen. Jumlah terbanyak kedua adalah kelompok umur 10-14 tahun, yaitu sebesar 84.620 jiwa atau 7,61 persen, dan ketiga terbanyak adalah kelompok umur 45-49 tahun sebanyak 83.431 jiwa atau 7,50 persen.

4.1.3.2 Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan jumlah antara penduduk dengan jenis kelamin laki-laki dengan perempuan (Mantra, 2000). Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan jumlah jenis kelamin perempuan dengan laki-laki baik dalam suatu skala spasial maupun temporal. Rasio jenis kelamin di Kabupaten Sleman pada tahun 2023 sebesar 98,08 yang artinya setiap 100 penduduk berjenis kelamin perempuan terdapat 98 penduduk berjenis kelamin laki-laki.

Semua kapanewon yang ada di Kabupaten Sleman memiliki rasio jenis kelamin di bawah 100. Bahkan di Kapanewon Minggir rasio jenis kelaminnya mencapai 94,93. Jika dilihat menurut kelompok umur terlihat bahwa usia kurang dari 30 tahun jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Sebaliknya, yang berusia 30 tahun keatas lebih banyak penduduk berjenis kelamin perempuan. Dari data ini memperlihatkan bahwa jumlah kelahiran bayi laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan bayi perempuan termasuk mereka yang berusia sekolah. Namun jika dilihat pada rasio jenis kelamin kelompok umur 30-34 tahun angkanya mengalami penurunan yakni menjadi 98. Kondisi ini dapat dijelaskan karena penduduk laki-laki banyak melakukan migrasi keluar Kabupaten Sleman untuk bekerja.

Tabel 4. 4 Rasio Jenis Kelamin menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2023

No.	Kapanewon	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		Laki-Laki	Perempuan	Rasio JenisKelamin
1	GAMPING	47.895	48.464	98,83
2	GODEAN	35.774	36.145	98,97
3	MOYUDAN	16.850	17.050	98,83
4	MINGGIR	15.909	16.758	94,93
5	SEYEGAN	26.114	26.518	98,48
6	MLATI	47.299	47.713	99,13
7	DEPOK	62.018	63.765	97,26
8	BERBAH	28.404	28.978	98,02
9	PRAMBANAN	27.255	27.960	97,48
10	KALASAN	42.994	43.779	98,21
11	NGEMPLAK	32.479	33.020	98,36
12	NGAGLIK	50.634	51.987	97,40
13	SLEMAN	35.606	36.302	98,08
14	TEMPEL	27.293	27.882	97,89
15	TURI	19.132	19.205	99,62
16	PAKEM	19.283	19.845	97,17
17	CANGKRINGAN	15.976	16.330	97,83
KABUPATEN SLEMAN		550.915	561.701	98,08

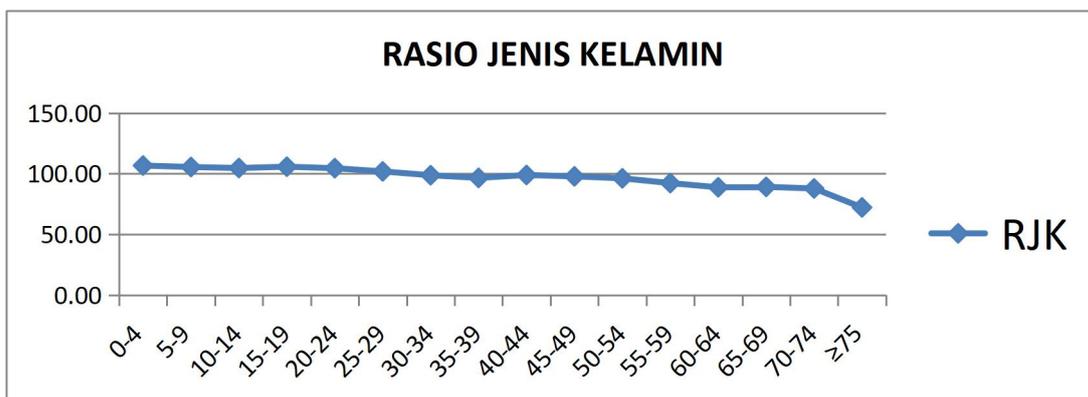
Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2023

Jika dilihat dari trend rasio jenis kelamin mengalami penurunan pada usia lansia yakni pada tahun 60 tahun hingga lebih dari 75 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa harapan hidup pada penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih tinggi dibanding dengan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki. Harapan hidup laki-laki yang rendah dapat dipengaruhi oleh pola hidup yang tidak sehat dibandingkan perempuan. Selain itu, data tersebut juga mengindikasikan bahwa semakin tua kelompok umur semakin banyak pula jumlah janda yang terdapat pada kelompok umur tersebut.

Tabel 4. 5 Rasio Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur Tahun 2023

Jumlah Penduduk				
No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
1	0-4	33.654	31.546	106,68
2	5-9	39.809	37.741	105,48
3	10-14	43.272	41.348	104,65
4	15-19	40.731	38.517	105,75
5	20-24	41.526	39.734	104,51
6	25-29	40.280	39.543	101,86
7	30-34	38.214	38.715	98,71
8	35-39	37.634	38.994	96,51
9	40-44	44.220	44.714	98,90
10	45-49	41.248	42.183	97,78
11	50-54	39.283	40.843	96,18
12	55-59	33.751	36.589	92,24
13	60-64	27.052	30.474	88,77
14	65-69	21.298	23.896	89,13
15	70-74	13.117	14.936	87,82
16	≥75	15.826	21.928	72,17
KABUPATEN SLEMAN		550.915	561.701	98,08

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2023



Gambar 4. 3 Analisis Rasio jenis kelamin menurut Kelompok Umur

4.1.3.3 Umur Median (*Median Age*)

Umur median merupakan salah satu indikator kependudukan yang digunakan untuk mengukur struktur umur penduduk secara cepat, dan sering kali digunakan untuk membandingkan struktur umur penduduk di suatu wilayah apakah relatif lebih “tua” atau “muda”, dengan wilayah lain. Bila umur median disuatu wilayah kurang dari 20 tahun, maka penduduk diwilayah tersebut dikategorikan penduduk muda. Apabila umur mediannya diantara 20 hingga 30 tahun, maka penduduk wilayah tersebut dikategorikan penduduk intermediate, dan bila umur mediannya di atas 30 tahun, maka penduduk wilayah tersebut dikategorikan penduduk “tua”. Umur median adalah umur yang membagi jumlah penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama banyaknya, yaitu bagian yang pertama lebih muda dan bagian yang kedua lebih tua dari umur median. Kegunaan dari umur median adalah untuk mengukur tingkat pemusatan penduduk pada kelompok-kelompok umur tertentu. Dari pengelompokan penduduk menurut umur dapat digambarkan perbedaan umur median antara Kecamatan di Kabupaten Sleman pada tahun 2023. Pada masa mendatang isu tentang penduduk lanjut usia akan menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Sleman karena secara absolut maupun relatif jumlahnya akan semakin meningkat. Jika tidak diantisipasi dari saat ini dengan melahirkan kebijakan kependudukan, utamanya dalam hal penanganan terhadap penduduk lanjut usia, yang akan menjadi masalah di kemudian hari.

Terkait dengan penduduk usia lanjut di Kabupaten Sleman, jumlahnya saat ini cukup besar dan menunjukkan kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data SIAK tahun 2023, proporsi jumlah penduduk lansia di Kabupaten Sleman mencapai 9,98 persen atau sebanyak 111.001 jiwa dari total penduduk Kabupaten Sleman yang mencapai 1.112.616 jiwa. Angka harapan hidup di Kabupaten Sleman mencapai umur 78,09 tahun untuk perempuan dan 73,54 untuk laki-laki.

Tabel 4. 6 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Berdasarkan Data SIAK2023

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk			Komulatif (fx)	Persen Komulatif
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		
1	0-4	33.654	31.546	65.200	65.200	5,86%
2	5-9	39.809	37.741	77.550	142.750	12,83%
3	10-14	43.272	41.348	84.620	227.370	20,44%
4	15-19	40.731	38.517	79.248	306.618	27,56%
5	20-24	41.526	39.734	81.260	387.878	34,86%
6	25-29	40.280	39.543	79.823	467.701	42,04%
7	30-34	38.214	38.715	76.929	544.630	48,95%
8	35-39	37.634	38.994	76.628	621.258	55,84%
9	40-44	44.220	44.714	88.934	710.192	63,83%
10	45-49	41.248	42.183	83.431	793.623	71,33%
11	50-54	39.283	40.843	80.126	873.749	78,53%
12	55-59	33.751	36.589	70.340	944.089	84,85%
13	60-64	27.052	30.474	57.526	1.001.615	90,02%
14	65-69	21.298	23.896	45.194	1.046.809	94,09%
15	70-74	13.117	14.936	28.053	1.074.862	96,61%
16	≥75	15.826	21.928	37.754	1.112.616	100,00%
KABUPATEN SLEMAN		550.915	561.701	1.112.616		

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2023

Menurut wilayah, diketahui jumlah lansia paling banyak ada di Kecamatan Depok yang mencapai 11.783 jiwa atau 10,62 persen dari total penduduk lansia. Berikutnya adalah Kecamatan Ngaglik dengan jumlah lansia mencapai 8.982 jiwa atau 8,48 persen dan Kecamatan Mlati sebanyak 8.309 jiwa atau 7,84 persen. Wilayah dengan jumlah lansia paling rendah adalah Kecamatan Cangkringan yang tercatat sebanyak 3.414 jiwa atau 3,22 persen dari total lansia. Keberadaan lansia perlu diperhatikan dengan sungguh- sungguh agar nantinya tidak menjadi beban bagi dirinya sendiri, keluarga, dan lingkungan. Warga lanjut usia perlu diberdayakan sesuai dengan kemampuannya. Salah satu gagasan yang diwacanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman adalah pembentukan Rumah Bahagia Lansia. Yaitu upaya untuk memberi ruang kepada lansia yang ada di kabupaten Sleman.

Di tempat itu para lansia bisa melakukan berbagai kegiatan yang bersifat pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan. Di Rumah Bahagia, lansia juga diajak aktif secara fisik melalui senam, dan kegiatan lain untuk mengasah mental. Sementara lansia yang telantar, Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengupayakan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) berupa pemberian bantuan dalam bentuk makanan, uang, dan usaha ekonomi produktif.

Tabel 4. 7 Jumlah Penduduk Lansia (Usia >= 65 Tahun) Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Kapanewon Tahun 2023

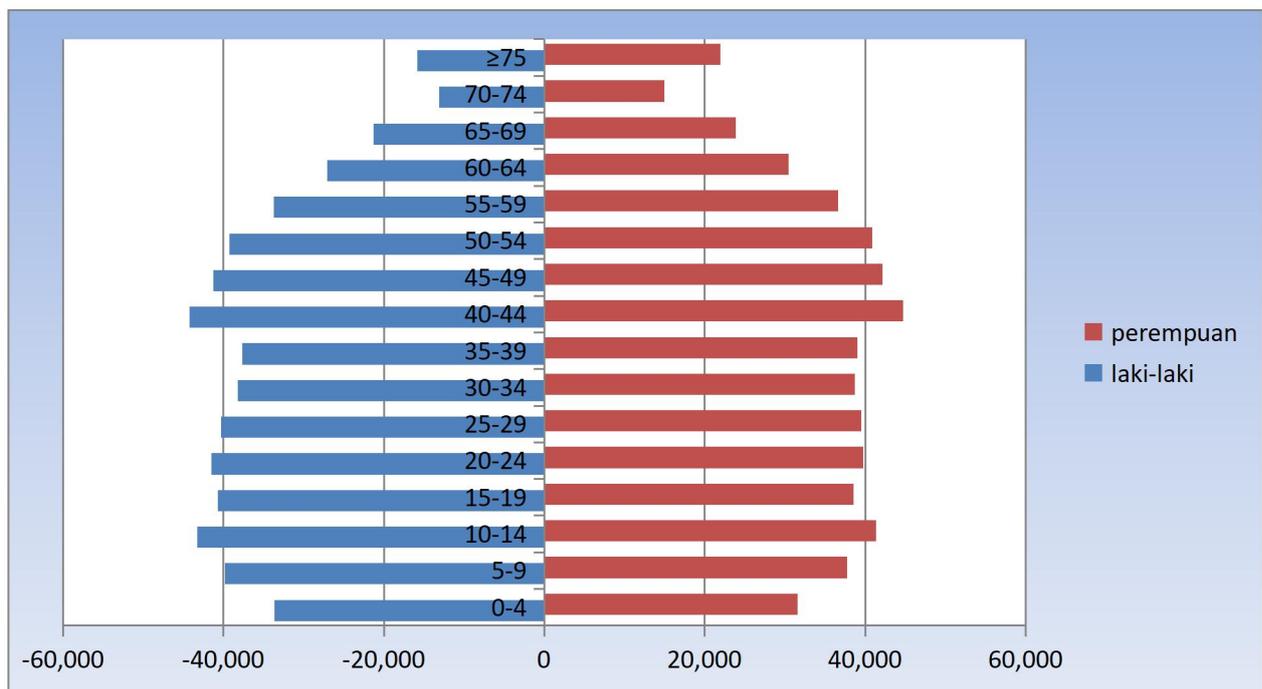
Kapanewon	Kelompok Umur Penduduk Lansia											
	Umur 65 - 69 Tahun			Umur 70 - 74 Tahun			Umur 75 - 79 Tahun			Jumlah Penduduk Lansia		
	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
Gamping	1.891	2.052	3.943	1.102	1.189	2.291	1.050	1.476	2.526	4.043	4.717	8.760
Godean	1.477	1.603	3.080	918	1.034	1.952	1.175	1.459	2.634	3.570	4.096	7.666
Moyudan	811	921	1.732	551	719	1.270	874	1.083	1.957	2.236	2.723	4.959
Minggir	764	864	1.628	510	649	1.159	798	1.149	1.947	2.072	2.662	4.734
Seyegan	1.082	1.199	2.281	653	701	1.354	805	1.104	1.909	2.540	3.004	5.544
Mlati	1.887	2.001	3.888	1.039	1.152	2.191	1.152	1.608	2.760	4.078	4.761	8.839
Depok	2.239	2.704	4.943	1.433	1.666	3.099	1.567	2.174	3.741	5.239	6.544	11.783
Berbah	1.008	1.165	2.173	589	667	1.256	658	960	1.618	2.255	2.792	5.047
Prambanan	1.100	1.187	2.287	667	767	1.434	899	1.249	2.148	2.666	3.203	5.869
Kalasan	1.488	1.682	3.170	870	1.011	1.881	1.073	1.556	2.629	3.431	4.249	7.680
Ngemplak	1.204	1.380	2.584	753	836	1.589	897	1.300	2.197	2.854	3.516	6.370
Ngaglik	1.871	2.130	4.001	1.140	1.241	2.381	1.310	1.829	3.139	4.321	5.200	9.521
Sleman	1.312	1.484	2.796	839	961	1.800	943	1.297	2.240	3.094	3.742	6.836
Tempel	1.103	1.238	2.341	700	736	1.436	821	1.083	1.904	2.624	3.057	5.681
Turi	707	761	1.468	486	547	1.033	611	840	1.451	1.804	2.148	3.952
Pakem	768	834	1.602	459	552	1.011	630	1.006	1.636	1.857	2.392	4.249
Cangkringan	586	691	1.277	408	508	916	563	755	1.318	1.557	1.954	3.511
Kabupaten Sleman	21.298	23.896	45.194	13.117	14.936	28.053	15.826	21.928	37.754	50.241	60.760	111.001

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2023

4.1.3.4 Piramida Penduduk

Distribusi umur penduduk sering memberikan gambaran riwayat mortalitas dan fertilitas serta rata-rata usia penduduk suatu wilayah. Juga merefleksikan beban ketergantungan sekelompok usia tertentu terhadap kelompok lainnya, dalam hal ini beban tanggungan usia muda atau anak-anak (usia 0-14 tahun), dan beban tanggungan tua atau usia lanjut (usia 65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). Informasi tentang jumlah penduduk menurut jenis kelamin penting diketahui, terutama untuk mengetahui banyaknya orang yang tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu. Jumlah dan proporsi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat digunakan untuk merencanakan pelayanan sosial ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, sandang pangan dan papan serta kebutuhan sosial dasar lainnya sesuai dengan kelompok umur penduduk. Untuk lebih menggambarkan dengan jelas komposisi penduduk Kabupaten Sleman menurut struktur umur dan jenis kelamin adalah dengan piramida penduduk. Piramida penduduk menunjukkan distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Juga dapat menunjukkan tingkat perkembangan penduduk untuk setiap kelompok umur yang berbeda. Fluktuasi dalam piramida penduduk paling banyak dipengaruhi tingkat kelahiran setiap kelompok umur selain tingkat kematian dan perpindahan. Piramida penduduk biasanya digunakan untuk menggambarkan tingkat kemajuan suatu negara atau wilayah. Dengan melihat piramida penduduk, dapat diketahui struktur penduduk suatu wilayah apakah termasuk dalam struktur penduduk muda, dewasa, dan tua. Dalam menyusun berbagai macam kebijakan bidang kependudukan, sosial, budaya, dan ekonomi, struktur penduduk tersebut menjadi salah satu dasarnya. Pada suatu negara berkembang misalnya, biasanya bentuk piramida penduduknya berbentuk kerucut. Dimana fertilitas dan mortalitasnya tinggi, sehingga proporsi penduduk usia 0-4 tahun sangat tinggi, kemudian secara kontinyu mengecil pada kelompok umur di atasnya. Sebaliknya yang terjadi pada negara-negara maju yang tingkat kesejahteraan penduduknya lebih baik, memiliki bentuk piramida hampir menyerupai bentuk tabung atau mulai mengecil pada kelompok umur muda sampai 0-4 tahun. Bentuk ini berarti angka fertilitas dan mortalitasnya sangat kecil,

sedangkan penduduk usia kerjanya besar. Dengan demikian tingkat kesejahteraan penduduknya sangat baik, karena beban ketergantungan penduduknya sangat kecil.



Gambar 4. 4 Piramida Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2023

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2023

Gambaran struktur penduduk di Kabupaten Sleman juga dapat dilihat melalui piramida penduduk yaitu Gambar 4.4 yang menyajikan data penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Bentuk piramida penduduk Kabupaten Sleman adalah piramida penduduk muda (ekspansif), didominasi oleh penduduk kelompok umur produktif serta anak-anak. Bentuk piramida ekspansif dapat diartikan bahwa terdapat angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah sehingga terdapat banyak penduduk yang berumur muda. Namun, terdapat kecenderungan angka kelahiran di Kabupaten Sleman mulai menurun terlihat dari jumlah penduduk kelompok umur 0-4 lebih rendah daripada kelompok umur muda di atasnya.

Kondisi banyaknya penduduk muda ini sering juga dikaitkan dengan fenomena bonus demografi, yang mana bonus demografi itu terjadi saat proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih dari 50 persen dari total populasi berpotensi untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Indonesia diprediksi akan

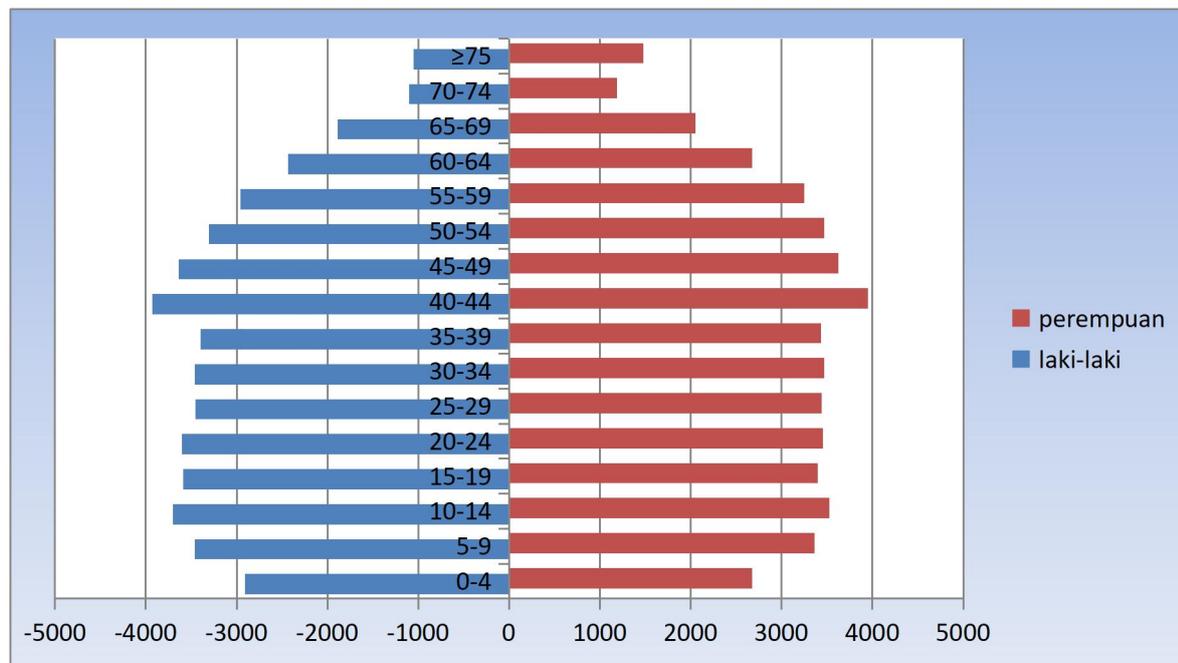
mendapatkan bonus demografi pada tahun 2025-2035 (BKKBN, 2014), sementara itu Kabupaten Sleman saat ini sudah berada pada kondisi tersebut karena jumlah penduduk usia produktif sudah berkisar di angka lebih dari 50 persen dari total populasi. Kondisi ini tentu perlu dikelola secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Sleman melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimulai dari usia dini melalui berbagai program dan kegiatan terkait secara menyeluruh. Berdasarkan data tahun 2023, penduduk Kabupaten Sleman didominasi oleh kelompok umur 40-49 tahun, kelompok produktif yang pada umumnya merupakan keluarga muda yang memiliki anak usia sekolah. Terlihat pula bahwa besaran jumlah penduduk terjadi pada usia 10-14 tahun, yaitu penduduk berusia sekolah. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pendidikan sejak usia dini perlu mendapatkan perhatian lebih besar sehingga diharapkan menjadi tulang punggung pelaksana pembangunan yang berkualitas di masa-masa yang akan datang. Selain itu, terdapat potensi peningkatan jumlah penduduk usia lansia pada 5-10 tahun mendatang, yang menjadi beban bagi penduduk usia produktif.

Permasalahan pada masa mendatang di Kabupaten Sleman adalah semakin banyaknya jumlah penduduk lanjut usia. Hal ini harus diantisipasi pemerintah melalui berbagai kebijakan terkait dengan penduduk lanjut usia. Meskipun penduduk Kabupaten Sleman saat ini didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun. Proporsi penduduk usia produktif di Kabupaten Sleman tahun 2023 mencapai 69,59 persen atau 774.245 jiwa. Sedangkan penduduk termasuk dalam kategori lanjut usia (65 tahun keatas) mencapai 111.001 jiwa atau 9,98 persen dari total penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif jumlahnya sangat besar sehingga Kabupaten Sleman memiliki potensi yang besar dalam pemanfaatannya.

a) Piramida Penduduk Kapanewon Gamping

Penduduk Kapanewon Gamping tahun 2023 mencapai 96.359 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 67.959 jiwa atau 70,53 persen. Sementara jumlah penduduk usia non- produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun

ke atas mencapai jumlah 28.400 jiwa atau 29,47 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kapanewon Gamping mengalami penurunan.



Gambar 4. 5 Piramida Penduduk Kapanewon Gamping Tahun 2023

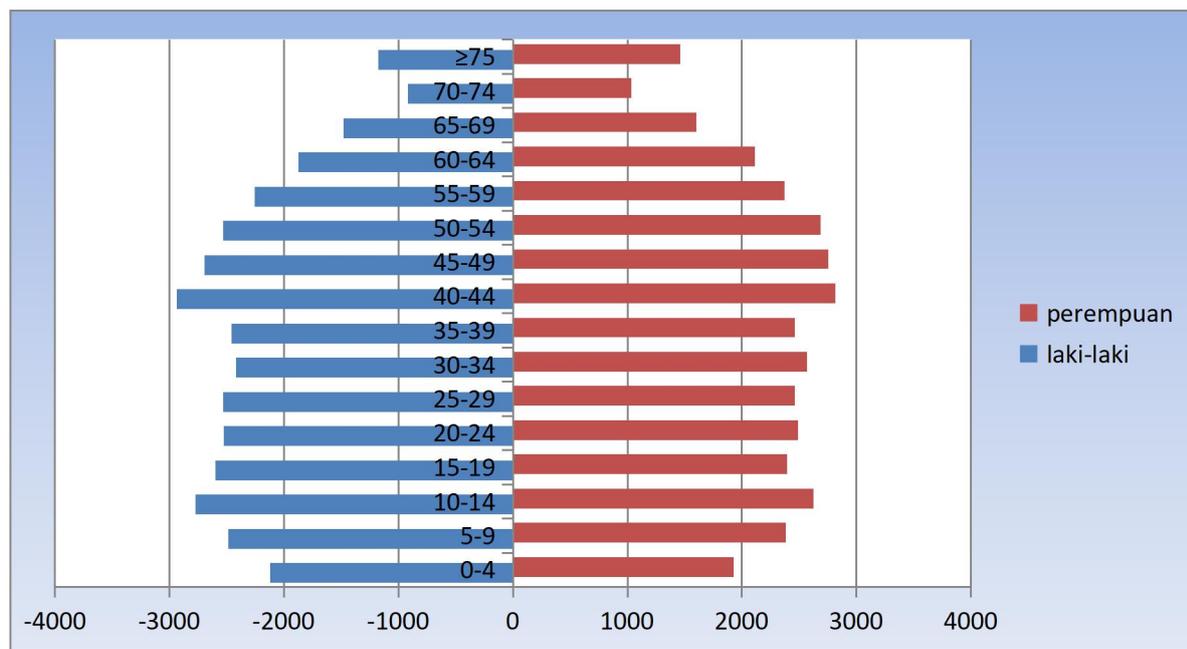
Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2023

Piramida Kapanewon Gamping (Gambar 4.5) juga menunjukkan bahwa penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 40-44 tahun yang mencapai 7.883 jiwa (8,18 persen). Di bawahnya adalah kelompok usia 45-49 tahun yang mencapai 7.262 (7,54 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kecamatan Gamping mencapai 8.760 jiwa atau 9,09 persen, lebih rendah daripada angka Kabupaten Sleman yang mencapai 9,98 persen.

b) Piramida Penduduk Kapanewon Godean

Penduduk Kapanewon Godean tahun 2023 mencapai 71.919 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 49.940 jiwa atau 69,44 persen. Sementara jumlah penduduk

usia non- produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 21.979 jiwa atau 30,56 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kapanewon Godean mengalami penurunan.



Gambar 4. 6 Piramida Penduduk Kapanewon Godean Tahun 2023

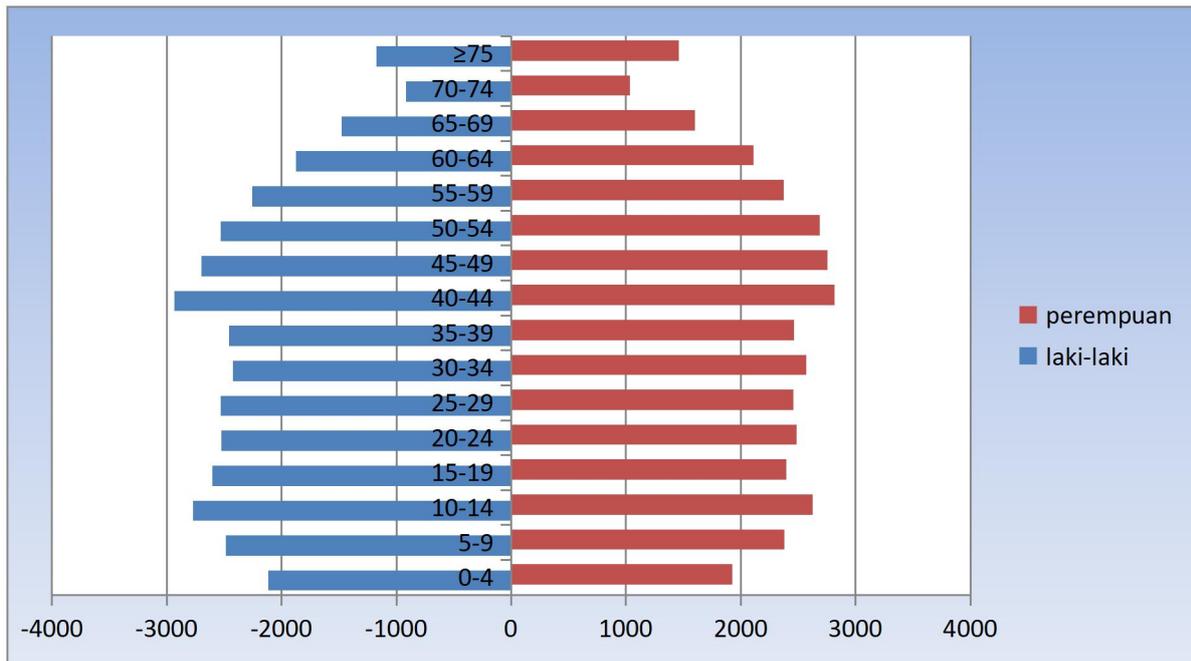
Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2023

Piramida Kapanewon Godean (Gambar 4.6) juga menunjukkan bahwa penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 40-44 tahun mencapai 5.754 (8,00 persen). Selanjutnya adalah kelompok usia 45-49 tahun yang mencapai 5.452 atau 7,58 persen. Saat ini jumlah penduduk lansia di Kapanewon Godean mencapai 7.666 jiwa atau 10,66 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 9,98 persen.

c) Piramida Penduduk Kapanewon Moyudan

Penduduk Kapanewon Moyudan tahun 2023 mencapai 33.900 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang

jumlahnya mencapai 22.787 jiwa atau 67,22 persen. Sementara jumlah penduduk usia non- produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 11.113 jiwa atau 32,78 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, mengindikasikan tingkat fertilitas di Kapanewon Moyudan menurun.



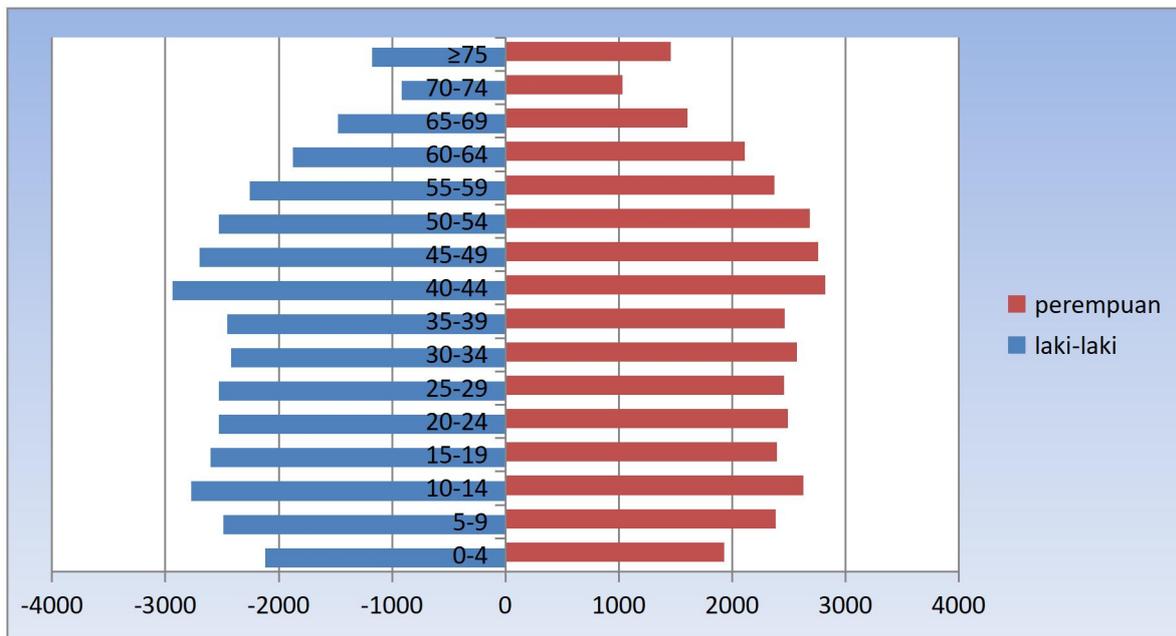
Gambar 4.7 Piramida Penduduk Kapanewon Moyudan Tahun 2023

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2023

Piramida Kapanewon Moyudan (Gambar 4.7) juga menunjukkan bahwa penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 45-49 tahun yang mencapai 2.585 jiwa (7,63 persen). Selanjutnya penduduk kelompok usia 40-44 tahun sejumlah 2.575 (7,60 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kapanewon Moyudan mencapai 4.959 jiwa atau 14,63 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan proporsi lansia Kabupaten Sleman yaitu 9,98 persen.

d) Piramida Penduduk Kapanewon Minggir

Penduduk Kapanewon Minggir tahun 2023 mencapai 32.667 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 21.980 jiwa atau 67,29 persen. Sementara jumlah penduduk usia non- produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 10.687 jiwa atau 32,71 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kapanewon Minggir menurun.



Gambar 4.8 Piramida Penduduk Kapanewon Minggir Tahun 2023

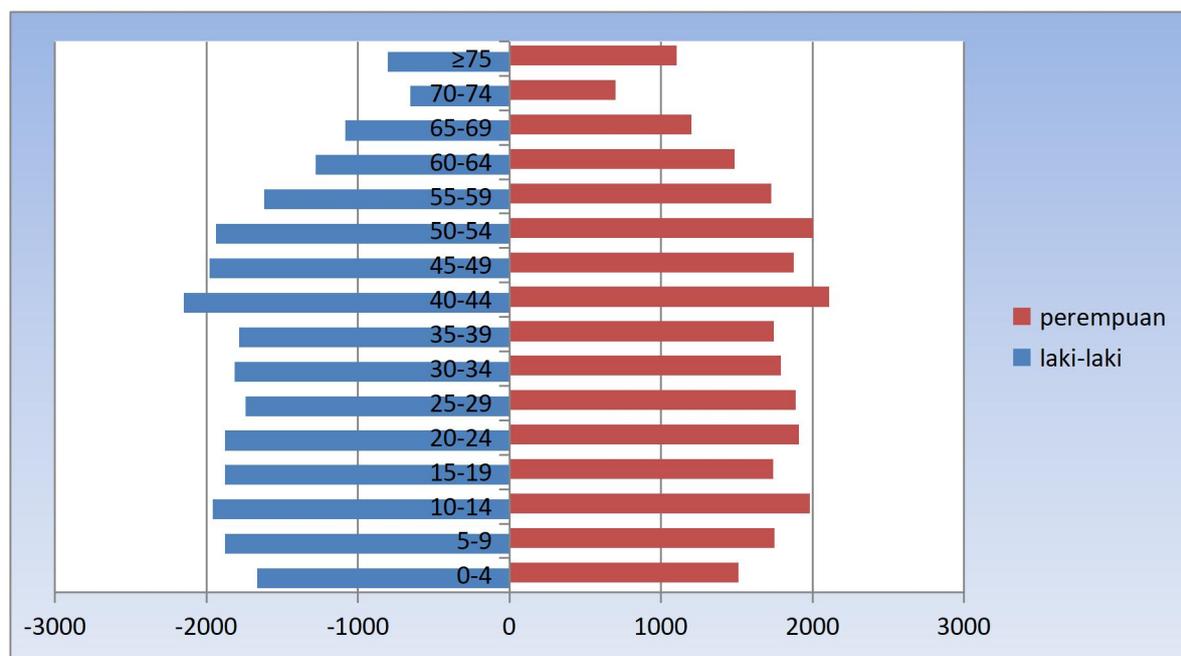
Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2023

Piramida Kapanewon Minggir (Gambar 4.8) juga menunjukkan bahwa penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 45-49 tahun yang mencapai 2.487 jiwa (7,61 persen). Selanjutnya adalah kelompok usia 40-44 tahun sejumlah 2.437 (7,46 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kapanewon Minggir mencapai 4.734 jiwa atau 14,49 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan

dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 9,98 persen.

e) Piramida Penduduk Kapanewon Seyegan

Penduduk Kapanewon Seyegan tahun 2023 mencapai 52.623 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 36.350 jiwa atau 69,06 persen. Sementara jumlah penduduk usia non- produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 16.282 jiwa atau 30,94 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kapanewon Seyegan menurun.



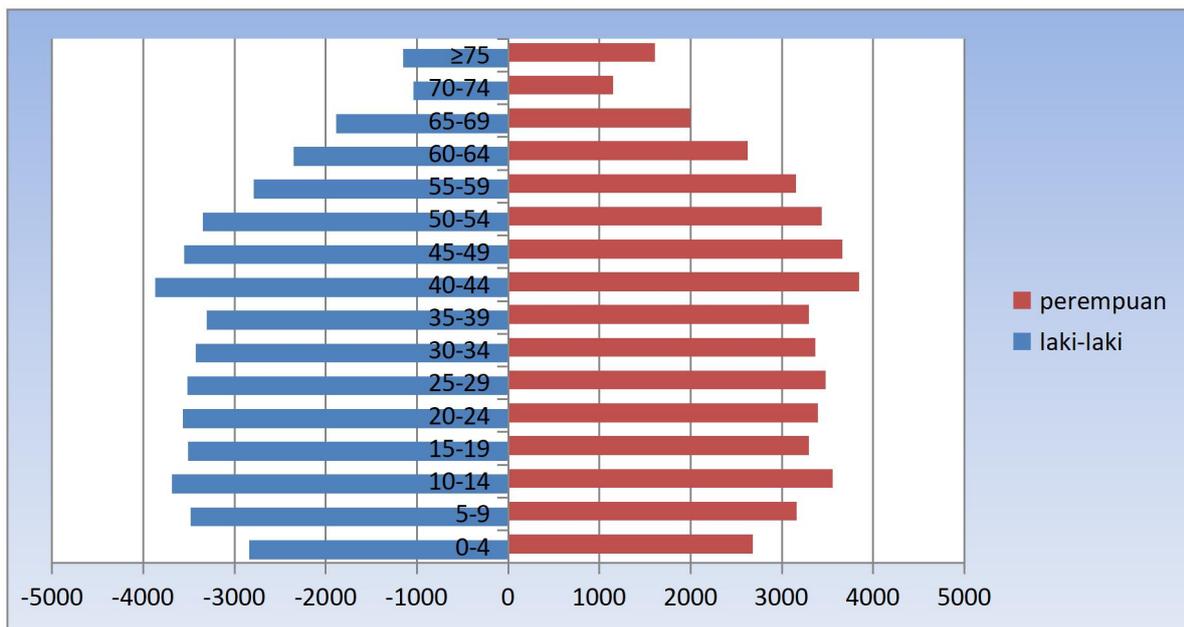
Gambar 4. 9 Piramida Penduduk Kapanewon Seyegan Tahun 2023

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2023

Piramida Kapanewon Seyegan (Gambar 4.9) juga menunjukkan bahwa penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 40-44 tahun yang mencapai 4.261 jiwa (8,10 persen). Selanjutnya kelompok usia 50-54 tahun sejumlah 3.943 (7,49 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kapanewon Seyegan mencapai 5.544 jiwa atau 10,5315 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 9,98 persen.

f) Piramida Penduduk Kapanewon Mlati

Penduduk Kapanewon Mlati tahun 2023 mencapai 95.012 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 66.779 jiwa atau 70,28 persen. Jumlah penduduk usia non- produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 28.233 jiwa atau 29,72 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kecamatan Mlati menurun.



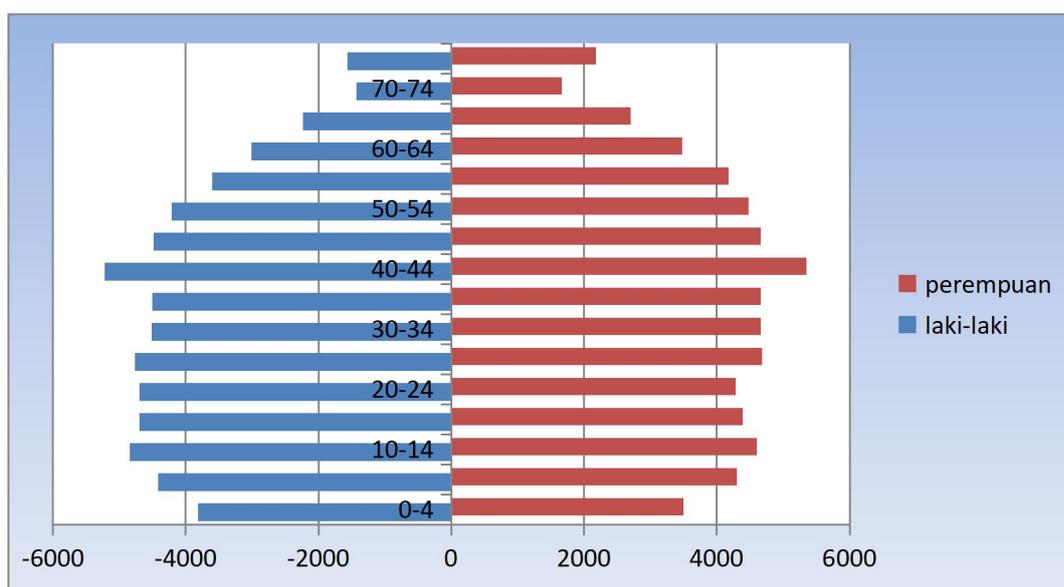
Gambar 4. 10 Piramida Penduduk Kapanewon Mlati Tahun 2023

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2023

Piramida Kapanewon Mlati (Gambar 4.10) juga menunjukkan bahwa penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 40-44 tahun yang mencapai 7.714 jiwa (8,12 persen). Selanjutnya kelompok usia non- produktif 10-14 tahun yang mencapai 7.239 jiwa (7,62 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kapanewon Mlati mencapai 8.839 jiwa atau 9,30 persen, lebih rendah dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 9,98 persen.

g) Piramida Penduduk Kapanewon Depok

Penduduk Kapanewon Depok tahun 2023 mencapai 125.783 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 88.530 jiwa atau 70,38 persen. Sementara jumlah penduduk usia non- produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 37.253 jiwa atau 29,62 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Depok menurun.



Gambar 4. 11 Piramida Penduduk Kapanewon Depok Tahun 2023

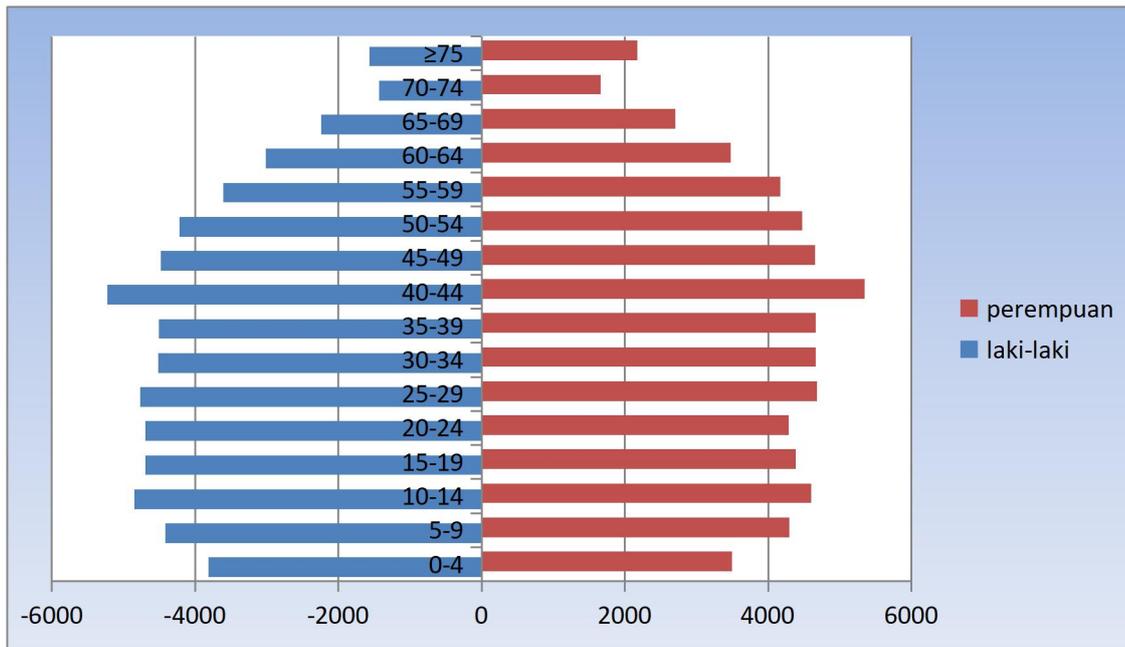
Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2023

Piramida Kapanewon Depok (Gambar 4.11) juga menunjukkan bahwa penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 40-44 tahun yang mencapai 10.573 jiwa (8,41 persen). Selanjutnya penduduk usia 10-14 tahun sejumlah 9.447 jiwa (7,51 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kapanewon Depok mencapai 11.783 jiwa atau 9,37 persen, lebih rendah dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 9,98 persen.

h) Piramida Penduduk Kapanewon Berbah

Penduduk Kapanewon Berbah tahun 2023 mencapai 57.382 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 40.354 jiwa atau 70,33 persen. Sementara jumlah penduduk usia non- produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 17.028 jiwa atau 29,67 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kapanewon Berbah mengalami penurunan.

Piramida Kapanewon Berbah (Gambar 4.12) juga menunjukkan bahwa penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 40-44 tahun yang mencapai 4.659 jiwa (8,12 persen). Selanjutnya penduduk kelompok usia non- produktif 10-14 tahun sejumlah 4.529 jiwa (7,89 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kapanewon Berbah mencapai 5.047 jiwa atau 8,79 persen, lebih rendah dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 9,98 persen.



Gambar 4. 12 Piramida Penduduk Kapanewon Berbah Tahun 2023

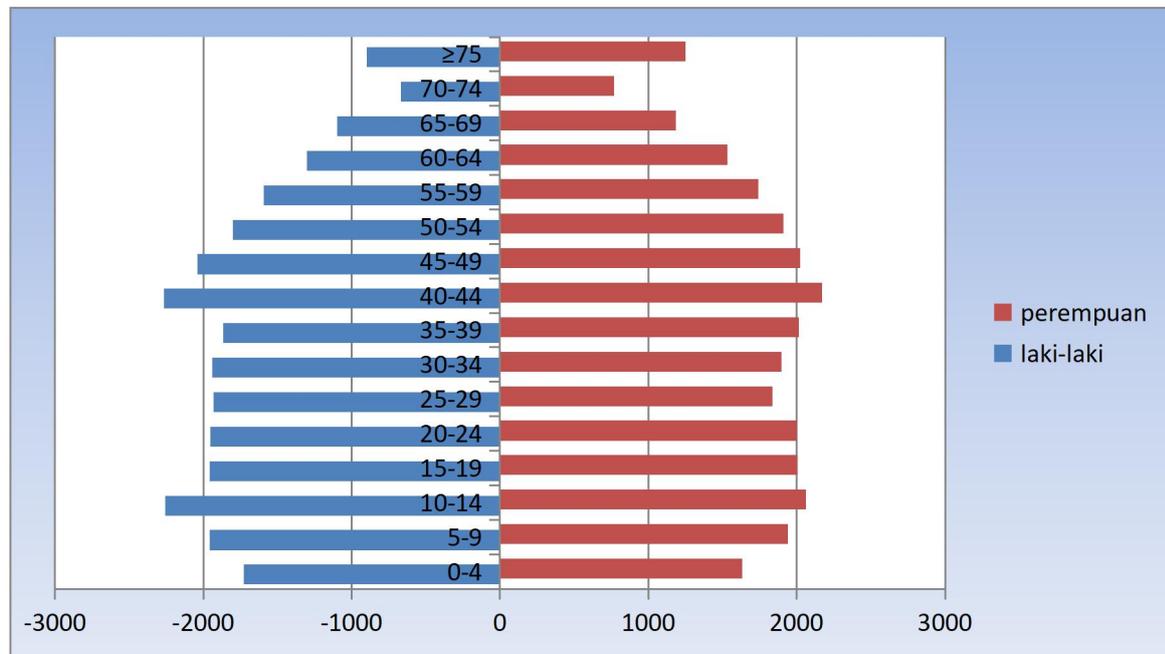
Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2023

i) Piramida Penduduk Kapanewon Prambanan

Penduduk Kapanewon Prambanan tahun 2023 mencapai 55.215 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 37.771 jiwa atau 68,41 persen. Sementara jumlah penduduk usia non- produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 17.444 jiwa atau 31,59 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kapanewon Prambanan mengalami penurunan.

Piramida Kapanewon Prambanan (Gambar 4.13) juga menunjukkan bahwa penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 40-44 tahun yang mencapai 4.439 jiwa (8,04 persen). Selanjutnya penduduk kelompok usia non-produktif 10-14 tahun mencapai 4.318 (7,82 persen).

Saat ini jumlah penduduk lansia di Kecamatan Prambanan mencapai 5.869 jiwa atau 10,63 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 9,98 persen.

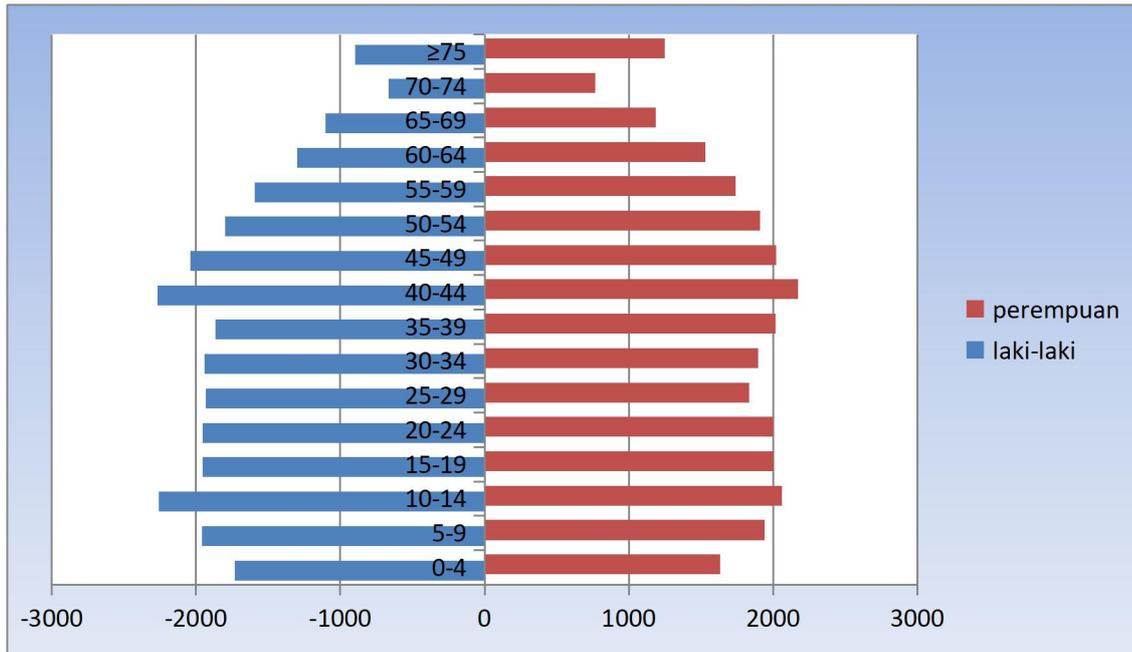


Gambar 4. 13. Piramida Penduduk Kapanewon Prambanan Tahun 2023

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2023

j) Piramida Penduduk Kapanewon Kalasan

Penduduk Kapanewon Kalasan tahun 2023 mencapai 86.773 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 61.045 jiwa atau 70,35 persen. Sementara jumlah penduduk usia non- produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 25.728 jiwa atau 29,65 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kapanewon Kalasan mengalami penurunan.



Gambar 4. 14 Piramida Penduduk Kapanewon Kalasan Tahun 2023

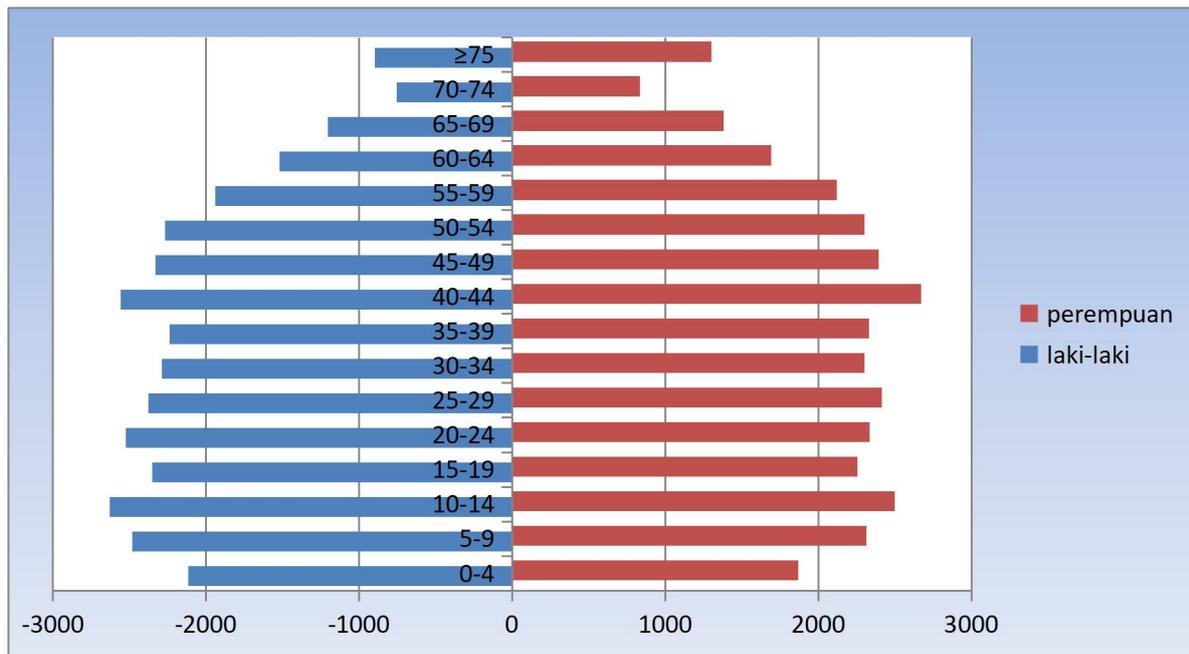
Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2023

Piramida Kapanewon Kalasan (Gambar 4.14) juga menunjukkan bahwa penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 40-44 tahun yang mencapai 7.115 jiwa (8,20 persen). Selanjutnya kelompok usia non-produktif 10-14 tahun yang mencapai 6.732 (7,76 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kapanewon Kalasan mencapai 7.680 jiwa atau 8,85 persen, lebih rendah dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 9,98 persen.

k) Piramida Penduduk Kapanewon Ngemplak

Penduduk Kapanewon Ngemplak tahun 2023 mencapai 65.499 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 45.216 jiwa atau 69,03 persen. Sementara jumlah penduduk usia non-

produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 20.283 jiwa atau 30,97 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kapanewon Ngemplak mengalami penurunan.



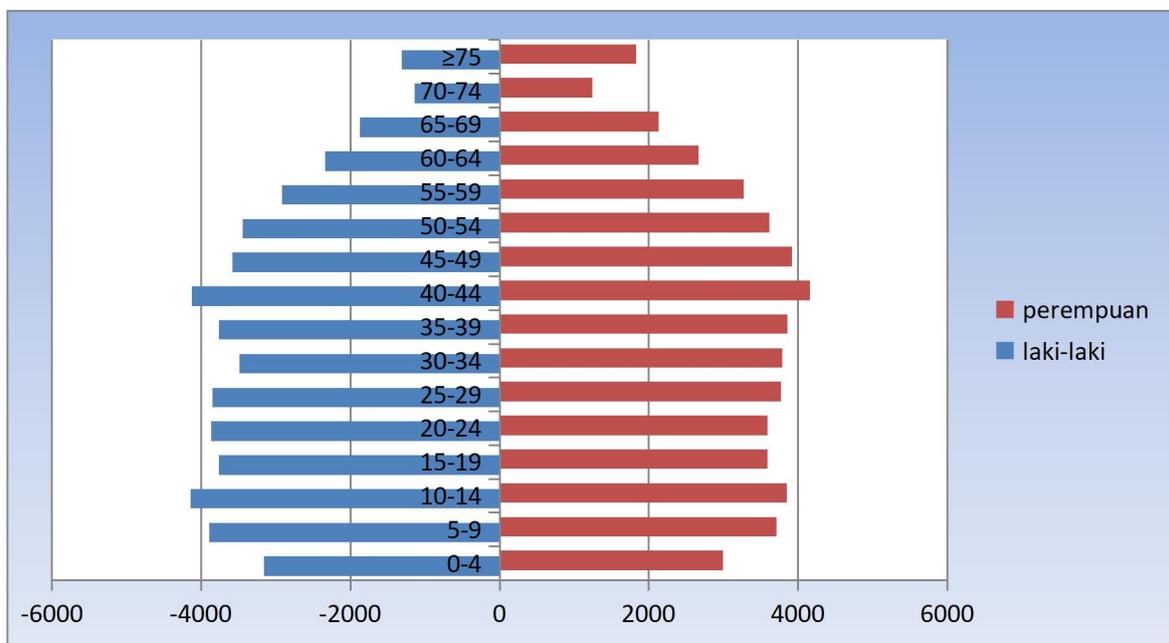
Gambar 4. 15. Piramida Penduduk Kapanewon Ngemplak Tahun 2023

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2023

Piramida Kapanewon Ngemplak (Gambar 4.15) juga menunjukkan bahwa penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 40-44 tahun yang mencapai 5.230 jiwa (7,98 persen). Selanjutnya kelompok usia non-produktif 10-14 tahun yang mencapai 5.129 jiwa (7,83 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kapanewon Ngemplak mencapai 6.370 jiwa atau 9,93 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 9,98 persen.

I) Piramida Penduduk Kapanewon Ngaglik

Penduduk Kapanewon Ngaglik tahun 2023 mencapai 102.621 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 71.355 jiwa atau 69,53 persen. Sementara jumlah penduduk usia non- produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 31.266 jiwa atau 30,47 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kapanewon Ngaglik mengalami penurunan.



Gambar 4. 16 Piramida Penduduk Kapanewon Ngaglik Tahun 2023

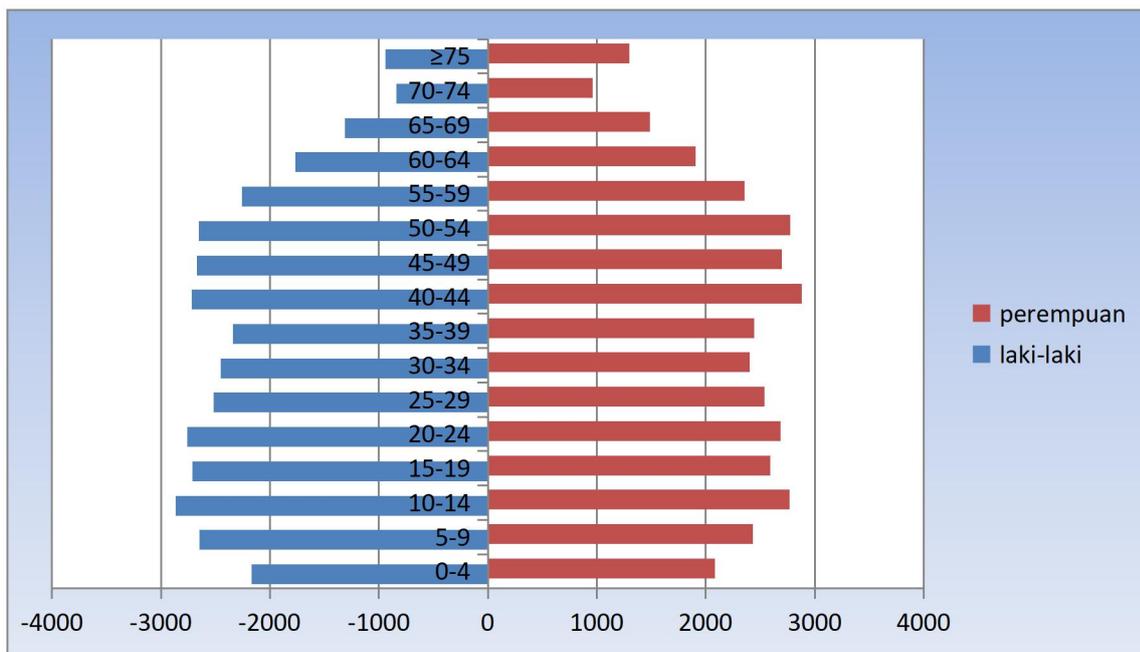
Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2023

Piramida Kapanewon Ngaglik (Gambar 4.16) juga menunjukkan bahwa penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 40-44 tahun yang mencapai 8.286 jiwa (8,07 persen). Selanjutnya kelompok usia non-produktif 10-14 tahun sejumlah 7.986 jiwa (7,78 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kapanewon Ngaglik mencapai 9.521 jiwa atau 9,28 persen, lebih rendah

dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 9,98 persen.

m) Piramida Penduduk Kapanewon Sleman

Penduduk Kapanewon Sleman tahun 2023 mencapai 71.908 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 50.109 jiwa atau 69,68 persen. Sementara jumlah penduduk usia non- produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 21.799 jiwa atau 30,32 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kapanewon Sleman mengalami penurunan.



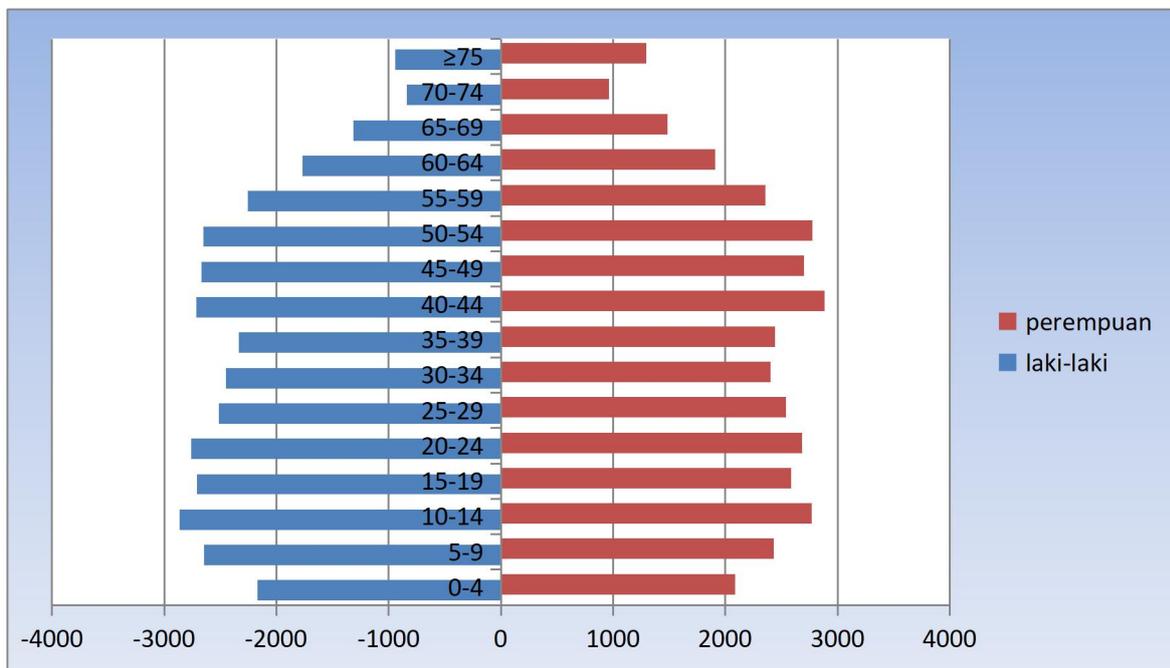
Gambar 4. 17 Piramida Penduduk Kapanewon Sleman Tahun 2023

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2023

Piramida Kapanewon Sleman (Gambar 4.17) juga menunjukkan bahwa penduduk didominasi oleh penduduk usia 10-14 tahun sejumlah 5.633 (7,83 persen). Selanjutnya kelompok usia 40-44 tahun sejumlah 5.597 (7,78 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kapanewon Sleman mencapai 6.836 jiwa atau 9,51 persen, angkanya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 9,98 persen.

n) Piramida Penduduk Kapanewon Tempel

Penduduk Kapanewon Tempel tahun 2023 mencapai 55.175 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 38.376 jiwa atau 69,55 persen. Sementara jumlah penduduk usia non- produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 16.799 jiwa atau 30,45 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kapanewon Tempel menurun.



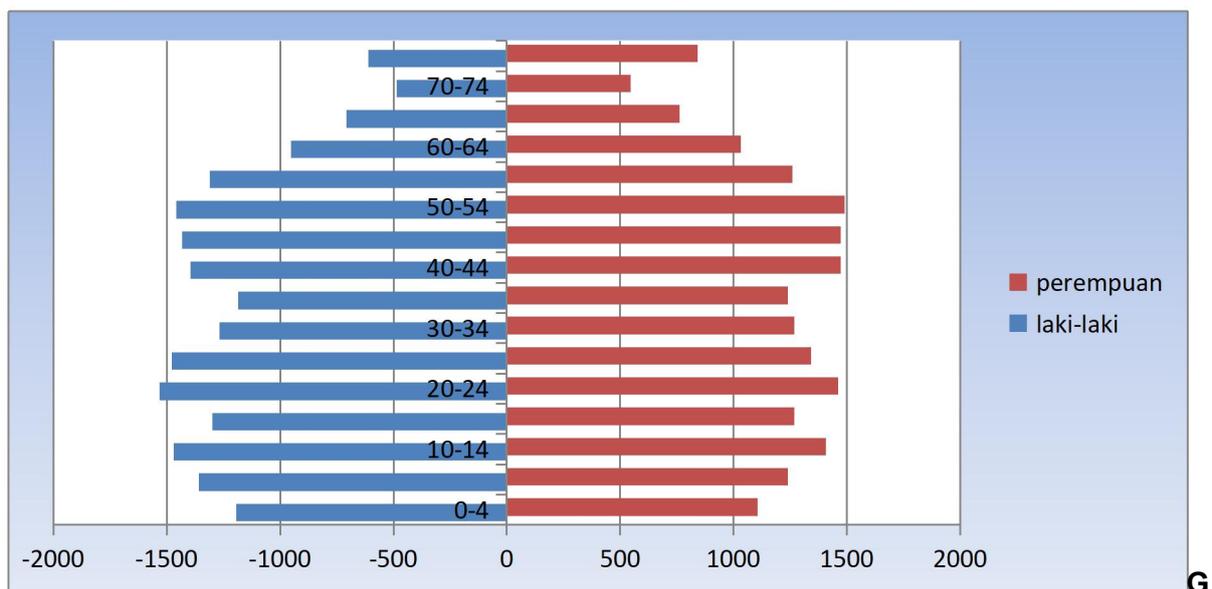
Gambar 4. 18 Piramida Penduduk Kapanewon Tempel Tahun 2023

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2023
 Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sleman Tahun 2023

Piramida Kapanewon Tempel (Gambar 4.18) juga menunjukkan bahwa penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 50-54 tahun yang mencapai 4.309 jiwa (7,81 persen). Selanjutnya penduduk kelompok usia non-produktif 10-14 tahun mencapai 4.198 jiwa (7,61 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kapanewon Tempel mencapai 5.681 jiwa atau 9,94 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 9,98 persen.

o) Piramida Penduduk Kapanewon Turi

Penduduk Kapanewon Turi tahun 2023 mencapai 37.914 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 26.611 jiwa atau 69,41 persen. Sementara jumlah penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 11.726 jiwa atau 30,59 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitasnya menurun.



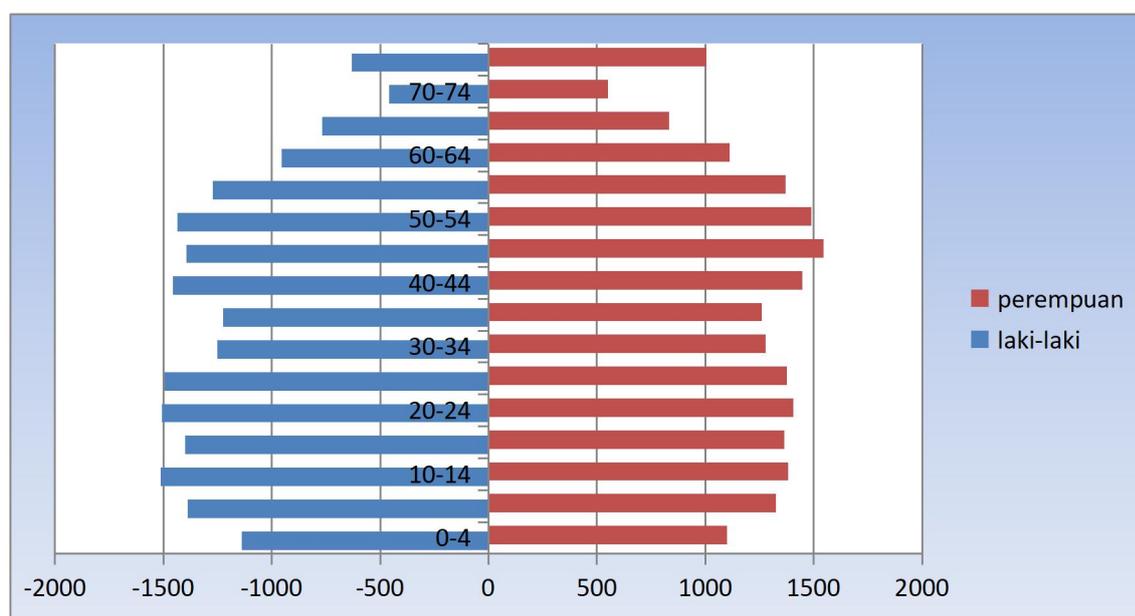
Gambar 4. 19 Piramida Penduduk Kapanewon Turi Tahun 2023

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2023

Piramida Kapanewon Turi (Gambar 4.19) juga menunjukkan bahwa penduduk Kapanewon Turi didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 20-24 yang mencapai 2.992 (7,80 persen). Selanjutnya penduduk kelompok usia 50-54 tahun yang mencapai 2.946 jiwa (7,68 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kapanewon Turi mencapai 3.952 jiwa atau 10,31 persen, angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 9,98 persen.

p) Piramida Penduduk Kapanewon Pakem

Penduduk Kapanewon Pakem tahun 2023 mencapai 39.128 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 27.033 jiwa atau 69,09 persen. Sementara jumlah penduduk usia non- produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 12.095 jiwa atau 30,91 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kapanewon Pakem menurun.



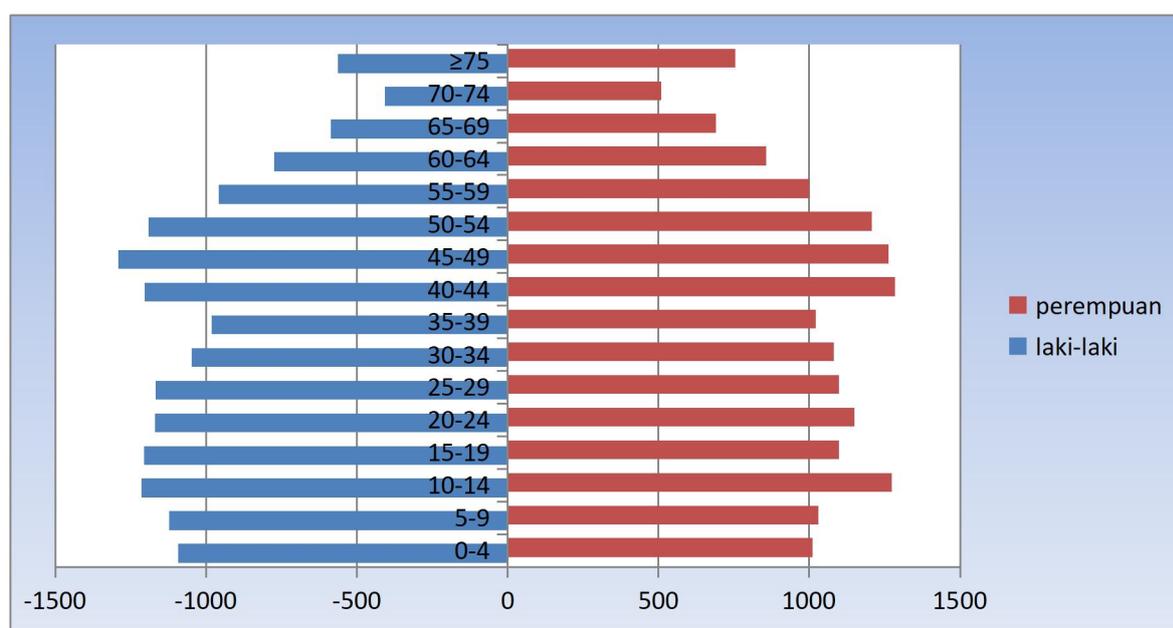
Gambar 4. 20 Piramida Penduduk Kapanewon Pakem Tahun 2023

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2023

Piramida Kapanewon Pakem (Gambar 4.20) juga menunjukkan bahwa penduduk Kapanewon Pakem didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 45-49 tahun yang mencapai 2.938 jiwa (7,51 persen). Selanjutnya penduduk kelompok usia 50-54 tahun mencapai 2.925 jiwa (7,48 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kapanewon Pakem mencapai 4.249 jiwa atau 10,86 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yaitu 9,98 persen.

q) Piramida Penduduk Kapanewon Cangkringan

Penduduk Kapanewon Cangkringan tahun 2023 mencapai 32.306 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 22.050 jiwa atau 68,25 persen. Sementara jumlah penduduk usia non- produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 10.256 jiwa atau 31,75 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kapanewon Cangkringan menurun.



Gambar 4. 21 Piramida Penduduk Kapanewon Cangkringan Tahun 2023

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2023

Piramida Kapanewon Cangkringan (Gambar 4.21) juga menunjukkan bahwa penduduk Kapanewon Cangkringan didominasi oleh penduduk usia non produktif terutama pada kelompok usia 40-44 tahun yang mencapai 2.528 jiwa (7,91 persen). Selanjutnya penduduk kelompok usia 45-49 tahun mencapai 2.502 (7,83 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kecamatan Cangkringan mencapai 3.414 jiwa atau 10,68 persen, angkanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 9,65 persen.

4.1.3.5 Rasio Ketergantungan

Angka rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator kependudukan lainnya yang menunjukkan terjadinya perubahan struktur penduduk menurut umur. Perubahan dimaksud adalah terjadinya pergeseran angka rasio antara penduduk yang non produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap penduduk yang produktif (usia 15-64 tahun). Secara fungsional, indikator ini dari tahun ke tahun cenderung semakin kecil sebagai akibat turunnya jumlah penduduk usia muda dan naiknya jumlah penduduk usia produktif.

Rasio ketergantungan sangat penting karena mencerminkan jumlah orang yang secara ekonomi tidak aktif per seratus penduduk yang aktif secara ekonomi. Jika informasi mengenai aktivitas ekonomi dari setiap individu tidak tersedia, biasanya digunakan rasio antara penduduk kelompok umur 0-14 dan 65 tahun ke atas terhadap penduduk kelompok umur 15-64 tahun. Rasio ketergantungan secara umum dapat menggambarkan beban tanggungan ekonomi penduduk usia produktif (15-64 tahun) terhadap kelompok usia muda (kurang dari 15 tahun) dan terhadap usia 65 tahun ke atas.

Tingginya rasio ketergantungan akan menyita lebih banyak pendapatan yang dihasilkan oleh penduduk yang bekerja. Keluarga-keluarga yang mempunyai jumlah anak banyak cenderung tidak mampu untuk menabung, akibatnya tingkat penanaman modal akan rendah. Penduduk dengan beban tanggungan anak yang tinggi harus membagi dana investasi yang besar untuk penggunaan yang kurang produktif secara segera, misalnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi makanan

dan non makanan dan bukan untuk investasi. Lebih jauh lagi, angka beban tanggungan yang besar, akan memaksa pemerintah untuk lebih memprioritaskan penyediaan fasilitas sosial yang cukup besar daripada memperhatikan kualitasnya.

Tabel 4.8 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Sleman Menurut Kapanewon Tahun 2023

Kecamatan	Rasio Ketergantungan		
	Muda	Tua	Total
GAMPING	28.90	12.89	41.79
GODEAN	28.66	15.35	44.01
MOYUDAN	27.01	21.76	48.77
MINGGIR	27.08	21.54	48.62
SEYEGAN	29.54	15.25	44.79
MLATI	29.04	13.24	42.28
DEPOK	28.77	13.31	42.08
BERBAH	29.69	12.51	42.20
PRAMBANAN	30.65	15.54	46.18
KALASAN	29.57	12.58	42.15
NGEMPLAK	30.77	14.09	44.86
NGAGLIK	30.47	13.34	43.82
SLEMAN	29.86	13.64	43.50
TEMPEL	28.97	14.80	43.77
TURI	29.21	14.85	44.06
PAKEM	29.02	15.72	44.74
CANGKRINGAN	30.59	15.92	46.51
KABUPATEN SLEMAN	29.37	14.34	43.70

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2023

Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui angka rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Sleman adalah sebesar 43,70 persen yang menunjukkan bahwa dari 100 orang penduduk kelompok umur 15-64 tahun yang produktif menanggung sekitar 43-44 orang penduduk tidak produktif. Rasio ketergantungan sebesar 43,70 persen ini disumbangkan oleh rasio penduduk muda sebesar 29,37 persen dan rasio penduduk tua sebesar 14,34 persen. Sementara berdasarkan wilayah diketahui rasio ketergantungan paling tinggi pada tahun 2023 adalah Kapanewon Moyudan yang mencapai 48,77 persen.

Sementara wilayah dengan rasio ketergantungan paling rendah di seluruh wilayah

Sleman adalah Kapanewon Gamping sebesar 41,79 persen. Fenomena angka rasio ketergantungan di Kabupaten Sleman dalam beberapa tahun ini sangat dinamis, dikarenakan struktur penduduk rata-rata bergeser ke kelompok usia tua. Pada kasus Kapanewon Moyudan rasio ketergantungan yang tinggi disumbang oleh kelompok muda 27,01 dan tua sebesar 21,76. Hal ini menunjukkan struktur penduduk tua di Kapanewon Moyudan.

Gambaran penduduk di Kabupaten Sleman berdasarkan rasio beban ketergantungan ini menunjukkan adanya perkembangan produktivitas sumberdaya manusianya sudah tinggi dan beban penduduk tidak produktif dalam pembangunan semakin rendah. Dengan demikian maka pembangunan dapat terus dilakukan karena penduduk usia tidak produktif ditanggung oleh usia produktif. Kabupaten Sleman akan menikmati dekade *Window of Opportunity* atau jendela kesempatan. Hal itu akan terjadi pada kondisi dimana jumlah penduduk yang berusia produktif (15-64 tahun) meningkat sedangkan jumlah usia yang tidak produktif (0-14 tahun dan 65+) menurun. Pemanfaatan peluang ini dapat terjadi dengan prasyarat, antara lain iklim investasi kondusif untuk membuka kesempatan kerja produktif serta terdapat sumber daya pemerintah untuk diharapkan akan terjadi *window of opportunity* tersebut dengan angka ketergantungan mencapai 44-50 persen. Kondisi rasio beban ketergantungan penduduk Sleman sudah mencapai di bawah 50 persen yaitu 43,70 di tahun 2023. Dapat dikatakan bahwa Kabupaten Sleman telah menikmati *window of opportunity*.

4.1.4 Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Status Kawin

Perkawinan merupakan peristiwa demografis yang penting dalam proses transisi menuju masa dewasa. Dalam demografi, perkawinan menandai berbagai transisi dalam kehidupan, dari anak menjadi dewasa, dari anggota rumah tangga inti menjadi terpisah dan membentuk keluarga mandiri, dan juga transisi ke dalam masa reproduksi potensial yang diakui oleh masyarakat serta hukum negara dan agama (Hull, 2011).

Di Indonesia sendiri, perkawinan dianggap sebagai gerbang untuk membangun

keluarga. Perkawinan dipandang sebagai hal yang sakral dalam kaca mata agama dan budaya karena perkawinan tidak hanya menandai kedewasaan tetapi juga status social seseorang di masyarakat. Proses menuju perkawinan melibatkan banyak negosiasi tidak saja antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Faktor sosial serta budaya sangat berperan dalam proses menuju perkawinan tersebut.

Perkawinan merupakan langkah awal pembentukan suatu keluarga atau rumah tangga. Oleh karena itu status perkawinan ini penting untuk dianalisis sebab dari perkawinan ini akan merubah perilaku demografi yaitu dengan adanya kelahiran. Informasi tentang struktur perkawinan penduduk pada waktu tertentu berguna bagi para penentu kebijakan dan pelaksana kependudukan. Terutama dalam hal pembangunan keluarga, kelahiran dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga. Dari informasi penduduk berstatus kawin, umur perkawinan pertama, dan lama kawin akan berguna untuk melakukan estimasi angka kelahiran yang akan terjadi. Umur perkawinan pertama misalnya berkaitan dengan lamanya seorang perempuan beresiko untuk hamil dan melahirkan. Perkawinan umur dini juga akan berakibat pada besarnya angka perceraian, ketidaksiapan orangtua untuk pengasuhan anak serta kurang matangnya perempuan menjalankan tugas dan fungsinya dalam rumah tangga. Indikator perkawinan ini, berguna bagi penentu kebijakan dalam mengembangkan program- program pembangunan keluarga dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga dan perencanaan keluarga berencana atau pembangunan keluarga.

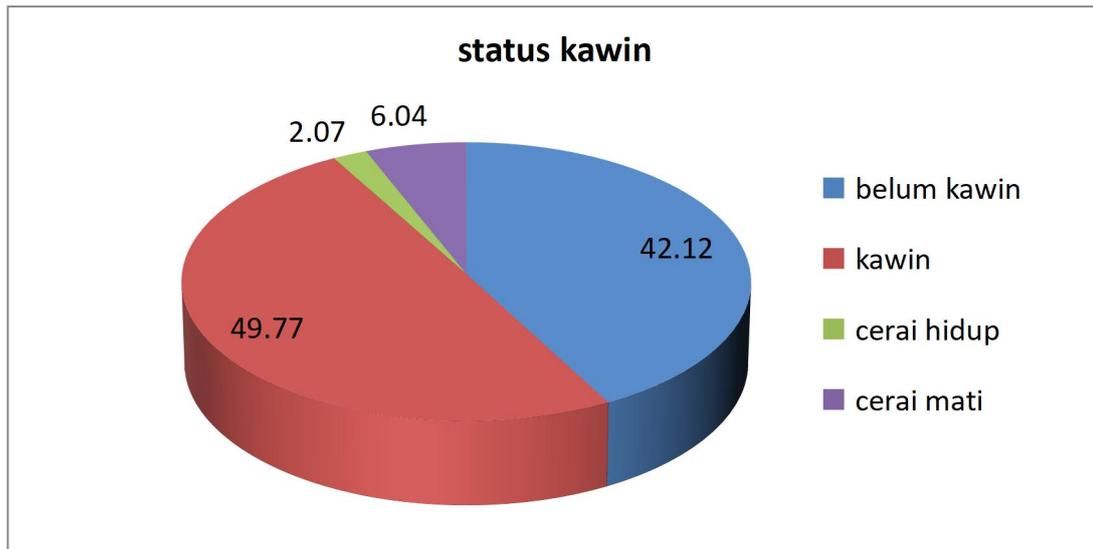
Perkawinan merupakan peristiwa demografis yang sangat kental dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan budaya. Tidak seperti kelahiran dan kematian yang merupakan peristiwa terkait biologis, perkawinan dan perceraian ditentukan oleh undang-undang, konsensus, serta budaya yang dalam beberapa kasus sulit untuk diukur dalam statistik. Dalam konteks tertentu, baik di negara maju maupun berkembang, perkawinan tidak selalu berarti ikatan yang disahkan oleh negara atau agama, namun dapat juga berupa konsensus (mutual consent) baik dari pasangan itu sendiri maupun dengan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, definisi status perkawinan dalam sensus dan survey perlu diperhatikan agar semua

peristiwa terkait perkawinan dapat tercatat dengan baik.

Mengukur peristiwa perkawinan dalam statistik memerlukan definisi yang sesuai dengan konsep perkawinan di suatu wilayah. Hull (2011) merangkum empat kategori status perkawinan yang umum digunakan dalam sensus dan survey penduduk di negara Asia termasuk Indonesia.

1. Belum menikah (*single/never married*), yaitu status belum/tidak terikat dalam perkawinan. Status ini melekat sejak lahir hingga perkawinan pertama. Secara sosial, masa lajang (*singlehood*) diasosiasikan dengan masa anak-anak dan belum dewasa.
2. Menikah atau kawin adalah status terikat dalam perkawinan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Menikah merupakan bersatunya dua insan untuk meneruskan keturunan (*reproductive union*) yang diakui oleh masyarakat, agama dan budaya serta hukum dan negara. Umumnya, status menikah dibuktikan dengan sebuah sertifikat yang diterbitkan pemerintah, otoritas agama, atau masyarakat. Meskipun tidak ada sertifikat atau surat nikah, keabsahan status kawin dapat ditentukan oleh masyarakat sekeliling yang menganggap pasangan sebagai suami istri.
3. Janda/duda mati atau cerai mati, yaitu status yang diperoleh setelah kematian pasangan. Status ini dibuktikan dengan surat nikah disertai dengan akta kematian dari pasangan.
4. Janda/duda cerai hidup, yaitu status yang diperoleh setelah pernikahan berakhir secara hukum. Status ini dibuktikan dengan surat keterangan bercerai. Hukum agama sendiri pada dasarnya tidak membolehkan terjadinya perceraian sehingga status cerai tersebut terkadang diperoleh dari pengakuan individu disertai pengakuan dari masyarakat. Dalam Sensus Penduduk, seseorang akan dicatat sebagai cerai hidup meskipun belum resmi secara hukum.

Dalam pencatatan status menikah, keempat status di atas sangat tergantung kepada pengakuan responden yang juga dipengaruhi oleh konsensus masyarakat tentang perkawinan itu sendiri.



Gambar 4. 22 Persentase Penduduk Sleman Menurut Status Perkawinan

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2023

Berdasarkan status perkawinan penduduk Sleman menurut data SIAK diketahui paling banyak adalah berstatus kawin yakni mencapai 553.738 jiwa atau 49,77 persen di tahun 2023. Urutan kedua penduduk berdasarkan status perkawinan adalah belum kawin yang mencapai 468.638 jiwa atau sekitar 42,12 persen dan selanjutnya adalah penduduk yang berstatus cerai mati sebanyak 67.248 jiwa atau 6,04 persen. Sementara penduduk dengan status cerai hidup sebanyak 22.992 jiwa atau 2,07 persen.

Tabel 4. 9 Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin Berdasarkan Tahun 2023

No	Kapanewon	Status Perkawinan				Total
		Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
1	Gamping	41.259	47.619	1.987	5.494	96.359
2	Godean	29.969	36.161	1.415	4.374	71.919
3	Moyudan	13.477	17.345	502	2.576	33.900
4	Minggir	12.921	16.769	545	2.432	32.667
5	Seyegan	21.718	26.662	1.015	3.237	52.632
6	Mlati	40.566	46.766	2.261	5.419	95.012
7	Depok	55.283	60.389	2.922	7.189	125.783
8	Berbah	24.150	28.504	1.217	3.511	57.382

9	Prambanan	22.192	28.489	1.052	3.482	55.215
10	Kalasan	37.005	42.843	1.886	5.039	86.773
11	Ngemplak	27.808	32.601	1.337	3.753	65.499
12	Ngaglik	44.464	50.389	2.186	5.582	102.621
13	Sleman	30.488	35.565	1.479	4.376	71.908
14	Tempel	22.658	27.792	1.079	3.646	55.175
15	Turi	15.824	19.375	728	2.410	38.337
16	Pakem	16.204	19.490	787	2.647	39.128
17	Cangkringan	12.652	16.979	594	2.081	32.306
KABUPATEN SLEMAN		468.638	553.738	22.992	67.248	1.112.616

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2023

4.1.4.1 Angka Perkawinan Umum

Angka perkawinan umum merupakan proporsi jumlah penduduk yang memiliki status kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas pada pertengahan tahun untuk satu periode tahun tertentu. Angka perkawinan umum di kabupaten Sleman pada tahun 2023 berjumlah 7,61 dengan jumlah kejadian nikah sebanyak 6.745 kasus. Jumlah angka perkawinan umum tertinggi di Kabupaten Sleman ada di Kapanewon Cangkringan (10,80) dengan jumlah kejadian nikah di tahun 2023 sebanyak 277, Kapanewon Pakem (10,31) dengan jumlah kejadian nikah sebanyak 323. Sedangkan kapanewon dengan angka perkawinan umum terendah ada di Kapanewon Moyudan (5,82), dan Godean (5,50). Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Mengetahui angka perkawinan umum ini dapat digunakan untuk memperhitungkan proporsi penduduk kawin, namun pembagiannya adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas dimana usia tersebut lebih berisiko untuk kawin. Penduduk yang berusia dibawah 15 tahun tidak diikutsertakan karena pada usia tersebut umumnya tidak berisiko kawin.

Tabel 4. 10 Banyaknya Pernikahan dan Angka Perkawinan Umum Menurut Kapanewon Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Pernikahan	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk > 15 thn	Angka Perkawinan Kasar	Angka Perkawinan Umum
Gamping	549	95.663	76.715	5,74	7,16
Godean	375	71.483	57.667	5,25	6,50
Moyudan	162	33.818	27.833	4,79	5,82
Minggir	212	32.662	26.878	6,49	7,89
Seyegan	255	52.364	42.024	4,87	6,07
Mlati	564	94.290	75.567	5,98	7,46
Depok	772	124.919	100.325	6,18	7,69
Berbah	367	56.931	45.390	6,45	8,09
Prambanan	287	54.905	43.747	5,23	6,56
Kalasan	555	86.021	68.676	6,45	8,08
Ngemplak	443	64.927	51.542	6,82	8,59
Ngaglik	611	101.766	80.801	6,00	7,56
Sleman	425	71.463	57.006	5,95	7,46
Tempel	350	55.064	44.330	6,36	7,90
Turi	218	38.103	30.623	5,72	7,12
Pakem	323	38.882	31.321	8,31	10,31
Cangkringan	277	32.154	25.651	8,61	10,80
KAB SLEMAN	6.745	1.105.415	886.096	6,10	7,61

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2023

4.1.4.2 Angka Perceraian Umum

Angka perceraian umum menunjukkan perbandingan penduduk yang berstatus cerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas pada pertengahan tahun untuk satu tahun tertentu. Angka perceraian umum dijadikan sebagai informasi data yang dipergunakan untuk memperhitungkan proporsi penduduk cerai hidup. Angka perceraian umum di Kabupaten Sleman di tahun 2023 berjumlah 3,25 dengan kejadian talak dan cerai berjumlah 2.878 kasus. Kapanewon dengan jumlah angka perceraian umum terbanyak ada di Kecamatan Berbah (43,62) dan Tempel (28,42). Sedangkan kapanewon dengan angka perceraian umum terendah ada di Kapanewon Minggir (2,23) dan Seyegan (2,38).

Tabel 4. 11 Banyaknya Perceraian, Angka Perceraian Kasar, dan Angka Perceraian Umum Menurut Kapanewon Tahun 2023

Kecamatan	Kejadian Perceraian	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk >15 thun	Angka Perceraian Kasar	Angka Perceraian Umum
Gamping	218	95.663	76.715	2,28	2,84
Godean	186	71.483	57.667	2,60	3,23
Moyudan	81	33.818	27.833	2,40	2,91
Minggir	60	32.662	26.878	1,84	2,23
Seyegan	100	52.364	42.024	1,91	2,38
Mlati	260	9.429	75.567	27,57	3,44
Depok	283	124.919	100.325	2,27	2,82
Berbah	198	56.931	4.539	3,48	43,62
Prambanan	159	54.905	43.747	2,90	3,63
Kalasan	232	86.021	68.676	2,70	3,38
Ngemplak	201	64.927	51.542	3,10	3,90
Ngaglik	231	101.766	80.801	2,27	2,86
Sleman	193	71.463	57.006	2,70	3,39
Tempel	126	55.064	4.433	2,29	28,42
Turi	105	38.103	30.623	2,76	3,43
Pakem	131	38.882	31.321	3,37	4,18
Cangkringan	114	32.154	25.651	3,55	4,44
KABUPATEN SLEMAN	2.878	1.105.415	886.096	2,60	3,25

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2023

4.1.5 Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga

Keluarga menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1988 adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul serta tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling bergantung. Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 1999 mendefinisikan keluarga sebagai dua orang atau lebih yang dibentuk berdasarkan ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertakwa kepada Tuhan, memiliki hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara anggota keluarga dan masyarakat serta lingkungannya. Berdasarkan pengertian dari Depkes dan BKKBN di atas, definisi keluarga dapat lebih disederhanakan menjadi sekumpulan orang yang tinggal dalam

satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya.

Keluarga memiliki beberapa peran penting baik dilihat dari fungsi ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Fungsi ekonomi diharapkan dapat mendorong keluarga agar dapat membina kualitas kehidupan ekonomi keluarga, sekaligus dapat bersikap realistis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga. Fungsi pendidikan, bukan hanya berhubungan dengan kecerdasan, melainkan juga termasuk pendidikan emosional dan juga pendidikan spiritualnya. Fungsi kesehatan berintikan bahwa setiap keluarga dapat menerapkan cara hidup sehat dan mengerti tentang kesehatan reproduksinya. Termasuk di dalamnya adalah pemahaman tentang alat kontrasepsi maupun pengetahuan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi para remaja.

Menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) bahwa fungsi keluarga dibagi menjadi 7. Fungsi keluarga yang dikemukakan oleh BKKBN ini senada dengan fungsi keluarga menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994, yaitu:

1. Fungsi keagamaan, yaitu dengan memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama, dan tugas kepala keluarga untuk menanamkan bahwa ada kekuatan lain yang mengatur kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah di dunia ini.
2. Fungsi sosial budaya, dilakukan dengan membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak, meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.
3. Fungsi cinta kasih, diberikan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian diantara anggota keluarga.
4. Fungsi melindungi, bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik, sehingga anggota keluarga merasa terlindung dan merasa aman.
5. Fungsi reproduksi, merupakan fungsi yang bertujuan untuk meneruskan

keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merawat anggota keluarga.

6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan, merupakan fungsi dalam keluarga yang dilakukan dengan cara mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya, menyekolahkan anak. Sosialisasi dalam keluarga juga dilakukan untuk mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik.
7. Fungsi ekonomi, adalah serangkaian dari fungsi lain yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah keluarga. Fungsi ini dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga dimasa datang.

Informasi tentang jumlah keluarga dan komposisi anggota keluarga, diperlukan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan pemenuhan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan pangan, pengentasan kemiskinan dan sebagainya. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/ hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya.

Sudiharto (2007) menjelaskan bahwa keluarga yang dikenal dalam masyarakat kita memiliki dua bentuk yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti (*Nuclear family*) adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak kandung, anak angkat maupun adopsi yang belum kawin atau ayah dengan anak-anak yang belum kawin atau ibu dengan anak-anak yang belum kawin. Sementara itu, keluarga luas (*extended family*) adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak baik yang sudah kawin atau belum, cucu, orang tua, mertua maupun kerabat-kerabat lain yang menjadi tanggungan kepala keluarga.

Indikator untuk menggambarkan kondisi keluarga, antara lain jumlah keluarga dan rata-rata jumlah anggota keluarga, hubungan dengan kepala keluarga, karakteristik kepala keluarga berdasarkan umur, karakteristik kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin, karakteristik kepala keluarga berdasarkan status kawin, karakteristik kepala keluarga berdasarkan pendidikan, dan karakteristik kepala keluarga berdasarkan status pekerjaan.

4.1.5.1 Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga

Banyaknya jumlah anggota keluarga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan dan kesejahteraan dalam satu keluarga, dimana diasumsikan semakin kecil jumlah anggota keluarga biasanya akan semakin baik tingkat kesejahtraannya. Rata-rata jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk melihat perubahan paradigma dari keluarga besar menjadi keluarga kecil.

Tabel 4. 12 Jumlah Penduduk, Jumlah Kepala Keluarga, dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga Tahun 2023

Kapanewon	Jumlah Kepala Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga		
	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga
Gamping	33,266	96,359	2.90
Godean	25,208	71,919	2.85
Moyudan	12,486	33,900	2.72
Minggir	12,050	32,667	2.71
Seyegan	18,567	52,632	2.83
Mlati	33,096	95,012	2.87
Depok	43,672	125,783	2.88
Berbah	20,050	57,382	2.86
Prambanan	19,581	55,215	2.82
Kalasan	29,951	86,773	2.90
Ngemplak	22,544	65,499	2.91
Ngaglik	35,085	102,621	2.92
Sleman	25,193	71,908	2.85
Tempel	19,478	55,175	2.83
Turi	13,342	38,337	2.87
Pakem	13,833	39,128	2.83
Cangkringan	11,514	32,306	2.81
KABUPATEN SLEMAN	388,916	1,112,616	2.86

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2023

Rata-rata jumlah anggota keluarga di Kabupaten Sleman pada tahun 2023 adalah 2,86 orang, artinya rata-rata jumlah anggota keluarga kurang lebih terdiri dari tiga orang dan ini dapat dikategorikan sebagai keluarga inti. Rata-rata jumlah anggota

keluarga sebanyak tiga orang ini, merata di setiap kapanewon di Kabupaten Sleman. Berdasarkan wilayah diketahui bahwa kapanewon paling banyak rata-rata anggota keluarganya adalah Ngaglik yang mencapai 2,92 jiwa. Sementara rata-rata anggota keluarga paling kecil adalah Kapanewon Minggir mencapai 2,71 jiwa.

4.1.5.2 Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga (SHDK)

Kepala Keluarga adalah laki-laki atau perempuan yang berstatus kawin atau janda/duda yang mengepalai suatu keluarga yang anggotanya terdiri dari suami/isteri dan atau anak-anaknya. Hubungan dengan kepala keluarga digunakan untuk melihat banyaknya kepala keluarga menurut jenis kelamin, pola pengaturan tinggal bersama (living arrangement) dan pola pengasuhan anak dalam keluarga tersebut. Setiap anggota dalam keluarga mempunyai status hubungan dengan kepala keluarga, seperti suami, istri, anak, menantu, cucu, keponakan, orangtua dan mertua, termasuk adanya orang lain yang tinggal bersama, seperti: pembantu rumah tangga.

Data SIAK tahun 2023 memperlihatkan jumlah total penduduk Sleman tahun 2023 mencapai 1.112.616 jiwa dan terdiri dari 388.916 KK. Jika dilihat dari status hubungan dengan kepala keluarga, tampak bahwa paling banyak berstatus sebagai anak, yakni 438.737 jiwa atau 39,43 persen. Selanjutnya adalah status sebagai kepala keluarga, yaitu sebesar 388.916 KK atau 34,96 persen, dan ketiga adalah status istri yang mencapai 261.009 atau 23,46 persen. Kepala keluarga umumnya dipegang oleh suami, tetapi di Kabupaten Sleman terdapat 83.880 KK perempuan atau 14,93 persen perempuan yang menjadi kepala keluarga dari seluruh perempuan yang ada di kabupaten Sleman.

Tabel 4. 13 Jumlah Penduduk Menurut Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga Tahun 2023

Status Hubungan dengan Kepala Keluarga (KK)	Jumlah Penduduk(jiwa)					
	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	Persen
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen		
Kepala keluarga	305,036	55.37	83,880	14.93	388,916	34.96%
Suami	46	0.01	-	0.00	46	0.00%
Isteri		-	261,009	46.47	261,009	23.46%
Anak	234,877	42.63	203,860	36.29	438,737	39.43%
Menantu	194	0.04	312	0.06	506	0.05%
Cucu	3,992	0.72	3,370	0.60	7,362	0.66%
Orangtua	278	0.05	2,040	0.36	2,318	0.21%
Mertua	131	0.02	939	0.17	1,070	0.10%
Famili lain	5,066	0.92	4,879	0.87	9,945	0.89%
Pembantu	4	0.00	34	0.01	38	0.00%
Lainnya	1,291	0.23	1,378	0.25	2,669	0.24%
KAB SLEMAN	550,915	100	561,701	100%	1,112,616	100%

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2023

4.1.5.3 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

Dengan mempertimbangkan bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya adalah masyarakat patriarki yang memposisikan laki-laki sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga, membahas kepala keluarga perempuan menjadi sangat menarik. Di satu sisi munculnya kepala keluarga perempuan merupakan indikator kemiskinan, karena absennya laki-laki sebagai pencari nafkah. Tetapi di sisi lain dapat pula dipahami bahwa munculnya kepala rumah tangga perempuan merupakan indikasi masuknya perempuan ke sektor publik atau pergeseran dari fungsi reproduksi ke produksi.

Masyarakat Indonesia cenderung menganggap bahwa laki-laki adalah penanggung jawab ekonomi keluarga. Hal ini menyebabkan mereka pada umumnya menyandang jabatan sebagai kepala keluarga. Namun dalam beberapa dekade ini terlihat

peningkatan jumlah perempuan yang menyandang jabatan kepala keluarga tersebut. Konstruksi sosial bahwa laki-laki adalah kepala keluarga nampaknya mulai bergeser. Namun sering kali terjadi meskipun menjabat sebagai kepala keluarga, justru perempuan menanggung beban untuk menanggung seluruh kebutuhan keluarga. Hal semacam ini sering terjadi pada kepala keluarga perempuan lansia. Beratnya beban untuk mencukupi kebutuhan hidup dan tanggung jawab terhadap berbagai hal atau masalah dalam keluarga menyebabkan perempuan menjadi pihak yang sangat rentan terjebak dalam kemiskinan.

Tabel 4. 14 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin dan Kapanewon Tahun 2023

No	Kapanewon	Jumlah Kepala Keluarga				
		Laki	Persen	Perempuan	Persen	Jumlah
1	Gamping	26,170	8.58	7,096	8.46	33,266
2	Godean	19,856	6.51	5,352	6.38	25,208
3	Moyudan	9,696	3.18	2,790	3.33	12,486
4	Minggir	9,260	3.04	2,790	3.33	12,050
5	Seyegan	14,726	4.83	3,841	4.58	18,567
6	Mlati	25,921	8.50	7,175	8.55	33,096
7	Depok	33,485	10.98	10,187	12.14	43,672
8	Berbah	15,800	5.18	4,250	5.07	20,050
9	Prambanan	15,503	5.08	4,078	4.86	19,581
10	Kalasan	23,600	7.74	6,351	7.57	29,951
11	Ngemplak	17,799	5.84	4,745	5.66	22,544
12	Ngaglik	27,494	9.01	7,591	9.05	35,085
13	Sleman	19,714	6.46	5,479	6.53	25,193
14	Tempel	15,396	5.05	4,082	4.87	19,478
15	Turi	10,678	3.50	2,664	3.18	13,342
16	Pakem	10,685	3.50	3,148	3.75	13,833
17	Cangkringan	9,253	3.03	2,261	2.70	11,514
KABUPATEN SLEMAN		305,036	100	83,880	100	388,916

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2023

4.1.5.4 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin

Dalam konsep demografi kepala keluarga merupakan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, berstatus menikah maupun tidak, yang mempunyai peran, fungsi dan tanggungjawab sebagai kepala keluarga, baik secara ekonomi, sosial maupun psikologis. Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status perkawinan dapat digunakan untuk melihat jumlah keluarga yang dikepalai oleh lajang maupun mereka yang berstatus cerai, baik hidup maupun mati.

Tabel 4. 15 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Status Perkawinan dan Kapanewon Tahun 2023

No	Kecamatan	Status Perkawinan				Total
		Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
1	Gamping	1.712	24.540	1.792	5.222	33.266
2	Godean	1.179	18.698	1.266	4.065	25.208
3	Moyudan	647	8.920	440	2.479	12.486
4	Minggir	619	8.606	486	2.339	12.050
5	Seyegan	830	13.670	931	3.136	18.567
6	Mlati	1.813	24.042	2.061	5.180	33.096
7	Depok	3.235	31.196	2.565	6.676	43.672
8	Berbah	864	14.707	1.102	3.377	20.050
9	Prambanan	579	14.619	965	3.418	19.581
10	Kalasan	1.367	22.016	1.759	4.809	29.951
11	Ngemplak	1.038	16.762	1.211	3.533	22.544
12	Ngaglik	1.874	26.052	1.958	5.201	35.085
13	Sleman	1.152	18.424	1.358	4.259	25.193
14	Tempel	772	14.188	980	3.538	19.478
15	Turi	548	9.907	642	2.245	13.342
16	Pakem	619	10.073	703	2.438	13.833
17	Cangkringan	363	8.652	524	1.975	11.514
KABUPATEN SLEMAN		19.211	285.072	20.743	63.890	388.916

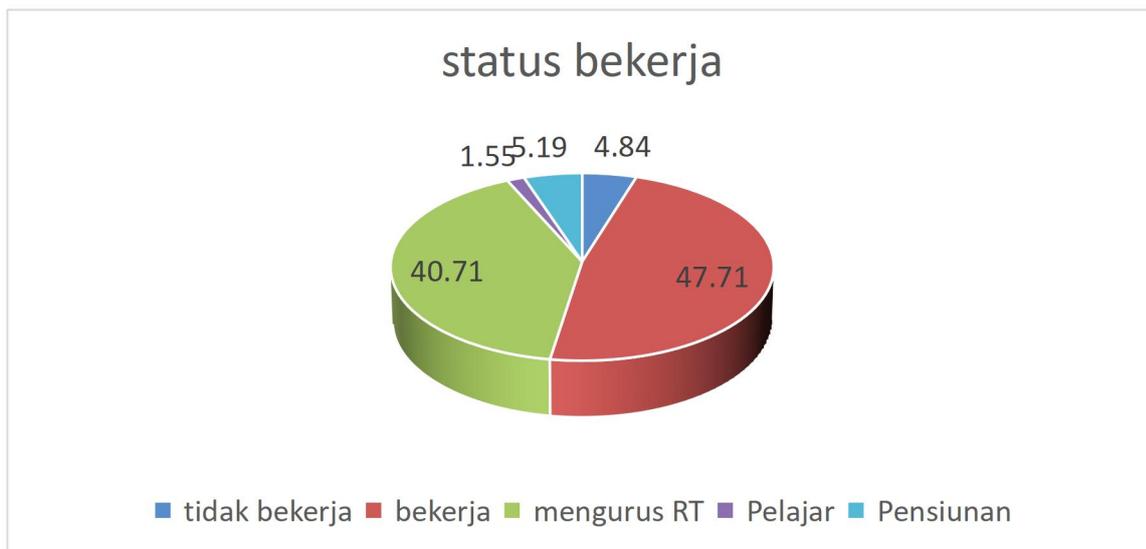
Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2023

Total kepala keluarga di Kabupaten Sleman berdasarkan data SIAK Tahun 2023 mencapai 388.916 KK. Kepala keluarga menurut status perkawinan paling banyak adalah kawin, yaitu 73,3 persen atau 285.072 KK. Berikutnya adalah cerai mati sebanyak 16,43 persen atau 63.890 KK dan ketiga adalah cerai hidup sebanyak 20.743 KK atau 5,33 persen. Hal yang menarik dari data tersebut adalah adanya kepala keluarga yang berstatus belum kawin dan jumlahnya cukup besar. Biasanya kepala keluarga yang berstatus belum kawin merupakan anggota keluarga yang menggantikan orang tua yang meninggal, atau kepala keluarga tersebut hidup sendirian. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang dijadikan sebagai kepala keluarga bukan hanya didasarkan pada status perkawinannya, tetapi lebih kepada kemampuan dan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga. Selain itu, konstruksi sosial bahwa laki-laki adalah kepala keluarga nampaknya mulai bergeser dengan adanya kepala keluarga perempuan tidak hanya kepala keluarga laki-laki berstatus kawin. Sementara itu, jika diperhatikan lebih lanjut terdapat kepala keluarga yang berstatus cerai (baik cerai hidup maupun cerai mati). Laki-laki pada umumnya segera melakukan perkawinan kembali sesudah terjadi perceraian, sementara perempuan lebih banyak yang menunda dengan berbagai alasan.

4.1.5.5 Karakteristik Kepala keluarga Berdasarkan Status Bekerja

Status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga maupun anggota, serta seberapa besar sumbangan mereka terhadap potensi ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, informasi mengenai kepala keluarga menurut status pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk. Gambar 4.23 memperlihatkan persentase kepala keluarga berdasarkan status bekerja. Paling banyak kepala keluarga di Kabupaten Sleman adalah bekerja, tahun 2023 sebanyak 47,71 persen. Selain kepala keluarga yang berstatus bekerja, terdapat juga kepala keluarga yang status tidak bekerja yang terdiri dari tidak bekerja, pensiunan, sekolah, dan mengurus rumah tangga.

Jumlah kepala keluarga yang statusnya tidak bekerja besarnya mencapai 11,58 persen yang terdiri atas pelajar (1,55 persen), pensiunan (5,19 persen), mengurus rumah tangga (40,71 persen), dan belum bekerja (1,55 persen). Ada hal yang menarik terkait dengan status pekerjaan kepala rumah tangga yang tidak bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa kepala keluarga untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari harus ditanggung oleh anggota keluarga lainnya yang bekerja. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sleman perlu memperhatikan keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga yang tidak bekerja, walaupun proporsi mereka kecil. Kepala keluarga yang tidak bekerja, dapat disebabkan karena sudah memasuki usia pensiun atau memang tidak mampu masuk ke pasar kerja. Untuk mereka ini perlu diberikan intervensi untuk membantu meningkatkan status kesejahteraan mereka, karena pada umumnya keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga yang tidak bekerja memiliki status ekonomi yang rendah.



Gambar 4. 23 Persentase Kepala Keluarga Menurut Status Bekerja Tahun 2023

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2023

4.1.6 Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

4.1.6.1 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator sosial ekonomi masyarakat yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat. Tingkat pendidikan juga dianggap sebagai investasi Sumber Daya Manusia (*human capital investment*) selain kesehatan. Adam Smith, seorang ekonom, berpendapat bahwa pendidikan dianggap sebagai investasi yang dapat membantu meningkatkan produktivitas, artinya investasi pada Sumber Daya Manusia (SDM) seperti halnya investasi pada kapital fisik.

Tingkat pendidikan yang tinggi menunjukkan makin baiknya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, sekaligus juga menunjukkan makin tingginya tingkat sosial ekonomi masyarakat. Pendidikan yang tinggi memberikan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, juga pendapatan yang lebih baik, dan pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri. Peningkatan pendidikan merupakan salah satu upaya penting dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pada gilirannya akan berdampak pada perbaikan kinerja dalam melakukan pekerjaan. Perbaikan kinerja dalam pengertian ekonomis berarti terjadi peningkatan output yang dihasilkan.

Perencanaan di bidang pendidikan memerlukan data-data sebagai acuan dasar. Untuk itu, dalam subbab berikut ini akan disajikan beberapa indikator yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaksanaan program pendidikan di masa datang khususnya di Kabupaten Sleman. Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan di Kabupaten Sleman pada waktu tertentu yang disajikan berdasarkan jenis kelamin per kecamatan dalam bentuk tabel. Informasi tentang jumlah penduduk menurut pendidikan ini menunjukkan karakteristik penduduk berdasarkan jenjang pendidikan dan gambaran pencapaian pembangunan pendidikan di suatu kabupaten/kota

sekaligus kualitas sumberdaya manusia.

Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Sleman sebagian besar pada tingkat pendidikan rendah. Pada tahun 2023 paling banyak penduduk Sleman berpendidikan SMA yang mencapai 370.654 jiwa atau 33,31 persen. Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak kedua adalah tidak memiliki ijazah yang mencapai 172.059 jiwa atau 15,46 persen, Penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi setara Diploma III ke atas samp

ai dengan Strata III masih tercatat sebanyak 174.136 jiwa atau 12,48 persen.

Penduduk Sleman berdasarkan ijazah yang dimiliki paling banyak adalah SMA/ sederajat. Jika dibedakan menurut jenis kelamin, diketahui penduduk dengan ijazah SMA/ sederajat tersebut lebih tinggi laki-laki dibanding perempuan. Pada tahun 2022 tercatat laki-laki dengan ijazah SMA/ sederajat sebanyak 190.594 jiwa, sedangkan perempuan sebanyak 171.346 jiwa. Mayoritas perbandingan laki- laki lebih sedikit dibanding perempuan di semua tingkatan sekolah kecuali tingkat SMA, S2 dan S3.

Tabel 4. 16 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Berdasarkan Data SIAK Tahun 2023

No.	Kapanewon	Tidak Sekolah	Belum tamat SD	Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SMA	Diploma I/II	Akdm/ Diploma III/ Sarjana Muda	Diploma IV/ Strata I	Strata II	Strata III	Total
1	GAMPING	15.965	8.824	12.166	12.430	30.113	858	3.365	10.977	1.464	197	96.359
2	GODEAN	11.439	6.939	9.078	9.126	23.845	611	2.301	7.677	795	108	71.919
3	MOYUDAN	4.427	2.963	3.754	4.189	12.609	493	1.215	3.931	297	22	33.900
4	MINGGIR	4.523	3.316	4.215	4.306	11.179	340	1.064	3.470	235	19	32.667
5	SEYEGAN	7.879	5.219	7.286	7.864	18.709	313	1.301	3.733	308	20	52.632
6	MLATI	13.717	9.638	10.769	12.063	31.238	857	3.280	11.584	1.625	241	95.012
7	DEPOK	20.105	9.627	9.785	14.001	38.744	1.395	5.985	21.824	3.687	630	125.783
8	BERBAH	8.717	5.259	6.750	9.131	19.639	420	1.697	5.161	546	62	57.382
9	PRAMBANAN	9.981	4.738	9.173	8.489	18.191	254	1.015	3.105	249	20	55.215
10	KALASAN	13.811	8.180	8.740	11.551	29.251	807	3.115	9.849	1.268	201	86.773
11	NGEMPLAK	10.380	6.120	5.820	8.020	22.497	564	2.266	8.315	1.271	246	65.499
12	NGAGLIK	17.019	9.057	8.957	11.323	31.723	932	4.388	16.061	2.625	536	102.621
13	SLEMAN	9.822	7.448	7.531	10.730	25.463	577	2.488	7.040	739	70	71.908
14	TEMPEL	7.901	5.998	7.681	8.574	19.135	403	1.379	3.795	288	21	55.175
15	TURI	5.820	3.519	5.307	5.527	13.782	333	927	2.896	209	17	38.337
16	PAKEM	5.673	3.519	4.564	5.287	13.852	391	1.427	4.024	360	31	39.128
17	CANGKRINGAN	4.880	2.969	5.724	4.990	10.684	234	699	1.951	165	10	32.306
KAB SLEMAN		172.059	103.333	127.300	147.601	370.654	9.782	37.912	125.393	16.131	2.451	1.112.616

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2023

Tabel 4. 17 Jumlah Penduduk Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2023

Ijazah tertinggi	Jenis Kelamin				Total	
	Laki-laki		Perempuan			
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Tidak mempunyai ijazah	85.135	15,45	86.924	15,48	172.059	15,46
Belum tamat SD	50.718	9,21	52.615	9,37	103.333	9,29
SD/MI	56.885	10,33	70.415	12,54	127.300	11,44
SMP/Mts	74.058	13,44	73.543	13,09	147.601	13,27
SMA/SMK/MA	195.147	35,42	175.507	31,25	370.654	33,31
DI/DII	3.867	0,70	5.915	1,05	9.782	0,88
DIII/Akademi	15.485	2,81	22.427	3,99	37.912	3,41
DIV/S1	59.167	10,74	66.226	11,79	125.393	11,27
S2	8.786	1,59	7.345	1,31	16.131	1,45
S3	1.667	0,30	784	0,14	2.451	0,22
Jumlah	550.915	100	561.701	100	1.112.616	100

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2023

4.1.6.2 Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan agama/kepercayaan di suatu kabupaten/kota pada waktu tertentu yang disajikan per kecamatan dalam bentuk tabel. Dari tabel tersebut akan diketahui karakteristik penduduk berdasarkan pemeluk agama (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Khonghucu, dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa).

Penduduk Sleman berdasarkan agama dan kepercayaan menurut wilayah tempat tinggal dari data SIAK diketahui paling banyak tinggal di Kapanewon Depok. Mulai dari Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Budha, dan Khonghucu paling banyak berdomisili di Kapanewon Depok. Penduduk yang beragama Islam yang tinggal di Kapanewon Depok pada tahun 2023 tercatat sebanyak 106.704 jiwa atau 10,59 persen dari total penduduk Sleman yang beragama Islam. Berikutnya adalah penduduk yang beragama Katolik

yang tinggal di Kecamatan Depok pada tahun 2023 sebanyak 10.929 jiwa atau 15,59 persen dari total penduduk Sleman yang beragama Katolik. Penduduk yang beragama Kristen yang tinggal di Kapanewon Depok tahun 2023 tercatat sebanyak 7.638 jiwa atau 23,2 persen dari total penduduk yang beragama Kristen di Sleman. Sementara penduduk yang beragama Hindu paling banyak juga tinggal di Kapanewon Depok yakni mencapai 301 jiwa atau 25,9 persen dari total penduduk Sleman yang beragama Hindu. Penduduk dengan agama Budha yang tinggal di Kapanewon Depok sebanyak 202 jiwa atau 28,3 persen dari total penduduk yang beragama Budha.

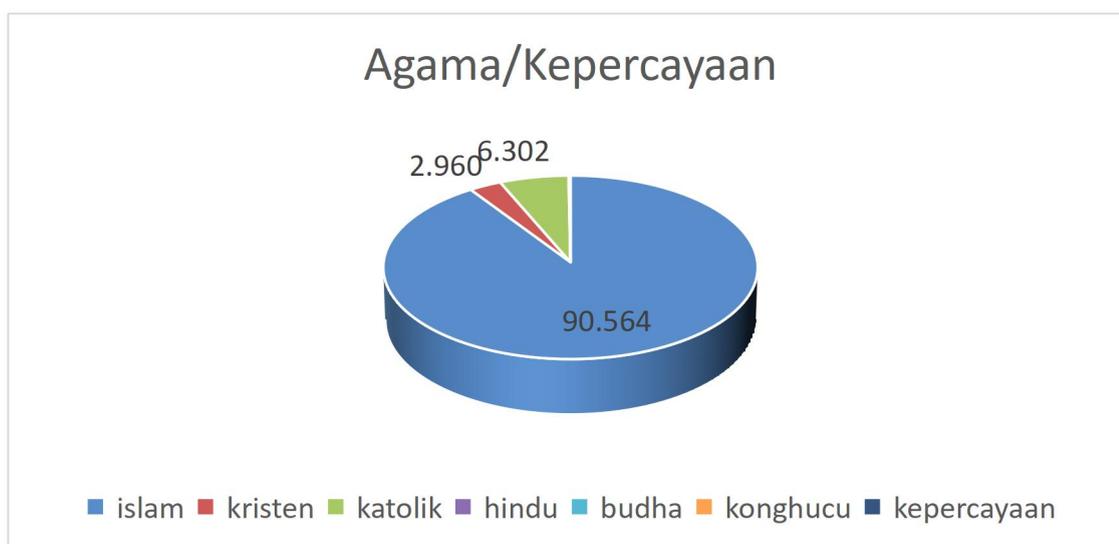
Khonghuchu yang telah diakui oleh pemerintah sebagai salah satu agama di Indonesia paling banyak tinggal di Kapanewon Mlati yakni sebesar 11 jiwa atau 34,38 persen dari total penduduk yang beragama Khonghuchu. Penduduk dengan aliran kepercayaan terbanyak tinggal di Kapanewon Depok 5 orang dan Ngaglik 5 orang atau 19,23 persen dari total 26 orang penganut Kepercayaan di Kabupaten Sleman.

Tabel 4. 18 Jumlah Penduduk Menurut Agama/Kepercayaan yang Dianut Tahun 2023

Kecamatan	Agama/Kepercayaan																				
	Islam			Kristen			Katholik			Hindu			Budha		Khonghucu			Kepercayaan			
	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
Gamping	43.333	43.625	86.958	1.876	2.023	3.899	2.594	2.732	5.326	42	29	71	49	54	103	1	1	2	-	-	-
Godean	32.704	32.882	65.586	1.387	1.509	2.896	1.636	1.709	3.345	16	19	35	28	26	54	2	-	2	1	-	1
Moyudan	14.637	14.759	29.396	241	265	506	1.967	2.021	3.988	5	5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Minggir	12.674	13.267	25.941	345	398	743	2.885	3.090	5.975	4	2	6	1	1	2	-	-	-	-	-	-
Seyegan	25.288	25.603	50.891	196	214	410	585	645	1.230	42	52	94	3	4	7	-	-	-	-	-	-
Mlati	42.227	42.645	84.872	1.545	1.680	3.225	3.391	3.265	6.656	65	66	131	64	50	114	6	5	11	1	2	3
Depok	52.812	53.892	106.704	3.707	3.931	7.638	5.249	5.680	10.929	145	156	301	98	104	202	4	-	4	3	2	5
Berbah	26.187	26.619	52.806	883	938	1.821	1.303	1.386	2.689	24	31	55	7	4	11	-	-	-	-	-	-
Prambanan	25.774	26.488	52.262	219	260	479	1.249	1.199	2.448	10	8	18	3	5	8	-	-	-	-	-	-
Kalasan	38.298	38.917	77.215	1.514	1.547	3.061	3.098	3.244	6.342	64	51	115	19	19	38	1	-	1	-	1	1
Ngemplak	29.862	30.210	60.072	879	978	1.857	1.658	1.756	3.414	68	66	134	10	9	19	-	1	1	2	-	2
Ngaglik	45.588	46.747	92.335	1.598	1.723	3.321	3.298	3.374	6.672	77	85	162	68	53	121	2	3	5	3	2	5
Sleman	33.146	33.730	66.876	613	646	1.259	1.831	1.906	3.737	7	4	11	5	12	17	2	3	5	2	1	3
Tempel	26.796	27.340	54.136	109	116	225	383	416	799	2	2	4	3	6	9	-	-	-	-	2	2
Turi	17.945	17.963	35.908	109	99	208	1.076	1.139	2.215	1	2	3	-	-	-	-	-	-	1	2	3
Pakem	16.769	17.195	33.964	576	575	1.151	1.931	2.070	4.001	4	2	6	2	3	5	-	-	-	1	-	1
Cangkringan	15.689	16.019	31.708	114	122	236	166	186	352	4	2	6	2	1	3	1	-	1	-	-	-
KABUPATEN SLEMAN	499.729	507.901	1.007.630	15.911	17.024	32.935	34.300	35.818	70.118	580	582	1.162	362	351	713	19	13	32	14	12	26

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2023

Berdasarkan data SIAK diketahui penduduk Sleman menurut agama dan kepercayaan dianut tahun 2023 paling banyak adalah Islam yang mencapai 1.007.630 jiwa atau 90,56 persen. Urutan kedua terbanyak adalah Katolik yang mencapai 70.118 jiwa atau 6,30 persen dan berikutnya adalah Kristen sebanyak 32.935 jiwa atau 2,96 persen. Berikutnya adalah Hindu sebanyak 1.162 jiwa atau 0,10 persen, Budha mencapai 713 jiwa atau 0,065 persen, Khonghucu sebanyak 32 jiwa atau 0,003 persen, dan penganut Kepercayaan 26 jiwa atau 0,002 persen.



Gambar 4. 24 Persentase Penduduk Sleman Menurut Agama/Kepercayaan yang Dianut Tahun 2023

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2023

4.1.7 Kelahiran

4.1.7.1 Jumlah Kelahiran Menurut Kapanewon

Jumlah keseluruhan kelahiran di Kabupaten Sleman pada tahun 2023 berjumlah 11.988 jiwa. Jumlah tersebut jika diperinci menurut kapanewon akan terlihat pola bahwa jumlah kelahiran beririsan dengan besarnya laju pertumbuhan penduduk. Kapanewon dengan jumlah kelahiran tertinggi ada di Depok dengan jumlah 1.459 jiwa, dan kapanewon Mlati dengan jumlah kelahiran 1.097 jiwa. Adapun kapanewon dengan jumlah kelahiran terendah di Kabupaten Sleman pada tahun 2023 ada di

Moyudan dengan jumlah kelahiran 272 jiwa, dan Minggir dengan jumlah kelahiran 287 jiwa.

Tabel 4. 19 Jumlah Kelahiran Menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Kelahiran Hidup			
		L	P	Jumlah	Persen
1	Gamping	539	519	1.058	8,83
2	Godean	455	432	887	7,40
3	Moyudan	144	128	272	2,27
4	Minggir	140	147	287	2,39
5	Seyegan	220	246	466	3,89
6	Mlati	571	526	1.097	9,15
7	Depok	726	733	1.459	12,17
8	Berbah	310	373	683	5,70
9	Prambanan	332	332	664	5,54
10	Kalasan	395	399	794	6,62
11	Ngemplak	392	348	740	6,17
12	Ngaglik	538	545	1.083	9,03
13	Sleman	390	406	796	6,64
14	Tempel	280	288	568	4,74
15	Turi	229	217	446	3,72
16	Pakem	188	181	369	3,08
17	Cangkringan	161	158	319	2,66
KABUPATEN SLEMAN		6.010	5.978	11.988	100

Sumber: Dinas Kesehatan Sleman, 2023

4.1.7.2 Angka Kelahiran Kasar Menurut Kapanewon

Angka Kelahiran Kasar menunjukkan banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun. Informasi tersebut berguna untuk mengetahui tingkat kelahiran di suatu daerah tertentu pada waktu tertentu. Angka kelahiran kasar di Kabupaten Sleman pada tahun 2023 sebesar 10,84 dengan jumlah tertinggi ada di Kapanewon Godean (12,41) dan Prambanan (12,09). Sedangkan angka kelahiran kasar terendah menurut kapanewon ada di Moyudan

(8,04), dan Minggir (8,79). Untuk melihat detail terkait penjelasan tersebut dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4. 20 Distribusi Parameter Kelahiran di Kabupaten Sleman Tahun 2023

Kapanewon	Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate (CBR))	Angka Kelahiran Umum (Rough Fertility Rate (GFR))
Gamping	11,06	42,95
Godean	12,41	49,71
Moyudan	8,04	33,99
Minggir	8,79	37,04
Seyegan	8,90	35,71
Mlati	11,63	45,42
Depok	11,68	44,87
Berbah	12,00	46,32
Prambanan	12,09	47,78
Kalasan	9,23	35,55
Ngemplak	11,40	44,69
Ngaglik	10,64	40,80
Sleman	11,14	43,85
Tempel	10,32	41,39
Turi	11,71	47,05
Pakem	9,49	38,33
Cangkringan	9,92	39,88
KABUPATEN SLEMAN	10,84	42,66

Sumber: Dinas Kesehatan Sleman, 2023

4.2 Data Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak. Peningkatan kualitas penduduk berkaitan dengan upaya menjadikan penduduk sebagai sumber

daya manusia melalui pembangunan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pengembangan kualitas fisik, dan pengembangan kualitas non fisik untuk mewujudkan produktifitas dan ketahanan penduduk, khususnya terhadap kelompok anak, remaja, dewasa, usia lanjut, wanita, penduduk, dan masyarakat rentan.

Penduduk merupakan pelaku, pelaksana, dan penikmat pembangunan. Dengan kualitas tinggi, penduduk akan lebih banyak berperan sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan. Selain itu, pembangunan tidak hanya bergantung pada sumber daya alam dan teknologi, tetapi justru lebih bergantung pada kualitas penduduknya. Dengan tersedianya sumber daya manusia yang memadai dalam arti kualitas dan kuantitas, maka tantangan di masa yang akan datang dapat diatasi dengan baik. Kualitas sumber daya manusia yang ada sekarang masih perlu ditingkatkan agar tantangan tersebut diatasi dengan baik.

Pembangunan kualitas penduduk ditentukan oleh tiga hal : Pembangunan ekonomi, pembangunan kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan kualitas penduduk tahun 2035 adalah penduduk yang sehat, cerdas produktif dan berakhlak mulia serta berkarakter. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan. Hal itu dianggap sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, kebangsaan, dan hidup layak. Penduduk yang sehat tidak hanya berumur panjang sejalan dengan bertambahnya usia harapan hidup, tetapi juga produktif, cerdas dan berdaya saing. Penduduk dengan kualitas seperti itu diharapkan dapat mengatasi arus pasar global yang semakin menguat.

Kuantitas penduduk seperti jumlah dan pertumbuhan penduduk, kepadatan dan persebaran penduduk, komposisi penduduk menurut usia, jenis kelamin, pendidikan, status, dan lainnya telah dibahas dalam bab sebelumnya. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pengendalian kuantitas penduduk namun juga harus mengedepankan aspek kualitas penduduk sebagai tujuan utama pembangunan kependudukan. Dengan kata lain, kebijakan pembangunan

kependudukan yang terarah dan terencana senantiasa berupaya melakukan pengendalian jumlah dan perkembangan penduduk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penertiban dokumen kependudukan. Harapan akhir adalah tercipta penduduk yang berkualitas dan tersebar secara merata di seluruh wilayah serta mampu menikmati hasil-hasil pembangunan secara berkeadilan.

Penduduk dari segi kualitas sangat menentukan kemajuan suatu wilayah. Penduduk yang besar apabila tidak disertai dengan kualitas yang baik tidak akan menjadi kekuatan namun justru akan menjadi beban bagi wilayah. Kualitas penduduk dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial dan situasi mobilitas. Pada bab ini akan dibahas penduduk dilihat dari kualitasnya di Kabupaten Sleman. Pembahasan pada bab ini dibatasi pada permasalahan kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan.

4.2.1 Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat dengan menyediakan fasilitas kesehatan, penyediaan air bersih hingga pemberian penyuluhan kesehatan kepada masyarakat untuk memberi layanan asuransi kesehatan (BPJS dan lain-lain).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang biasa disebut dengan SDG's adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Untuk mencapai kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2035 ditetapkan 13 target yang diukur melalui 50 indikator. Target-target tersebut terdiri dari penurunan kematian ibu dan bayi, mengurangi kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, pencegahan penyalahgunaan zat, menjamin akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi, meningkatkan cakupan kesehatan universal, penguatan pelaksanaan pengendalian tembakau (tobacco control), pengembangan dan penelitian vaksin dan obat, serta peningkatan pembiayaan kesehatan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target- target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh

pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Secara nasional MDG's yang dicapai pada tahun 2015 masih menyisakan persoalan yaitu permasalahan yang belum tuntas ditangani, seperti upaya penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), pengendalian penyakit HIV/AIDS, dan malaria, terdapat hal-hal baru yang menjadi perhatiannya. Hal-hal tersebut, di antaranya yakni kematian akibat penyakit tidak menular (PTM); penyalahgunaan narkoba dan alkohol; kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas; asuransi kesehatan umum; dan kontaminasi dan polusi air, udara, dan tanah; serta penanganan krisis dan kegawatdaruratan. Bagaimana dengan Kabupaten Sleman yang memiliki indeks pembangunan manusia dengan indikator angka harapan hidup tertinggi di Indonesia.

Indikator yang digunakan untuk menilai kualitas penduduk dari aspek kesehatan adalah kelahiran dan kematian. Kedua indikator ini mempengaruhi perubahan jumlah dan struktur penduduk.

4.2.1.1 Rasio Anak Perempuan

Rasio anak perempuan (*Child Woman Ratio/CWR*) adalah rasio antara jumlah anak dibawah umur 5 tahun dibagi jumlah penduduk perempuan usia reroduksi (15-49) tahun. CWR didapatkan dari jumlah anak umur di bawah 5 tahun dibagi jumlah perempuan usia produktif dikalikan konstanta 1000. Jumlah anak yang berusia dibawah 5 tahun di Kabupaten Sleman berjumlah 65.200 jiwa, sedangkan jumlah perempuan usia subur 15-49 tahun berjumlah 282.400 jiwa. Secara keseluruhan CWR di Kabupaten Sleman berjumlah 23,09.

Kapanewon dengan jumlah CWR tertinggi ada di Cangkringan sebesar 26,30, dan Seyegan 24,29. Sedangkan kapanewon dengan jumlah CWR terendah ada di Minggir dengan jumlah 21,6 dan Moyudan dengan jumlah 22,14. Adapun detail jumlah CWR menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 21 Rasio Anak Perempuan Menurut Kecamatan Tahun 2023

Kapanewon	Jumlah Anak <5 Tahun	Jumlah Perempuan 15-49 Tahun	Rasio Anak Perempuan (Child Woman Ratio (CWR))
Gamping	5.586	24.784	22,54
Godean	4.044	17.947	22,53
Moyudan	1.779	8.035	22,14
Minggir	1.671	7.733	21,61
Seyegan	3.173	13.061	24,29
Mlati	5.517	24.335	22,67
Depok	7.312	32.691	22,37
Berbah	3.393	14.849	22,85
Prambanan	3.360	13.945	24,09
Kalasan	5.143	22.472	22,89
Ngemplak	3.988	16.706	23,87
Ngaglik	6.152	26.679	23,06
Sleman	4.251	18.239	23,31
Tempel	3.189	13.729	23,23
Turi	2.300	9.524	24,15
Pakem	2.239	9.674	23,14
Cangkringan	2.103	7.997	26,30
Kabupaten Sleman	65.200	282.400	23,09

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2023

4.2.1.2 Angka Kematian Bayi

Kematian atau mortalitas adalah salah satu dari tiga komponen proses demografi yang berpengaruh terhadap jumlah, struktur dan komposisi penduduk. Dua komponen proses demografi lainnya adalah kelahiran (fertilitas), dan mobilitas penduduk. Tinggi rendahnya tingkat mortalitas penduduk di suatu daerah tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan barometer dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan masyarakat di daerah tersebut (Mantra, 2003). Yang dimaksud dengan mati ialah peristiwa hilangnya tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup (Budi Utomo, 1985). Dari definisi ini terlihat bahwa keadaan “mati” hanya bisa terjadi kalau sudah terjadi kelahiran hidup. Dengan demikian keadaan mati selalu didahului oleh keadaan hidup. Dengan kata lain, mati tidak pernah ada kalau tidak ada kehidupan. Sedangkan hidup selalu dimulai dengan lahir hidup (*live birth*).

Pengaruh mortalitas adalah mengurangi jumlah penduduk suatu daerah. Peristiwa kematian dapat terjadi pada semua penduduk baik laki-laki, perempuan, usia bayi, usia anak, usia dewasa dan tua. Besar kecilnya mortalitas menurut karakteristik tersebut beragam. Keragaman tersebut menyebabkan perubahan dalam struktur umur penduduk suatu wilayah ataupun komposisi penduduk menurut jenis kelamin (Sumantri dan Anwar, 1995). Berbeda dengan fertilitas dan migrasi yang dapat berulang kali terjadi dalam sepanjang hidupnya. Tetapi mortalitas hanya sekali terjadi serangkaian peristiwa penyakit atau kesakitan atau morbiditas.

Angka kematian bayi (*Infant Mortality Rate = IMR*) menunjukkan jumlah bayi yang meninggal selama setahun untuk 1000 kelahiran. Angka atau tingkat kematian bayi merupakan ukuran kematian yang mengacu pada jumlah bayi yang meninggal dari bayi yang lahir hidup. Bayi lahir hidup yang dimaksud adalah janin yang keluar dari rahim ibu dan menunjukkan tanda-tanda kehidupan meskipun hanya sekejap. Bayi didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 0 tahun atau belum mencapai ulang tahun yang pertama.

Terdapat variasi tingkat kematian bayi antara negara berkembang dan negara maju. Pada negara-negara berkembang, tingkat kematian bayi bisa mencapai 200 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan di negara-negara maju angka tersebut bisa di bawah 15 per 1000 kelahiran (Budi Utomo, 1983). Demikian juga terdapat variasi angka kematian bayi di dalam suatu negara, misalnya antara daerah geografi yang satu dengan lainnya, antara kota dengan desa, antara berbagai golongan sosial ekonomi penduduk. Di samping itu angka kematian bayi pada suatu tempat juga bervariasi menurut waktu.

Angka kematian bayi merupakan indikator yang sangat berguna, tidak saja terhadap status kesehatan anak, tetapi juga terhadap status penduduk keseluruhan dan kondisi ekonomi di mana penduduk tersebut bertempat tinggal. Angka kematian bayi tidak hanya merefleksikan besarnya masalah kesehatan yang bertanggung jawab langsung terhadap kematian bayi, seperti diare, infeksi saluran pernafasan, salah gizi, penyakit- penyakit infeksi spesifik dan kondisi prenatal, tetapi juga merefleksikan tingkat kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan dan secara umum tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Baik di negara maju, maupun di negara

yang sedang berkembang, terdapat hubungan yang terbalik antara tingkat kematian bayidengan status ekonomi orang tua.

Angka kematian bayi juga telah menunjukkan fungsinya sebagai indikator ampuh dalam menilai perubahan kondisi kesehatan di suatu negara. Berbeda dengan - negara-negara di mana angka kematian bayi telah dihitung selama periode yang lama, terlihat reduksi angka kematian bayi sejajar dengan perbaikan standar hidup dan kondisi sanitasi termasuk juga kemudahan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat.

Angka kematian bayi Kabupaten Sleman telah berada pada angka yang sangat rendah, sebagaimana terjadi di negara maju, yakni pada angka di bawah 10 kematian dari 1000 kelahiran hidup. Berdasarkan tabel 4.22 berikut terlihat angka kematian bayi di Kabupaten Sleman sangat rendah yaitu 4 (empat) orang per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi berada di bawah 5 (lima) yang telah dicapai sejak tahun 2012, hanya dicapai oleh negara maju di Eropa dan Amerika. Terdapat kecamatan di Kabupaten Sleman yang melaporkan tidak memiliki kasus kematian bayi, yaitu di Kecamatan Godean, Moyudan, Minggir, berbah dan Sleman. Kecamatan Cangkringan, Ngemplak dan Turi merupakan tiga kecamatan dengan angka kematian bayi tertinggi di Kabupaten Sleman hingga melebihi angka kematian bayi nasional yang menyentuh angka 16 per 1.000 kelahiran hidup.

Angka kematian bayi laki-laki kurang lebih sama dengan kematian bayi perempuan, berkisar 4 orang per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi laki-laki lebih tinggi (5orang per 1.000 kelahiran hidup) dibandingkan kematian bayi perempuan (3 orang per 1.000 kelahiran hidup). Meskipun angka kematian bayi di Kabupaten Sleman dan disetiap kapanewon relatif rendah, namun merujuk tujuan kesehatan SDG's adalah kesehatan bagi semua umur, maka kondisi ini perlu diperhatikan. Angka kematian bayi di Kabupaten Sleman lebih disebabkan karena BBLR. Posisi di Kabupaten Sleman sudah mencapai "hardcore" atau angka kematian yang sangat rendah. Namun upaya cakupan pelayanan kesehatan yang disertai dengan peningkatan mutu pelayanan, sistem rujukan yang optimal, serta peningkatan kompetensi sumberdaya manusia pelayanan neonatal dan bayi harus tetap dilakukan dalam upaya menekan angka kematian bayi.

**Tabel 4. 22 Distribusi Angka Kematian Bayi menurut Kapanewon
di Kabupaten Sleman Tahun 2023**

No.	Kapanewon	Jumlah Kelahiran Hidup			Jumlah Kematian Bayi			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	TOTAL
1.	Gamping	539	519	1.058	7	3	10	13,0	5,8	9,5
2.	Godean	455	432	887	2	-	2	4,4	0,0	2,3
3.	Moyudan	144	128	272	1	1	2	6,9	7,8	7,4
4.	Minggir	140	147	287	1	1	2	7,1	6,8	7,0
5.	Seyegan	220	246	466	4	1	5	18,2	4,1	10,7
6.	Mlati	571	526	1.097	2	3	5	3,5	5,7	4,6
7.	Depok	726	733	1.459	5	3	8	6,9	4,1	5,5
8.	Berbah	310	373	683	1	-	1	3,2	0,0	1,5
9.	Prambanan	332	332	664	1	2	3	3,0	6,0	4,5
10.	Kalasan	395	399	794	6	1	7	15,2	2,5	8,8
11.	Ngemplak	392	348	740	2	1	3	5,1	2,9	4,1
12.	Ngaglik	538	545	1.083	5	2	7	9,3	3,7	6,5
13.	Sleman	390	406	796	2	3	5	5,1	7,4	6,3
14.	Tempel	280	288	568	1	-	1	3,6	0,0	1,8
15.	Turi	229	217	446	1	2	3	4,4	9,2	6,7
16.	Pakem	188	181	369	-	-	-	0,0	0,0	0,0
17.	Cangkringan	161	158	319	3	1	4	18,6	6,3	12,5
KABUPATEN SLEMAN		6.010	5.978	11.988	44	24	68	7,3	4,0	5,7

Sumber: Dinas Kesehatan Sleman, 2023

Angka kematian bayi dalam pembahasan ini dibedakan menjadi dua yaitu angka kematian neonatal dan angka kematian post neonatal. Angka kematian neonatal merupakan kematian bayi sebelum berumur satu bulan tetapi kurang dari satu tahun, sedangkan yang dimaksud dengan kematian lepas baru lahir atau post neo natal death merupakan kematian bayi setelah berumur satu bulan tetapi kurang dari satu tahun.

**Tabel 4. 23 Distribusi Kematian Neonatal menurut Kapanewon
di Kabupaten Sleman Tahun 2023**

No.	Kecamatan	Jumlah Kelahiran Hidup			Jumlah Kematian Bayi			Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	TOTAL

1.	Gamping	539	519	1.058	6	1	7	11,13	1,93	6,62
2.	Godean	455	432	887	2	0	2	4,40	-	2,25
3.	Moyudan	144	128	272	0	1	1	-	7,81	3,68
4.	Minggir	140	147	287	0	1	1	-	6,80	3,48
5.	Seyegan	220	246	466	4	1	5	18,18	4,07	10,73
6.	Mlati	571	526	1.097	1	1	2	1,75	1,90	1,82
7.	Depok	726	733	1.459	3	2	5	4,13	2,73	3,43
8.	Berbah	310	373	683	0	0	0	-	-	-
9.	Prambanan	332	332	664	1	2	3	3,01	6,02	4,52
10.	Kalasan	395	399	794	6	1	7	15,19	2,51	8,82
11.	Ngemplak	392	348	740	2	1	3	5,10	2,87	4,05
12.	Ngaglik	538	545	1.083	5	0	5	9,29	-	4,62
13.	Sleman	390	406	796	2	2	4	5,13	4,93	5,03
14.	Tempel	280	288	568	1	0	1	3,57	-	1,76
15.	Turi	229	217	446	0	0	0	-	-	-
16.	Pakem	188	181	369	0	0	0	-	-	-
17.	Cangkringan	161	158	319	3	1	4	18,63	6,33	12,54
KABUPATEN SLEMAN		6.010	5.978	11.988	36	14	50	5,99	2,34	4,17

Sumber: Dinas Kesehatan Sleman, 2023

Kematian neonatal pada umumnya dikarenakan asfiksia atau kekurangan oksigen sebelum, selama, dan setelah proses persalinan. Tanpa asupan oksigen yang cukup, jaringan dan organ tubuh bayi akan mengalami kerusakan. Kondisi ini membutuhkan penanganan medis segera, karena semakin lama bayi tidak mendapatkan cukup oksigen, akan semakin besar pula risikonya mengalami kerusakan pada organ, seperti paru-paru, jantung, otak, dan ginjal. Penting bagi ibu hamil untuk rutin menjalani pemeriksaan kehamilan dengan USG agar kondisi kesehatan janin dapat terpantau dengan baik, mengonsumsi makanan bernutrisi selama hamil.

Tabel 4. 24 Distribusi Kematian *Post-Neonatal* menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Kelahiran Hidup			Jumlah Kematian Bayi			Angka Kematian Pos Neonatal per 1000 kelahiran hidup		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	TOTAL
1.	Gamping	539	519	1.058	1	2	3	1,86	3,85	2,84
2.	Godean	455	432	887	-	-	-	0,00	0,00	0,00
3.	Moyudan	144	128	272	1	-	1	6,94	0,00	3,68
4.	Minggir	140	147	287	1	-	1	7,14	0,00	3,48
5.	Seyegan	220	246	466	-	-	-	0,00	0,00	0,00
6.	Mlati	571	526	1.097	1	2	3	1,75	3,80	2,73
7.	Depok	726	733	1.459	2	1	3	2,75	1,36	2,06
8.	Berbah	310	373	683	1	-	1	3,23	0,00	1,46
9.	Prambanan	332	332	664	-	-	-	0,00	0,00	0,00
10.	Kalasan	395	399	794	-	-	-	0,00	0,00	0,00
11.	Ngemplak	392	348	740	-	-	-	0,00	0,00	0,00
12.	Ngaglik	538	545	1.083	-	2	2	0,00	3,67	1,85
13.	Sleman	390	406	796	-	1	1	0,00	2,46	1,26
14.	Tempel	280	288	568	-	-	-	0,00	0,00	0,00
15.	Turi	229	217	446	1	2	3	4,37	9,22	6,73
16.	Pakem	188	181	369	-	-	-	0,00	0,00	0,00
17.	Cangkringan	161	158	319	-	-	-	0,00	0,00	0,00
KABUPATEN SLEMAN		6.010	5.978	11.988	8	10	18	1,33	1,67	1,50

Sumber: Dinas Kesehatan Sleman, 2023

Berdasarkan tabel 4.23 dan tabel 4.24 terlihat bahwa angka kematian bayi lebih banyak terjadi pada umur dibawah 1 bulan. Banyak sekali faktor yang dapat dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari segi penyebabnya, kematian bayi dibedakan menjadi dua jenis yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen adalah kematian bayi yang disebabkan oleh faktor-faktor anak yang dibawa sejak lahir, diwarisi oleh orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat dari ibunya selama kehamilan. Sedangkan kematian bayi eksogen adalah kematian bayi

yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar. Perbedaan antara kedua jenis penyebab kematian tersebut idealnya dapat dilakukan melalui data statistik penyebab kematian, tetapi dalam praktek tidak mudah karena masalah kualitas data (United Nations, 1973).

Dengan semakin meningkatnya usia, penyebab kematian endogen semakin berkurang dan penyebab kematian eksogen meningkat. Sementara semua kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan (*post neonatal*) merupakan kematian eksogen, maka kematian eksogen pada bayi sebelum usia satu bulan (neonatal) besarnya kira-kira 25 persen dari seluruh kematian bayi pada post neonatal (Bourgouis Pichat, 1952). Dengan kata lain, jumlah kematian eksogen pada bayi adalah 1,25 kali lipat dari kematian bayi pada periode post neonatal. Gambaran ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan luar berkontribusi besar sebagai penyebab kematian bayi. Kualitas lingkungan pada bentuk kondisi hygiene, sanitasi dan sosial ekonomi akan sangat menentukan terhadap tinggi- rendahnya kematian bayi.

Apabila kematian bayi tinggi, maka rasio kematian bayi post neonatal terhadap kematian bayi neonatal adalah juga tinggi. Rasio ini menurun dengan semakin rendahnya kematian bayi yang sampai pada suatu saat dengan terkontrolnya faktor lingkungan luar, porsi kematian neonatal menjadi lebih dominan. Pada keadaan ini, kematian bayi lebih banyak disebabkan faktor endogen, yang pengontrolannya memerlukan kemampuan untuk menembus pengetahuan tentang masalah-masalah biologi yang lebih mendasar (Keyfitz, 1977). Di Indonesia dan di banyak negara berkembang lainnya, keadaan tersebut masih jauh dari jangkauan.

4.2.1.3 Angka Kematian Anak dan Balita

Angka kematian anak (*Child Mortality Rate = CMR*) didefinisikan sebagai jumlah kematian anak berumur 1-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun. Dengan demikian angka kematian anak tidak menyertakan angka kematian bayi. Parameter CMR ini banyak digunakan sebagai indikator keadaan kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan yang dimaksud adalah air bersih, kebersihan lingkungan tempat tinggal dan perumahan. Sanitasi udara dan kelembaban dan faktor lainnya yang berkaitan dengan tingginya

prevalensi penyakit menular, gizi buruk akibat pola makan yang tidak betul. Jadi CMR lebih ditunjukkan pada faktor yang mempengaruhi kematian di luar faktor ibu yaitu keadaan lingkungan. Berbeda dengan IMR yang berhubungan dengan keadaan ibu seperti keadaan gizi ibu sebelum kehamilan, pemantauan atau pemeriksaan kehamilan dan penolong kelahiran, pemberian air susu ibu serta makanan tambahan hingga akan mencapai usia kurang dari satu tahun.

Dibandingkan dengan angka kematian bayi, angka kematian anak lebih merefleksikan kondisi kesehatan lingkungan yang langsung mempengaruhi tingkat kesehatan anak. Angka ini tinggi pada keadaan salah gizi, hygiene buruk, tingginya prevalensi penyakit menular pada anak dan insiden kecelakaan di dalam atau di sekitar rumah. Dalam menunjukkan kemiskinan, indikator ini lebih unggul dibandingkan dengan tingkat kematian bayi.

Sementara itu, tingkat kematian anak balita didefinisikan sebagai jumlah kematian anak usia dibawah lima tahun selama satu tahun per 1000 anak usia yang sama (0-4) tahun pada pertengahan tahun. Angka ini sekaligus merefleksikan tinggi rendahnya angka kematian bayi dan angka kematian anak. Hanya dengan menggunakan angka kematian bayi belum cukup untuk menggambarkan tingkat kematian anak pada umur di atas satu tahun. Dua penduduk dengan tingkat kematian bayi yang sama, belum tentu sama dalam hal angka kematian anak di atas satu tahun. Variasi angka ini, di negara berkembang dapat lebih tinggi dari 100, tetapi di negara maju dapat lebih rendah dari 2 (dua).

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kesempatan anak Indonesia untuk hidup sehat, tumbuh, dan berkembang secara optimal menjadi semakin terbuka. Dalam undang-undang itu dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual, dan sosial.

Tabel 4.25 menggambarkan bahwa beberapa wilayah kapanewon tidak memiliki angka kematian anak (Godean, Moyudan, Seyegan, Mlati, Berbah, Prambanan, Kalasan, Ngemplak, Ngaglik, Sleman, Tempel, Pakem, Cangkringan) namun masih ada beberapa kapanewon (Gamping, Minggir, Depok, dan Turi) yang memiliki angka kematian anak dan untuk Minggir dan Turi melebihi angka kematian anak tingkat

kabupaten. Jika merujuk pada amanah pembangunan keberlanjutan bidang kesehatan, upaya meningkatkan derajat kesehatan anak masih perlu diusahakan meskipun sangat susah untuk menurunkan di angka yang sudah rendah.

Tabel 4. 25 Distribusi Angka Kematian Anak menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2023

No.	Kapanewon	Penduduk Usia 0 – 4 tahun			Jumlah Kematian Anak			Angka Kematian Anak		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	TOTAL
1.	Gamping	2.572	2.384	4.956	1	1	2	0,35	0,39	0,42
2.	Godean	1.897	1.725	3.622	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Moyudan	828	777	1.605	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Minggir	757	749	1.506	0	1	1	0	0,00	1,34
5.	Seyegan	1.504	1.327	2.831	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Mlati	2.519	2.399	4.918	0	0	0	0,17	0,00	0,00
7.	Depok	3.393	3.103	6.496	1	2	3	0	0,29	0,64
8.	Berbah	1.550	1.456	3.006	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Prambanan	1.537	1.448	2.985	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Kalasan	2.356	2.218	4.574	2	0	2	0	0,85	0,00
11.	Ngemplak	1.890	1.659	3.549	2	0	2	1,22	1,06	0,00
12.	Ngaglik	2.841	2.650	5.491	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Sleman	1.964	1.858	3.822	1	0	1	0,46	0,51	0,00
14.	Tempel	1.404	1.444	2.848	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Turi	1.045	997	2.042	0	1	1	0	0,00	1,00
16.	Pakem	1.016	968	1.984	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Cangkringan	967	899	1.866	0	0	0	0	0,00	0,00
KABUPATEN SLEMAN		30.040	28.061	58.101	7	5	12	0,15	0,23	0,18

Sumber: Dinas Kesehatan Sleman, 2023

Berbeda dengan angka kematian anak, angka kematian balita terlihat lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena angka kematian balita mengikutkan kelompok 0 tahun dalam perhitungannya. Sementara itu diketahui bahwa angka kematian 0 tahun atau angka kematian bayi mendominasi dalam perhitungan angka kematian balita. Artinya kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman dapat memfokuskan pada faktor endogen atau biomedical meskipun tetap memperhatikan faktor eksogen yaitu sosial ekonomi, lingkungan, pelayanan kesehatan, dan kependudukan.

**Tabel 4. 26 Distribusi Angka Kematian Balita menurut Kapanewon
di Kabupaten Sleman Tahun 2023**

No.	Kapanewon	Penduduk Usia 0 – 4 tahun			Jumlah Kematian Anak			Angka Kematian Anak		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	TOTAL
1.	Gamping	2.572	2.384	4.956	8	4	12	3,11	1,68	2,42
2.	Godean	1.897	1.725	3.622	2	-	2	1,05	0,00	0,55
3.	Moyudan	828	777	1.605	1	1	2	1,21	1,29	1,25
4.	Minggir	757	749	1.506	1	2	3	1,32	2,67	1,99
5.	Seyegan	1.504	1.327	2.831	4	1	5	2,66	0,75	1,77
6.	Mlati	2.519	2.399	4.918	2	3	5	0,79	1,25	1,02
7.	Depok	3.393	3.103	6.496	6	5	11	1,77	1,61	1,69
8.	Berbah	1.550	1.456	3.006	1	-	1	0,65	0,00	0,33
9.	Prambanan	1.537	1.448	2.985	1	2	3	0,65	1,38	1,01
10.	Kalasan	2.356	2.218	4.574	8	1	9	3,40	0,45	1,97
11.	Ngemplak	1.890	1.659	3.549	4	1	5	2,12	0,60	1,41
12.	Ngaglik	2.841	2.650	5.491	5	2	7	1,76	0,75	1,27
13.	Sleman	1.964	1.858	3.822	3	3	6	1,53	1,61	1,57
14.	Tempel	1.404	1.444	2.848	1	-	1	0,71	0,00	0,35
15.	Turi	1.045	997	2.042	1	3	4	0,96	3,01	1,96
16.	Pakem	1.016	968	1.984	-	-	-	0,00	0,00	-
17.	Cangkringan	967	899	1.866	3	1	4	3,10	1,11	2,14
KABUPATEN SLEMAN		30.040	28.061	58.101	51	29	80	1,70	1,03	1,38

Sumber: Dinas Kesehatan Sleman, 2023

Sinkronisasi dan koordinasi program-program antar instansi dan antara pemerintah dan swasta dan lembaga swadaya yang melibatkan peran aktif masyarakat perlu ditingkatkan. Dengan memperhatikan beragamnya faktor-faktor yang menjadi penyebab kematian bayi, anak dan balita, maka kontribusi berbagai sektor dalam mendukung upaya mencapai derajat kesehatan anak sangat diperlukan. Kontribusi ini harus diformulasikan sebagai kebijakan kesehatan anak yang menyeluruh dengan strategi-strategi khusus bagi berbagai tingkat penyedia pelayanan dan berbagai grup sasaran.

4.2.1.4 Angka Kematian Ibu

Angka kematian maternal (*Maternal Mortality Rate = MMR*) menunjukkan jumlah ibu yang meninggal dalam proses melahirkan selama satu tahun terhadap jumlah ibu seluruhnya. Yang dimaksud jumlah ibu meninggal adalah selama dalam kehamilan dan atau dalam proses melahirkan. Ibu hamil yang meninggal karena kecelakaan, bunuh diri atau hal-hal yang lain yang tidak ada hubungannya dengan kehamilan dan proses melahirkan tidak dimasukkan dalam perhitungan ini. Oleh sebab itu ukuran ini dinyatakan per 100.000 ibu dan bukan per 1000 ibu karena jumlah kasus dalam setahun relatif kecil.

Menurut Sumantri dan Anwar (1995) kematian maternal merupakan kejadian yang jarang terjadi (Rare Event) maka dinyatakan per 100.000 ibu. Namun demikian banyak digunakan sebagai indikator keberhasilan pengelolaan upaya peningkatan kesehatan, khususnya kesehatan ibu. Menurut WHO (1988) risiko kematian ibu selama hidupnya karena kehamilan atau persalinan adalah 1 per 14 sampai 1 per 50 untuk negara berkembang dibandingkan 1 per 4000 sampai 1 per 10000 di negara maju. Perbedaan angka kematian maternal antara negara maju dan negara sedang berkembang merupakan disparitas antar negara. Masalah-masalah yang menjadi penyebab angka kematian ibu menurut WHO, yaitu pendarahan postpartum (setelah melahirkan). Pendarahan secara berlebihan setelah melahirkan yang menyebabkan ibu kehilangan banyak darah. Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar, penyebab yang kedua adalah hipertensi. Perawatan dan pemeriksaan prenatal bisa mendeteksi dan menangani masalah, seperti halnya tekanan darah tinggi dan protein dalam urine. Ibu tanpa perawatan yang tepat, akan berkembang menjadi preeklampsia yang menyebabkan kematian jika sudah terlampaui parah. Gangguan hipertensi menjadi salah satu penyebab tertinggi kematian ibu terkait dengan kehamilan. Penyebab yang ketiga adalah infeksi. Wanita bisa mengalami infeksi akibat aborsi yang tidak aman, persalinan yang tidak sehat, ataupun persalinan yang sangat lama. Selain itu, kurangnya pemahaman dan informasi mengenai cara membersihkan areaewanitaan ataupun perawatan tubuh setelah melahirkan, dapat membuat ibu berisiko terkena infeksi. Jika infeksi ini tidak mendapat penanganan yang tepat maka

kematian ibu bisa saja terjadi.

Tabel 4. 27 Distribusi Angka Kematian Ibu menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Kelahiran Hidup			Jumlah Kematian Ibu				Angka Kematian Ibu
		L	P	Jumlah	Hamil	Bersalin	Nifas	Jumlah	
1.	Gamping	539	519	1.058	0	0	0	0	-
2.	Godean	455	432	887	2	0	0	2	225,48
3.	Moyudan	144	128	272	0	0	0	0	-
4.	Minggir	140	147	287	0	0	0	0	-
5.	Seyegan	220	246	466	0	0	0	0	-
6.	Mlati	571	526	1.097	0	0	0	0	-
7.	Depok	726	733	1.459	0	0	0	0	-
8.	Berbah	310	373	683	1	1	0	2	292,83
9.	Prambanan	332	332	664	0	0	0	0	-
10.	Kalasan	395	399	794	0	0	0	0	-
11.	Ngemplak	392	348	740	0	0	0	0	-
12.	Ngaglik	538	545	1.083	0	0	0	0	-
13.	Sleman	390	406	796	0	0	0	0	-
14.	Tempel	280	288	568	0	1	1	2	352,11
15.	Turi	229	217	446	0	0	0	0	-
16.	Pakem	188	181	369	1	0	0	1	271,00
17.	Cangkringan	161	158	319	0	0	0	0	-
KABUPATEN SLEMAN		6.010	5.978	11.988	4	2	1	7	58,39

Sumber: Dinas Kesehatan Sleman, 2023

Tabel 4.27. menunjukkan bahwa angka kematian ibu di Kabupaten Sleman berjumlah 58 sampai 59 setiap 10.000 ibu yang melakukan persalinan. Beberapa kecamatan di Kabupaten Sleman tidak memiliki kasus angka kematian ibu karena melahirkan, namun kapanewon yang memiliki kasus kematian ibu terbaca per 1.000 ibu yang melakukan persalinan.

Kapanewon Godean, Prambanan, Tempel dan Pakem Sleman memiliki kasus 2 orang dan 1 orang ibu yang mengalami kematian ibu karena melahirkan atau terdapat 2 sampai 3 ibu setiap 1000 ibu yang melakukan persalinan. Angka tersebut sangatlah rendah, namun tujuan pembangunan kesehatan berkelanjutan adalah zero accident. Secara keseluruhan dalam penjabaran tentang angka kematian, dapat disimpulkan bahwa derajat kesehatan penduduk Kabupaten Sleman

sangatlah baik. Upaya yang harus dilakukan adalah mempertahankan angka yang sudah terlalu rendah dan diusahakan mencapai titik nol. Visi Kemenkes adalah mewujudkan masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong akan terwujud dengan memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Memberdayakan masyarakat dan mengutamakan pembangunan kesehatan dan meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu sumberdaya kesehatan.

4.2.1.5 Fertilitas

Fertilitas merupakan salah satu proses demografi yang akan mempengaruhi jumlah dan pertumbuhan penduduk. Menurut Shryock dan Siegel (1976) istilah fertilitas adalah sama dengan kelahiran hidup (live birth), yaitu bayi yang dilahirkan dengan tanda-tanda kehidupan, misalnya menangis, bergerak-gerak, dan jantung berdenyut. Bilamana pada saat dilahirkan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan disebut dengan lahir mati (still birth). Dalam studi kependudukan lahir mati tidak dianggap atau tidak dihitung sebagai suatu peristiwa kelahiran. Dengan demikian, pengukuran fertilitas hanya didasarkan pada peristiwa lahir hidup dan lahir mati tidak diikutkan dalam perhitungan.

Pengukuran fertilitas lebih kompleks dari pada mortalitas, karena perempuan maupun laki-laki hanya akan meninggal satu kali saja, akan tetapi perempuan tersebut dapat melahirkan lebih dari satu kali. Risiko meninggal hanya sekali peristiwa terjadi pada hari atau waktu tertentu saja, yang telah meninggal tidak akan meninggal lagi. Sebaliknya seorang perempuan yang telah melahirkan seorang anak tidak berarti tidak ada risiko untuk melahirkan lagi. Kompleksitas pengukuran fertilitas karena melibatkan dua orang (suami-istri), sedangkan mortalitas hanya melibatkan satu orang yang meninggal.

Fertilitas dalam kajian ini dihitung berdasarkan data registrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman. Perhitungan fertilitas yang paling mendasar adalah angka kelahiran kasar. Berdasarkan tabel 4.28 berikut ini menunjukkan bahwa setiap 1000 penduduk di Kabupaten Sleman terdapat 12 sampai 13 kelahiran.

Angka kelahiran kasar (*Crude Birth Rate*) tertinggi di Kapanewon Prambanan, Godean dan Berbah.

Tabel 4. 28 Distribusi Parameter Kelahiran di Kabupaten Sleman Tahun 2023

Kapanewon	CBR	GFR
Gamping	11,06	42,95
Godean	12,41	49,71
Moyudan	8,04	33,99
Minggir	8,79	37,04
Seyegan	8,90	35,71
Mlati	11,63	45,42
Depok	11,68	44,87
Berbah	12,00	46,32
Prambanan	12,09	47,78
Kalasan	9,23	35,55
Ngemplak	11,40	44,69
Ngaglik	10,64	40,80
Sleman	11,14	43,85
Tempel	10,32	41,39
Turi	11,71	47,05
Pakem	9,49	38,33
Cangkringan	9,92	39,88
KABUPATEN SLEMAN	10,84	42,66

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Dinkes, 2023

Rendahnya angka fertilitas ini juga terlihat dari angka kelahiran umum atau sering disebut dengan GFR (*Gross Fertility Rate*). GFR merupakan jumlah kelahiran per 1000 perempuan umur 15-49 tahun. Berdasarkan tabel parameter fertilitas terlihat bahwa setiap 1000 perempuan umur 15-49 tahun terdapat 48 kelahiran hidup. Distribusi GFR tidak pernah diatas 60 dan dibawah 40.

Ukuran fertilitas yang lain adalah rasio anak dengan jumlah perempuan 15-49 tahun. Berdasarkan tabel 4.28 di atas menunjukkan bahwa setiap 100 perempuan umur 15-

49 tahun terdapat 24 atau 25 anak. Rasio anak dan perempuan umur 15-49 tahun terendah di Kapanewon Minggir yaitu sebesar 21,61.

Kebijakan pengaturan jumlah kelahiran penduduk dengan keluarga berencana telah dijalankan di DIY termasuk Kabupaten Sleman sudah dimulai sejak awal program KB digulirkan. Kabupaten Sleman termasuk dalam kategori wilayah Jawa-Bali I yaitu sejak awal program KB sudah menjalankannya. Indonesia telah melakukan upaya pengendalian angka kelahiran melalui Program Keluarga Berencana (KB) sejak era 1970-an. Program KB telah berhasil menurunkan jumlah anak per satu perempuan hampir setengahnya dalam waktu yang relatif singkat. Program KB di Indonesia menjadi salah satu program family planning terbaik di dunia dan merupakan program perencanaan keluarga berbasis komunitas terbesar di dunia. Dampak positif program KB secara nyata telah dirasakan. Beberapa studi menunjukkan bahwa pelaksanaan program KB memberikan dampak positif pada tiga hal pokok, yaitu: (1) Secara umum, meningkatkan investasi peningkatan kualitas sumber daya manusia karena beban penduduk muda menjadi berkurang; (2) Secara khusus, meningkatkan kualitas hidup perempuan, keluarga dan masyarakat, dan (3) Meningkatkan produktivitas ekonomi yang tercermin dari peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Program KB secara tidak langsung juga telah berhasil memperbaiki tingkat kesehatan dengan menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBa).

Program KB sangat berdampak secara signifikan menurunkan tingkat fertilitas di Kabupaten Sleman. Berdasarkan Tabel 4.28 dapat diketahui tingkat fertilitas di Kabupaten Sleman sudah sangat rendah meskipun di beberapa kecamatan terdapat nilai di atas kabupaten. Tingkat fertilitas di Kabupaten Sleman juga berada pada titik yang sangat rendah sehingga upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah mempertahankan nilai tersebut, dan seandainya memungkinkan ditingkatkan menjadi 2,1 untuk total fertilitasnya. Kebijakan mempertahankan nilai fertilitas lebih sulit dibandingkan dengan upaya menurunkannya karena fertilitas sangat dipengaruhi oleh faktor individu.

Tabel 4. 29 Rasio Anak dan Perempuan di Kabupaten Sleman Tahun 2023

Kapanewon	Jumlah Anak <5 Tahun	Jumlah Perempuan 15-49 Tahun	Rasio Anak Perempuan (<i>Child Woman Ratio</i> (CWR))
Gamping	5.586	24.784	22,54
Godean	4.044	17.947	22,53
Moyudan	1.779	8.035	22,14
Minggir	1.671	7.733	21,61
Seyegan	3.173	13.061	24,29
Mlati	5.517	24.335	22,67
Depok	7.312	32.691	22,37
Berbah	3.393	14.849	22,85
Prambanan	3.360	13.945	24,09
Kalasan	5.143	22.472	22,89
Ngemplak	3.988	16.706	23,87
Ngaglik	6.152	26.679	23,06
Sleman	4.251	18.239	23,31
Tempel	3.189	13.729	23,23
Turi	2.300	9.524	24,15
Pakem	2.239	9.674	23,14
Cangkringan	2.103	7.997	26,30
Kabupaten Sleman	65.200	282.400	23,09

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2023

Mengacu pada dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Sleman Tahun 2015-2035 dalam jangka panjang, kondisi kependudukan yang diinginkan dalam hal ini adalah kuantitas penduduk adalah tercapainya penduduk stabil dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Untuk mencapai kondisi ini jumlah bayi yang lahir diharapkan sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga penduduk menjadi stasioner. Indikator perncapaian penduduk tumbuh seimbang (PTS), adalah angka kelahiran total (TFR) sama dengan 2,1 per

perempuan atau Net Reproduction Rate (Angka Reproduksi Bersih=NRR) sebesar 1 per perempuan (Tukiran, 2010).

Pencapaian Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) merupakan harapan kondisi kependudukan setiap daerah baik pada level negara ataupun level yang lebih kecil. Kondisi tersebut ditandai dengan jumlah bayi yang lahir diharapkan sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga penduduk menjadi stasioner dan kondisinya terus stabil seperti itu (Iskandar, 1977; Swanson and Siegel, 2004; Tukiran, 2010). Capaian penduduk tumbuh seimbang juga ditandai dengan Rendahnya nilai TFR yang berada pada angka 2,1 dan NRR sebesar 1 (Tukiran, 2010). Dengan menggunakan indikator tersebut sebenarnya TFR dan NRR Kabupaten Sleman telah memenuhi target.

Kabupaten Sleman merupakan bagian dari DIY yang memiliki TFR yang sudah rendah. Meskipun demikian pada tahun 2035 Kabupaten Sleman tetap menargetkan TFR yang lebih rendah lagi yaitu sebesar 1,7. Salah satu aspek yang mendukung penurunan tersebut adalah adanya program keluarga berencana yang gencar diterapkan di Sleman. Seperti diketahui bahwa di negara-negara maju TFR yang rendah akan menciptakan kemajuan. Di negara maju TFR mencapai 1,5 per wanita atau bahkan nilai TFR nya lebih rendah dari 1 per wanita. Hal ini dikarenakan penduduk yang terus menurun akibat fertilitas yang sangat rendah akan mengakibatkan proporsi produktif sangat banyak. Dengan kondisi ini maka akan dapat tercipta bonus demografi (*demographic deviden*), yang muaranya adalah kondisi kesejahteraan akan terwujud.

4.2.1.6 Keluarga Berencana

Menurut Davis dan Blake (1956), ada 11 variabel yang termasuk dalam variabel antara (faktor langsung/intermediate variable) selain faktor tidak langsung (demografi, sosial, ekonomi, program, norma) yang mempengaruhi fertilitas, yaitu: umur pertama melakukan hubungan seksual, selibat permanen (tidak menikah), lamanya berstatus kawin, abstinensi sukarela, abstinensi terpaksa, frekuensi senggama, infekunditas sengaja, pemakaian kontrasepsi, infekunditas tidak disengaja dan mortalitas janin

disengaja. Persepsi atau norma masyarakat tentang keluarga berencana sangat mempengaruhi keputusan pasangan suami isteri dalam memutuskan menggunakan kontrasepsi.

Salah satu parameter keluarga berencana yaitu kepesertaan KB atau disebut juga dengan prevalensi kontrasepsi. Berdasarkan tabel 4.30 terlihat bahwa prevalensi kontrasepsi di Kabupaten Sleman sebesar 61,63 persen yang berarti setiap 100 Pasangan Usia Subur (PUS) maka 62 diantaranya menggunakan salah satu metode kontrasepsi. Metode kontrasepsi yang dimaksud adalah metode kontrasepsi modern baik yang bersifat jangka panjang maupun tidak.

Kapanewon Mlati dibandingkan dengan kapanewon lain di Kabupaten Sleman memiliki angka prevalensi kontrasepsi terendah yaitu 53,52 persen. Namun tingkat fertilitas di kapanewon Mlati sudah sangat rendah sehingga seyogyanya kebijakan kependudukan tidak diarahkan pada peningkatan peserta KB aktif namun lebih pada peningkatan kualitas metode kontrasepsi yang digunakan seperti pada penggunaan metode kontrasepsi mantap. Kebijakan ini juga relevan untuk wilayah kapanewon lain yang sudah memiliki tingkat prevalensi kontrasepsi tinggi.

Tabel 4.30 Parameter Keluarga Berencana menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2023

Kapanewon	Target	PUS	Metode Kontrasepsi								Persen Target (%)	Prevalensi/CPR (%)
			IUD	MOP	MOW	Implan	Suntik	Pil	Co	Jumlah		
1. Gamping	9.567	14.402	2.438	26	361	351	3.119	510	2.554	9.359	97,82	64,98
2. Godean	6.020	9.838	1.527	17	269	192	2.762	322	1.109	6.198	102,96	63,00
3. Moyudan	3.391	4.455	636	6	126	82	969	258	958	3.035	89,50	68,13
4. Minggir	2.952	4.126	707	3	152	108	995	159	835	2.959	100,25	71,72
5. Seyegan	4.122	7.435	1.017	15	193	216	2.573	371	720	5.105	123,83	68,66
6. Mlati	8.139	13.637	2.623	52	229	287	3.016	371	720	7.298	89,67	53,52
7. Depok	9.877	16.139	2.588	23	561	330	3.542	532	1.074	8.650	87,58	53,60
8. Berbah	4.527	8.866	1.776	6	262	155	2.210	359	407	5.175	114,31	58,37
9. Prambanan	5.078	8.301	1.357	6	233	532	2.670	386	589	5.773	113,69	69,55
10. Kalasan	6.612	13.297	2.103	28	430	353	3.542	462	687	7.605	115,02	57,19
11. Ngemplak	5.815	9.934	1.682	32	344	286	2.519	343	1.047	6.253	107,53	62,95
12. Ngaglik	8.443	15.210	2.394	43	406	393	3.882	532	1.277	8.927	105,74	58,69
13. Sleman	6.182	10.182	2.041	32	415	243	1.998	374	1.026	6.129	99,14	60,19
14. Tempel	6.011	8.361	1.596	29	292	268	2.263	361	981	5.790	96,33	69,25
15. Turi	3.712	5.388	976	48	212	257	1.116	134	557	3.300	88,90	61,25
16. Pakem	3.462	5.766	1.014	9	177	298	1.600	182	480	3.760	108,59	65,21
17. Cangkringan	2.564	5.070	614	4	137	443	2.016	204	123	3.541	138,12	69,84
Jumlah 2023	96.474	160.407	27.089	379	4.799	4.794	40.792	5.860	15.144	98.857	102,47	61,63

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & KB Kabupaten Sleman 2023

Melalui KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) program keluarga berencana yang mengatur norma keluarga kecil bahagia sejahtera dapat tertanam di masyarakat. Pasangan Usia Subur (PUS) sadar akan arti penting melakukan pengaturan dan pengendalian kelahiran melalui pemakaian alat kontrasepsi. Sebagian besar pasangan usia subur secara sukarela memilih menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah dan mengatur kehamilan. Jenis alat kontrasepsi meliputi pil, suntik, implant, IUD, MOW, MOW dan implant.

Jika kenyamanan dan keamanan menjadi alasan PUS menggunakan pelayanan swasta, maka pemerintah harus meningkatkan kualitas alat kontrasepsi yang diberikan pada masyarakat. Kusumaningrum (2009) menyatakan pengetahuan tentang alat kontrasepsi mempengaruhi pemilihan terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang akan digunakan.

Angriani (2019) lebih lanjut menyatakan alasan pemilihan alat kontrasepsi adalah manfaat, kenyamanan, kemudahan, dan biaya.

Kekhawatiran kegagalan, efek samping suatu jenis alat kontrasepsi terhadap kesehatan, larangan dari pasangan atau suami, ketidaknyamanan, biaya yang harus dikeluarkan, tidak ingin repot, hingga pengalaman subjektif bahwa selama ini tanpa alat kontrasepsi pun tidak terjadi kehamilan menyebabkan pasangan usia subur tidak bersedia menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka tidak menginginkan kehamilan. Kondisi seperti inilah yang disebut dengan *unmet need* atau kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi. *Unmet need* dapat disebabkan karena ketersediaan alat kontrasepsi tidak sesuai dengan yang diinginkan sehingga masyarakat berkeinginan menggunakan alat kontrasepsi atau alat kontrasepsi tersedia namun masyarakat khawatir akan efek samping alat kontrasepsi.

“*Unmet Need*” atau kebutuhan KB yang tidak terpenuhi dapat digunakan untuk mengetahui sampai seberapa jauh pelayanan program KB telah memenuhi keperluan mereka yang membutuhkan. Angka *unmet need* merupakan persentase wanita kawin yang sedang tidak memakai alat/cara KB dan tidak ingin punya anak lagi atau ingin menunda kelahiran berikutnya. Wanita yang memerlukan alat/cara KB untuk menjarangkan kelahiran tetapi tidak menggunakan alat/cara KB (*unmet need*)

for spacing) mencakup wanita hamil yang kandungannya tidak diinginkan (*unwanted pregnancy*) pada waktu itu, wanita yang belum mulai haid setelah melahirkan anak yang tidak diinginkan (*unwanted child*) pada waktu itu, dan wanita yang tidak sedang hamil atau sudah mulai haid setelah melahirkan yang tidak menggunakan alat/cara KB dan ingin menunda kelahiran anak berikutnya dua tahun atau lebih. Wanita yang memerlukan KB untuk membatasi kelahiran (*unmet need for limiting*) mencakup wanita hamil yang kehamilannya tidak diinginkan, wanita yang belum haid setelah melahirkan anak yang tidak diinginkan, dan wanita yang tidak hamil dan sudah mulai haid tetapi tidak memakai alat/cara KB namun tidak ingin anak lagi.

Terdapat tiga pendekatan dalam pengukuran kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi ini yaitu pendekatan istri, suami, dan pasangan. Pendekatan yang selama ini digunakan adalah pendekatan istri. Dalam konsep tersebut, perempuan menikah yang masih dalam usia subur, tetapi tidak menggunakan kontrasepsi dikatakan terpenuhi kebutuhannya, padahal perempuan tersebut sudah tidak ingin mempunyai anak lagi, atau bermaksud mengatur jarak kelahiran. Dalam perkembangannya pendekatan yang digunakan untuk mengukur kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi adalah pendekatan suami pendekatan pasangan. Dalam konsep ini memandang kebutuhan kontrasepsi tidak terbatas pada perempuan saja, namun menyertakan persoalan penggunaan kontrasepsi pada laki-laki, dan pada pasangan usia subur. Pendekatan pasangan mengukur kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi pada keduanya, suami maupun istri.

Pasangan usia subur dengan kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi ini selanjutnya menjadi suatu permasalahan tersendiri dalam suatu wilayah. Untuk itu, wilayah tersebut akan berusaha untuk menurunkan angka kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi ini. Upaya penurunan angka kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi ini merupakan strategi yang cocok sebagai upaya pencapaian program keluarga berencana. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya jumlah pasangan usia subur yang termasuk angka kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi di suatu daerah, maka angka kelahiran dengan kehamilan pada waktu yang tidak diinginkan di daerah tersebut dapat dipastikan menjadi tinggi. Sehingga menyebabkan tingginya angka aborsi, dan angka kematian ibu (Ashford, 2003).

Unmet need Kabupaten Sleman sebesar 17,12. Jumlah paling tinggi ada di kapanewon Depok yaitu sebesar 4.210 PUS atau 26,09 persen dari seluruh angka unmet need. Dan terendah ada di kapanewon Moyudan, yaitu sebesar 307 PUS atau 6,89 persen dari jumlah unmet need yang ada di kabupaten Sleman.

Fenomena unmet need KB bersifat multidimensial karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti karakteristik demografi, sosial ekonomi, sikap, akses dan kualitas pelayanan. Secara umum, unmet need KB banyak terjadi pada perempuan yang menghadapi hambatan keuangan, pendidikan, geografis, dan sosial. Kondisi sosial ekonomi yang kurang menguntungkan menjadi penyebab tingginya *unmet need*, tetapi wilayah lain dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang memadai juga memiliki tingkat *unmet need* yang tinggi. Faktor yang melatarbelakangi kedua hal tersebut jelas berbeda. Pendidikan dan kondisi ekonomi merupakan variabel penting untuk menjelaskannya. Salah satu alasan utama kebanyakan orang tidak ingin ber-KB adalah masalah kesehatan dan takut efek samping. Oleh sebab itu, gerakan meniadakan unmet need KB harus mempertimbangkan berbagai faktor tersebut. Setidaknya, akses tempat pelayanan KB harus menjangkau ke seluruh PUS sasaran dan kualitas pelayanannya harus sesuai dengan harapan masyarakat.

Hal penting lainnya yang tidak bisa diabaikan adalah memperkuat advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) KB. Kegiatan advokasi KIE KB yang melibatkan Penyuluh KB dan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (PPKBD, Sub PPKBD, Pok KB dan KB KS) maupun kader kesehatan lainnya selain harus menjangkau seluruh unmet need KB, juga harus mampu menjawab berbagai kegalauan PUS yang belum ber-KB karena alasan agama, tradisi dan budaya. Termasuk mampu meyakinkan mereka bahwa menggunakan kontrasepsi modern itu sangat bermanfaat bagi keluarga dalam perencanaan masa depannya untuk mencapai keluarga berkualitas (bahagia dan sejahtera). Kader IMP sekarang ini mempunyai 6 peran dalam rangka ikut mensukseskan program KB, yang kemudian dikenal istilah, "Enam Peran Bakti". Keenam peran bakti institusi tersebut adalah : Pengorganisasian, Pertemuan, KIE, dan Konseling, Pencatatan Pendataan, Pelayanan Kegiatan, dan Kemandirian. Dengan enam peran baktinya, kader IMP telah menjangkau seluruh aspek, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 52

Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. IMP melakukan kegiatan penyuluhan, motivasi dan Konseling Program KB. Mendorong peningkatan kesertaan dalam ber KB yang semakin mandiri dan lestari. Dengan enam peran bakti yang dimainkan, dapat diketahui bahwa IMP memiliki kedudukan yang strategis dalam pengembangan program KB di wilayahnya masing-masing.

Tabel 4.31 Unmet Need menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2023

Kapanewon	PUS	Unmet Need			
		Ingin Anak Tunda	Tidak Ingin Anak Lagi	Jumlah	(%)
1. Gamping	14.402	422	1.685	2.107	14,63
2. Godean	9.838	327	1.221	1.548	15,73
3. Moyudan	4.455	79	228	307	6,89
4. Minggir	4.126	59	131	190	4,60
5. Seyegan	7.435	209	613	822	11,06
6. Mlati	13.637	766	2.234	3.000	22,00
7. Depok	16.139	867	3.343	4.210	26,09
8. Berbah	8.866	396	1.362	1.758	19,83
9. Prambanan	8.301	187	760	947	11,41
10. Kalasan	13.297	498	2.213	2.711	20,39
11. Ngemplak	9.934	334	1.059	1.393	14,02
12. Ngaglik	15.210	716	2.366	3.082	20,26
13. Sleman	10.182	411	1.435	1.846	18,13
14. Tempel	8.361	254	703	957	11,45
15. Turi	5.388	206	759	965	17,91
16. Pakem	5.766	196	706	902	15,64
17. Cangkringan	5.070	189	531	720	14,20
Jumlah 2023	160.407	6.116	21.349	27.465	17,12

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & KB Kabupaten Sleman 2023

4.2.1.7 Pernikahan, Talak, Rujuk

Perkawinan menurut Undang-Undang adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri, bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Tabel 4.30 menjelaskan persoalan sosial yang perlu diperhatikan dalam masyarakat yakni

perkawinan usia anak. Undang-Undang Perkawinan baru dalam merevisi UUP tahun 1974 salah satunya tertuang dalam Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Artinya pernikahan yang dilakukan dibawah umur 19 tahun masuk dalam kategori pernikahan anak, dan seandainya tetap diselenggarakan karena suatu hal harus melalui jalur dispensasi menikah yang disahkan oleh kantor pengadilan.

Data dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman mencatat bahwa jumlah pernikahan dibawah umur masih dijumpai di Kabupaten Sleman dengan jumlah mencapai 67 laki-laki dan 121 perempuan pada tahun 2023. Jumlah ini tentu sangat memprihatinkan bagi kita semua. Jika kita lihat berdasarkan jenis kelamin, perkawinan usia anak jauh lebih tinggi pada mereka yang berjenis kelamin perempuan. Dibutuhkan peran pemerintah daerah baik pada tingkat propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa dalam menekan kasus perkawinan anak. Oleh karena itu, secara berjenjang hendaknya Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan perhatian dan merumuskan kebijakan yang jelas terkait penurunan atau penghilangan perkawinan usia anak.

Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab mensosialisasikan undang-undang pernikahan baru, namun lebih mengarahkan dampak negatif dari perkawinan usia anak. Perkawinan usia anak berakibat pada buruknya kondisi perempuan yang menikah muda, seperti resiko terhadap kondisi kesehatannya sebagai dampak dari melahirkan pada usia dini, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk baik pada ibu maupun anak, dan seringkali juga mengakibatkan gangguan kesehatan seksual dan reproduksi. Mereka umumnya mengalami kondisi yang buruk dibandingkan dengan perempuan yang menunda usia perkawinannya atau menikah sesuai dengan usia ideal. Ancaman-ancaman tersebut perlu selalu disampaikan kepada remaja agar melakukan perencanaan matang dalam menentukan hidup rumah tangga.

**Tabel 4. 32 Distribusi Pernikahan Anak, Cerai, dan Rujuk menurut Kapanewon
di Kabupaten Sleman Tahun 2023**

No	Kapanewon	Jumlah Nikah	Kantor	Luar Kantor	NIKAH CAMPURAN		Jumlah Rujuk	Jumlah <i>Isbat</i>	DI BAWAH UMUR (19 Tahun)	
					Laki-laki	Wanita			Laki-laki	Wanita
1	Gamping	523	132	391	4	-	-	2	5	12
2	Godean	334	66	268	-	-	-	3	2	3
3	Moyudan	120	27	93	-	-	-	-	-	1
4	Minggir	134	36	98	-	-	-	-	-	-
5	Seyegan	285	78	207	1	-	-	1	5	9
6	Mlati	500	123	377	2	-	-	-	10	12
7	Depok	856	160	696	6	1	-	4	7	11
8	Berbah	324	117	207	3	-	-	-	7	10
9	Prambanan	281	90	191	-	-	-	-	5	7
10	Kalasan	480	128	352	1	-	-	1	1	5
11	Ngemplak	343	91	252	-	-	-	1	4	7
12	Ngaglik	495	106	389	1	-	-	5	-	4
13	Sleman	451	98	353	2	-	-	5	7	12
14	Tempel	306	101	205	-	-	-	-	1	3
15	Turi	218	59	159	-	-	-	-	3	10
16	Pakem	219	60	159	1	-	-	-	1	7
17	Cangkringan	186	61	125	1	-	-	-	9	8
	KABUPATEN SLEMAN	6.055	1.533	4.522	22	1	-	22	67	121

Sumber: Kantor Kementerian Agama Sleman, 2023

4.2.2 Pendidikan

Investasi sumber daya manusia adalah sejumlah dana yang dikeluarkan dan kesempatan memperoleh penghasilan selama proses investasi. Investasi yang demikian disebut dengan human capital. Istilah modal manusia (*human capital*) ini dikenal sejak tiga puluh tahun lalu ketika Gary S. Becker, seorang penerima Nobel di bidang ekonomi membuat sebuah buku yang berjudul Human. Dalam ilmu ekonomi, pendidikan, baik formal dan informal, dianggap sebagai salah satu bentuk investasi mutu modal manusia selain kesehatan dan migrasi (Schultz, 1963; Todaro & Smith, 2007). Dengan pendidikan, produktivitas tenaga kerja diharapkan akan meningkat sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produktivitas tersebut dicerminkan oleh peningkatan pendapatan atau kesejahteraan individu yang melakukan investasi tersebut, sehingga ukuran keberhasilan atau manfaat dari investasi pendidikan adalah melalui peningkatan pendapatan seseorang, walaupun pendapatan yang berasal dari upah/gaji belum tentu merupakan suatu indikator peningkatan produktivitas (Mankiw, 2007). Pendidikan merupakan sebuah investasi sumber daya manusia yang tidak hanya menentukan kesuksesan seorang individu namun juga menentukan kemajuan suatu bangsa. Selain berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi pendidikan merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendidikan tidak hanya menjadi salah satu isu di Indonesia tetapi juga menjadi salah satu isu yang disorot dunia. Oleh karena itu bidang ini menjadi satu dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (Sustainable Development Goals/SDGs) tepatnya Tujuan ke-4 yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

Bidang pendidikan juga menjadi salah satu arah utama pembangunan yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. RPJMN 2020-2024 tersebut merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025. Pendidikan menjadi bagian dari arah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif,

terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Arah pembangunan SDM tersebut merupakan satu dari 7 agenda pembangunan yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Fokus utama pembangunan pendidikan pada RPJMN 2020- 2024 masih kepada peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan.

Parameter yang dapat digunakan untuk mengukur derajat pendidikan suatu wilayah adalah angka partisipasi kasar atau sering disingkat dengan APK. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. APK SD sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7 sampai 12 tahun. Angka partisipasi kasar dapat melebihi 100 karena jumlah siswa jenjang pendidikan tertentu melebihi jumlah penduduk pada jenjang pendidikan tersebut. APK di Kabupaten Sleman pada jenjang SD dan SMP memiliki angka di atas 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semua anak usia SD dan SMP sudah bersekolah bahkan terdapat anak yang belum berusia 7 tahun sudah bersekolah di SD.

Tabel 4. 33 Angka Partisipasi Kasar SD - SMP Kabupaten Sleman Tahun 2023

No.	Kapanewon	APK SD			APK SMP		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	BERBAH	40.74	37.89	78.63	35.72	37.73	73.45
2	CANGKRINGAN	46.36	46.29	92.65	30.61	32.19	62.80
3	DEPOK	58.15	56.74	114.89	55.43	53.50	108.93
4	GAMPING	51.33	47.82	99.15	52.12	49.08	101.20
5	GODEAN	49.31	49.18	98.49	42.22	46.10	88.32
6	KALASAN	54.11	49.56	103.67	44.63	42.36	86.99
7	MINGGIR	41.58	39.87	81.45	54.57	49.21	103.78
8	MLATI	48.83	47.32	96.16	55.07	50.22	105.29
9	MOYUDAN	49.71	44.01	93.73	77.31	74.53	151.84
10	NGAGLIK	52.77	49.15	101.92	55.46	54.81	110.26
11	NGEMPLAK	46.86	42.74	89.60	40.54	36.92	77.47
12	PAKEM	56.92	52.66	109.58	93.44	82.36	175.80
13	PRAMBANAN	56.29	53.98	110.27	78.19	76.65	154.84
14	SEYEGAN	45.90	42.16	88.05	35.08	30.54	65.62
15	SLEMAN	57.25	55.42	112.67	57.29	55.63	112.92
16	TEMPEL	46.75	42.77	89.52	52.44	47.44	99.89
17	TURI	47.26	43.08	90.34	65.35	58.85	124.19
Jumlah		51.06	48.25	99.31	53.11	50.69	103.81

Sumber: Dinas Pendidikan Sleman, 2023

Tabel 4. 34 Angka Partisipasi Kasar SD - SMP Kabupaten Sleman Tahun 2023

No.	Kapanewon	Jumlah Penduduk 7-12 tahun			Jumlah Peserta Didik SD/Sederajat			APK SD (%)		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	BERBAH	2669	2535	5204	2120	1972	4092	40.74	37.89	78.63
2	CANGKRINGAN	1395	1379	2774	1286	1284	2570	46.36	46.29	92.65
3	DEPOK	5585	5360	10945	6365	6210	12575	58.15	56.74	114.89
4	GAMPING	4290	4150	8440	4332	4036	8368	51.33	47.82	99.15
5	GODEAN	3159	3047	6206	3060	3052	6112	49.31	49.18	98.49
6	KALASAN	3980	3681	7661	4145	3797	7942	54.11	49.56	103.67
7	MINGGIR	1264	1307	2571	1069	1025	2094	41.58	39.87	81.45
8	MLATI	4268	4009	8277	4042	3917	7959	48.83	47.32	96.16
9	MOYUDAN	1364	1267	2631	1308	1158	2466	49.71	44.01	93.73
10	NGAGLIK	4924	4525	9449	4986	4644	9630	52.77	49.15	101.92
11	NGEMPLAK	3076	2916	5992	2808	2561	5369	46.86	42.74	89.60
12	PAKEM	1728	1624	3352	1908	1765	3673	56.92	52.66	109.58
13	PRAMBANAN	2507	2419	4926	2773	2659	5432	56.29	53.98	110.27
14	SEYEGAN	2326	2219	4545	2086	1916	4002	45.90	42.16	88.05
15	SLEMAN	3303	3216	6519	3732	3613	7345	57.25	55.42	112.67
16	TEMPEL	2430	2302	4732	2212	2024	4236	46.75	42.77	89.52
17	TURI	1696	1533	3229	1526	1391	2917	47.26	43.08	90.34
Jumlah		49964	47489	97453	49758	47024	96782	51.06	48.25	99.31

Sumber: Dinas Pendidikan Sleman, 2023

Tabel 4. 35 Angka Partisipasi Murni SD Tepat Waktu Kabupaten Sleman Tahun 2023

No.	Kapanewon	Jumlah Penduduk 7-12 tahun			Jumlah Peserta Didik SD/Sederajat			APM SD Tepat Waktu (%)		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	BERBAH	2669	2535	5204	2120	1972	4092	75,68	74,6	75,14
2	CANGKRINGAN	1395	1379	2774	1286	1284	2570	88,96	90,07	89,515
3	DEPOK	5585	5360	10945	6365	6210	12575	109,08	110,02	109,55
4	GAMPING	4290	4150	8440	4332	4036	8368	97,18	93,45	95,315
5	GODEAN	3159	3047	6206	3060	3052	6112	93,99	97,01	95,5
6	KALASAN	3980	3681	7661	4145	3797	7942	100,63	99,29	99,96
7	MINGGIR	1264	1307	2571	1069	1025	2094	80,46	74,14	77,3
8	MLATI	4268	4009	8277	4042	3917	7959	90,82	93,39	92,105
9	MOYUDAN	1364	1267	2631	1308	1158	2466	92,3	88,16	90,23
10	NGAGLIK	4924	4525	9449	4986	4644	9630	96,95	97,75	97,35
11	NGEMPLAK	3076	2916	5992	2808	2561	5369	88	84,64	86,32
12	PAKEM	1728	1624	3352	1908	1765	3673	107,18	105,17	106,175
13	PRAMBANAN	2507	2419	4926	2773	2659	5432	106,18	104,88	105,53
14	SEYEGAN	2326	2219	4545	2086	1916	4002	86,29	83,87	85,08
15	SLEMAN	3303	3216	6519	3732	3613	7345	108,72	108,36	108,54
16	TEMPEL	2430	2302	4732	2212	2024	4236	86,63	84,23	85,43
17	TURI	1696	1533	3229	1526	1391	2917	86,44	86,89	86,665
Jumlah		49964	47489	97453	49758	47024	96782	95,69	94,97	95,33

Sumber: Dinas Pendidikan Sleman, 2023

Tabel 4. 36 Angka Partisipasi Kasar SMP Kabupaten Sleman Tahun 2023

No.	Kapanewon	Jumlah Penduduk 13-15 tahun			Jumlah Peserta Didik SMP/Sederajat			APK SMP (%)		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	BERBAH	1400	1338	2738	978	1033	2011	35,72	37,73	73,45
2	CANGKRINGAN	763	753	1516	464	488	952	30,61	32,19	62,80
3	DEPOK	2965	2770	5735	3179	3068	6247	55,43	53,5	108,93
4	GAMPING	2269	2144	4413	2300	2166	4466	52,12	49,08	101,20
5	GODEAN	1782	1591	3373	1424	1555	2979	42,22	46,1	88,32
6	KALASAN	2139	2058	4197	1873	1778	3651	44,63	42,36	86,99
7	MINGGIR	721	734	1455	794	716	1510	54,57	49,21	103,78
8	MLATI	2301	2157	4458	2455	2239	4694	55,07	50,22	105,29
9	MOYUDAN	760	677	1437	1111	1071	2182	77,31	74,53	151,84
10	NGAGLIK	2425	2339	4764	2642	2611	5253	55,46	54,81	110,27
11	NGEMPLAK	1621	1499	3120	1265	1152	2417	40,54	36,92	77,46
12	PAKEM	896	856	1752	1637	1443	3080	93,44	82,36	175,80
13	PRAMBANAN	1374	1294	2668	2086	2045	4131	78,19	76,65	154,84
14	SEYEGAN	1218	1228	2446	858	747	1605	35,08	30,54	65,62
15	SLEMAN	1789	1655	3444	1973	1916	3889	57,29	55,63	112,92
16	TEMPEL	1359	1261	2620	1374	1243	2617	52,44	47,44	99,88
17	TURI	878	891	1769	1156	1041	2197	65,35	58,85	124,20
Jumlah		26660	25245	51905	27569	26312	53881	53,11	50,69	103,80

Sumber: Dinas Pendidikan Sleman, 2023

Tabel 4. 37 Angka Partisipasi Murni SMP Tepat Waktu Kabupaten Sleman Tahun 2023

No.	Kapanewon	Jumlah Penduduk 13-15 tahun			Jumlah Peserta Didik SMP/Sederajat			APM SMP Tepat Waktu (%)		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	BERBAH	1400	1338	2738	978	1033	2011	59,29	66,89	63,09
2	CANGKRINGAN	763	753	1516	464	488	952	53,47	54,32	53,90
3	DEPOK	2965	2770	5735	3179	3068	6247	92,88	94,12	93,50
4	GAMPING	2269	2144	4413	2300	2166	4466	87,04	87,92	87,48
5	GODEAN	1782	1591	3373	1424	1555	2979	69,87	85,92	77,90
6	KALASAN	2139	2058	4197	1873	1778	3651	76,91	76,68	76,80
7	MINGGIR	721	734	1455	794	716	1510	92,93	81,61	87,27
8	MLATI	2301	2157	4458	2455	2239	4694	89,35	89,29	89,32
9	MOYUDAN	760	677	1437	1111	1071	2182	125,39	128,06	126,73
10	NGAGLIK	2425	2339	4764	2642	2611	5253	91,18	93,67	92,43
11	NGEMPLAK	1621	1499	3120	1265	1152	2417	65,45	66,51	65,98
12	PAKEM	896	856	1752	1637	1443	3080	157,7	147,43	152,57
13	PRAMBANAN	1374	1294	2668	2086	2045	4131	127,15	133,46	130,31
14	SEYEGAN	1218	1228	2446	858	747	1605	59,61	53,58	56,60
15	SLEMAN	1789	1655	3444	1973	1916	3889	96,93	102,6	99,77
16	TEMPEL	1359	1261	2620	1374	1243	2617	86,61	87,07	86,84
17	TURI	878	891	1769	1156	1041	2197	106,95	90,46	98,71
Jumlah		26660	25245	51905	27569	26312	53881	88,31	89,4	88,86

Sumber: Dinas Pendidikan Sleman, 2023

Tabel 4. 38 Angka Partisipasi Kasar SMA Kabupaten Sleman Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk 16-18 tahun			Jumlah Peserta Didik SMA/Sederajat			APK SMA (%)		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	BERBAH	1188	1192	2380	974	633	1607	40.92	26.60	67.52
2	CANGKRINGAN	699	656	1355	1279	895	2174	94.39	66.05	160.44
3	DEPOK	2675	2550	5225	5292	4383	9675	101.28	83.89	185.17
4	GAMPING	2031	1995	4026	1273	979	2252	31.62	24.32	55.94
5	GODEAN	1473	1429	2902	605	2594	3199	20.85	89.39	110.23
6	KALASAN	1959	1709	3668	964	1308	2272	26.28	35.66	61.94
7	MINGGIR	612	612	1224	235	314	549	19.20	25.65	44.85
8	MLATI	2022	1912	3934	1128	1630	2758	28.67	41.43	70.11
9	MOYUDAN	672	624	1296	873	557	1430	67.36	42.98	110.34
10	NGAGLIK	2197	2032	4229	1664	1883	3547	39.35	44.53	83.87
11	NGEMPLAK	1321	1289	2610	509	483	992	19.50	18.51	38.01
12	PAKEM	831	782	1613	1583	966	2549	98.14	59.89	158.03
13	PRAMBANAN	1151	1130	2281	1992	1647	3639	87.33	72.21	159.54
14	SEYEGAN	1082	985	2067	2102	784	2886	101.69	37.93	139.62
15	SLEMAN	1559	1495	3054	1622	1476	3098	53.11	48.33	101.44
16	TEMPEL	1160	1132	2292	1057	1789	2846	46.12	78.05	124.17
17	TURI	772	728	1500	500	583	1083	33.33	38.87	72.20
Jumlah		23404	22252	45656	23652	22904	46556	51.80	50.17	101.97

Sumber: Dinas Pendidikan Sleman, 2023

Tabel 4. 39 Angka Partisipasi Murni SMA Tepat Waktu Kabupaten Sleman Tahun 2023

No.	Kapanewon	Jumlah Penduduk 16-18 tahun			Jumlah Peserta Didik SMA/Sederajat			APM SMA Tepat Waktu (%)		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	BERBAH	1188	1192	2380	974	633	1607	60,61	39,35	49,98
2	CANGKRINGAN	699	656	1355	1279	895	2174	148,93	111,13	130,03
3	DEPOK	2675	2550	5225	5292	4383	9675	156,11	136,71	146,41
4	GAMPING	2031	1995	4026	1273	979	2252	47,27	38,85	43,06
5	GODEAN	1473	1429	2902	605	2594	3199	33,94	152,48	93,21
6	KALASAN	1959	1709	3668	964	1308	2272	39,05	62,26	50,655
7	MINGGIR	612	612	1224	235	314	549	29,9	38,73	34,315
8	MLATI	2022	1912	3934	1128	1630	2758	41,54	67,52	54,53
9	MOYUDAN	672	624	1296	873	557	1430	103,13	73,56	88,345
10	NGAGLIK	2197	2032	4229	1664	1883	3547	57,62	72,15	64,885
11	NGEMPLAK	1321	1289	2610	509	483	992	26,8	29,4	28,1
12	PAKEM	831	782	1613	1583	966	2549	156,44	95,78	126,11
13	PRAMBANAN	1151	1130	2281	1992	1647	3639	133,97	117,35	125,66
14	SEYEGAN	1082	985	2067	2102	784	2886	159,98	66,9	113,44
15	SLEMAN	1559	1495	3054	1622	1476	3098	78,19	78,06	78,125
16	TEMPEL	1160	1132	2292	1057	1789	2846	72,41	128,98	100,695
17	TURI	772	728	1500	500	583	1083	43,91	56,59	50,25
Jumlah		23404	22252	45656	23652	22904	46556	78,91	82,27	80,59

Sumber: Dinas Pendidikan Sleman, 2023

Tabel 4. 40 Angka Partisipasi Sekolah 7 – 12 tahun Kabupaten Sleman Tahun 2023

No	Uraian	Juml Penduduk Usia 7-12 Tahun			Yang sedang Bersekolah			APS (%)		
		L	P	J	L	P	J	L	P	J
1	Negeri				28.259	27.664	55.923	56,56	58,21	57,39
2	Swasta				21.690	19.836	41.526	43,41	41,77	42,59
		49.964	47.489	97.453	49.949	47.500	97.449	99,97	99,98	99,98

Sumber: Dinas Pendidikan Sleman, 2023

Tabel 4. 41 Angka Partisipasi Sekolah di Sleman 7 – 12 tahun Kabupaten Sleman Tahun 2023

No	Uraian	Juml Penduduk Usia 7-12 Tahun			Bersekolah di Sleman			APS (%)		
		L	P	J	L	P	J	L	P	J
1	Negeri				26.258	25.713	51.971	52,55	54,15	53,35
2	Swasta				17.092	15.614	32.706	34,21	32,88	33,55
		49.964	47.489	97.453	43.350	41.327	84.677	86,76	87,03	86,90

Sumber: Dinas Pendidikan Sleman, 2023

Tabel 4. 41 Angka Partisipasi Sekolah di Luar Sleman 7 – 12 tahun Kabupaten Sleman Tahun 2023

No	Uraian	Juml Penduduk Usia 7-12 Tahun			Bersekolah di Luar Sleman			APS (%)		
		L	P	J	L	P	J	L	P	J
1	Negeri				2.001	1.931	3.932	4	4,07	4,04
2	Swasta				4.598	4.222	8.820	9,2	8,89	9,05
		49.964	47.489	97.453	6.599	6.153	12.752	13,2	12,96	13,08

Sumber: Dinas Pendidikan Sleman, 2023

Tabel 4. 42 Angka Partisipasi Sekolah 13 – 15 tahun Kabupaten Sleman Tahun 2023

No	Uraian	Juml Penduduk Usia 13-15 Tahun			yang Bersekolah			APS (%)		
		L	P	J	L	P	J	L	P	J
1	Negeri				15.229	16.495	31.724	57,12	65,34	61,23
2	Swasta				11.348	8.723	20.071	42,57	34,55	38,56
		26.660	25.245	51.905	26.577	25.218	51.795	99,69	99,89	99,79

Sumber: Dinas Pendidikan Sleman, 2023

Tabel 4. 43 Angka Partisipasi Sekolah di Sleman 13 – 15 tahun Kabupaten Sleman Tahun 2023

No	Uraian	Juml Penduduk Usia 13-15 Tahun			Bersekolah di Sleman			APS (%)		
		L	P	J	L	P	J	L	P	J
1	Negeri				13.157	14.036	27.193	49,35	55,60	52,48
2	Swasta				8.618	6.189	14.807	32,33	24,52	28,43
		26.660	25.245	51.905	21.775	20.225	42.000	81,68	80,12	80,90

Sumber: Dinas Pendidikan Sleman, 2023

Tabel 4. 44 Angka Partisipasi Sekolah di Luar Sleman 13 – 15 tahun Kabupaten Sleman Tahun 2023

No	Uraian	Juml Penduduk Usia 13-15 Tahun			Bersekolah di Luar Sleman			APS (%)		
		L	P	J	L	P	J	L	P	J
1	Negeri				2.072	2.459	4.531	7,77	9,74	8,76
2	Swasta				2.730	2.534	5.264	10,24	10,04	10,14
		26.660	25.245	51.905	4.802	4.993	9.795	18,01	19,78	18,90

Sumber: Dinas Pendidikan Sleman, 2023

Tabel 4. 45 Angka Partisipasi Sekolah 7 – 15 tahun Kabupaten Sleman Tahun 2023

No	Uraian	Juml Penduduk Usia 7-15 Tahun			Yang Bersekolah			APS (%)		
		L	P	J	L	P	J	L	P	J
1	Negeri				43.488	44.139	87.627	56,76	60,69	58,73
2	Swasta				33.038	28.559	61.597	43,12	39,26	41,19
		76.624	72.734	149.358	76.526	72.698	149.224	99,88	99,95	99,92

Sumber: Dinas Pendidikan Sleman, 2023

Tabel 4. 46 Angka Partisipasi Sekolah di Sleman 7 – 15 tahun Kabupaten Sleman Tahun 2023

No	Uraian	Juml Penduduk Usia 7-15 Tahun			Bersekolah di Sleman			APS (%)		
		L	P	J	L	P	J	L	P	J
1	Negeri				39.415	39.749	79.164	51,44	54,65	53,05
2	Swasta				25.710	21.803	47.513	33,55	29,98	31,77
		76.624	72.734	149.358	65.125	61.552	126.677	84,99	84,63	84,81

Sumber: Dinas Pendidikan Sleman, 2023

Tabel 4. 47 Angka Partisipasi Sekolah di Luar Sleman 7 – 15 tahun Kabupaten Sleman Tahun 2023

No	Uraian	Juml Penduduk Usia 7-15 Tahun			Bersekolah di Luar Sleman			APS (%)		
		L	P	J	L	P	J	L	P	J
1	Negeri				4.073	4.390	8.463	5,32	6,04	5,68
2	Swasta				7.328	6.756	14.084	9,56	9,29	9,43
		76.624	72.734	149.358	11.401	11.146	22.547	14,88	15,33	15,11

Sumber: Dinas Pendidikan Sleman, 2023

Tabel 4.31 menunjukkan bahwa APK pada jenjang pendidikan SD mencapai angka 99,31 persen yang menunjukkan bahwa masih terdapat anak usia 7-12 tahun yang saat ini belum bersekolah. Kondisi ini bisa terjadi karena terkadang orang tua memasukkan anaknya ke jenjang sekolah dasar lebih dari 7 tahun karena memang batasan ideal anak disekolahkan kalau anak tersebut minimal berusia 7 tahun. Jika diperbandingkan antara anak laki-laki dengan perempuan, terlihat bahwa anak laki-laki memiliki APK sedikit lebih tinggi dibandingkan anak perempuan dengan persentase masing-masing sebesar 51,06 persen dibandingkan 48,25 persen.

Kondisi pada jenjang pendidikan sekolah lanjutan pertama sedikit lebih baik. Secara umum penduduk umur 13-15 tahun di Kabupaten Sleman telah menyelesaikan pendidikan sekolah lanjutan pertama. Kondisi ini terjadi baik laki-laki maupun perempuan. Namun demikian untuk Kapanewo Berbah, Cangkringan, Gamping, Godean, Kalasan, Ngemplak dan Seyegan serta Tempel angka partisipasi kasar SMP belum mencapai 100.

Data pada Tabel 4.31 diatas menunjukkan kualitas pendidikan dasar di Kabupaten Sleman, utamanya yang terjadi di beberapa kecamatan perlu mendapatkan perhatian. Sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama merupakan pendidikan dasar yang seharusnya terentaskan untuk Yogyakarta yang memiliki predikat sebagai Kota Pelajar. Amanah pendidikan telah dicanangkan sejak tahun 1994 dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sebagaimana tercantum dalam Inpres No. 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, dan pada tahun 2006 tekad tersebut diperkuat dengan diterbitkan Inpres No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota menyatakan bahwa pendidikan termasuk dalam urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Berdasarkan PP tersebut maka Pendidikan termasuk urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan dasar.

Faktor ekonomi rumah tangga masih memiliki peran penting dalam menentukan tingkat pendidikan seseorang. Mengingat bahwa di Indonesia, pendidikan 'gratis' yang sebenarnya belum dapat terlaksana. Walaupun biaya di beberapa jenjang pendidikan sudah mulai ditiadakan, tapi kenyataannya pendidikan memang membutuhkan biaya ekstra seperti biaya untuk seragam, buku pelajaran, perlengkapan alat tulis dan berbagai penunjang lain. Biaya tersebut turut berpengaruh terhadap kesempatan mengenyam pendidikan anggota rumah tangga. Ketika perekonomian rumah tangga tersendat, seringkali kebutuhan pendidikan bukan lagi menjadi prioritas. Apalagi ketika biaya kebutuhan sehari-hari meningkat, rumah tangga dengan ekonomi rendah akan semakin sulit memenuhi biaya pendidikan anggota rumah tangganya. Tinggi rendahnya status ekonomi rumah tangga dapat berpengaruh pada proses pendidikan seseorang.

Bappenas (2009) menyatakan salah satu faktor yang mempengaruhi angka partisipasi kasar adalah kemiskinan. Pengaruh kemiskinan terhadap APK adalah negatif, artinya semakin penduduk terjebak dalam kemiskinan maka angka partisipasi kasarnya rendah. Kemiskinan menyebabkan beberapa anak tidak mampu mengakses sekolah karena tidak memiliki waktu cukup untuk belajar karena tekanan ekonomi. Biaya pendidikan dasar dengan adanya regulasi Wajib 9 tahun menjadi tanggung jawab pemerintah atau tidak berbayar. Aksesibilitas fasilitas pendidikan bisa juga dipengaruhi oleh derajat kesehatan anak sehingga mereka tidak memungkinkan untuk sekolah. Beberapa faktor ini harus diurai satu persatu sehingga akan terumuskan kebijakan pendidikan yang tepat.

Untuk angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun masih ada orientasi sekolah di luar Sleman sebesar 13,08 persen, dibandingkan total APS sebesar 99,98 persen. Sedangkan untuk usia 13-15 tahun orientasi sekolah di luar Sleman sebesar 18,90 persen dibandingkan total APS sebesar 99,79 persen. Dan total APS luar Sleman untuk usia 7-15 tahun sebesar 15,11 dibandingkan total APS 7-15 tahun sebesar 99,92 persen. Ada kecenderungan untuk sekolah di luar kabupaten Sleman untuk sekolah menengah, mengindikasikan orientasi dan persepsi kualitas sekolah yang ada.

4.2.3 Ekonomi

Salah satu indikator penting dalam melihat kondisi ekonomi sebuah wilayah adalah dengan melihat data ketenagakerjaan. Dinamika kependudukan di Kabupaten Sleman dilihat dari sisi ketenagakerjaan, pada umumnya adalah tentang perkembangan dari angkatan kerja yang dianggap sebagai sisi penawaran atau penyediaan tenaga kerja, dan perkembangan kesempatan kerja sebagai sisi kebutuhan tenaga kerja. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perubahan kedua hal tersebut. Salah satunya adalah perubahan struktur penduduk, yang dalam hal ini ada kaitannya dengan perubahan-perubahan kelahiran, kematian, dan migrasi. Perubahan ketiga komponen tersebut di Kabupaten Sleman telah mengakibatkan rendahnya pertumbuhan penduduk, meskipun secara absolut jumlah penduduk cenderung meningkat. Kecenderungan pertumbuhan penduduk yang semakin rendah, tentunya akan mengakibatkan pula persediaan tenaga kerja yang berkurang. Namun karena jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Sleman masih cukup besar, maka pertumbuhan penduduk rendah yang terjadi belum dapat mempengaruhi berkurangnya jumlah angkatan kerja, ini berarti pertumbuhan angkatan kerja juga relatif masih tinggi.

Permasalahan yang masih ada dan cukup penting untuk diselesaikan dari sisi ketenagakerjaan adalah pertumbuhan angkatan kerja yang relatif masih tinggi tidak diimbangi dengan tingginya pertumbuhan kesempatan kerja. Sebenarnya kondisi penduduk usia produktif yang masih cukup besar di Kabupaten Sleman tidak akan menimbulkan masalah, seandainya daerah ini dapat memperluas dan menyediakan kesempatan kerja. Dengan demikian yang menjadi masalah adalah bagaimana agar persediaan tenaga kerja dapat seimbang dengan kebutuhan tenaga kerja.

Sumber daya manusia atau juga sering disebut sebagai *human capital* memiliki dua peran baik sebagai tujuan pembangunan maupun sebagai input pembangunan. Sebagai input pembangunan, kualitas tenaga kerja menjadi faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja menjadi faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas-aktivitas perekonomian. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia atau tenaga kerja juga menjadi salah satu fokus Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY tahun 2020. Tujuannya

adalah penyiapan dan ketersediaan SDM atau tenaga kerja yang unggul dan berdaya saing yang dapat memenuhi permintaan dunia usaha baik di tingkat lokal, nasional hingga pasar global dapat mendukung ketercapaian program pembangunan di pusat maupun di daerah. Pembangunan ketenagakerjaan dilakukan secara sinergis oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya melalui pendidikan, latihan dan pemagangan. Menurut ILO (*International Labor Organization*) membagi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) berdasarkan aktivitas utamanya menjadi dua kelompok yaitu kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dilihat dari komponennya, angkatan kerja dibagi 2, yaitu angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja yang tidak bekerja inilah yang disebut pengangguran terbuka.

Tabel 4. 48 Data Angkatan Kerja, Bukan Angkatan Kerja, dan Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sleman Tahun 2023

No	Wilayah	Tidak Bekerja	Bekerja	Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	JML	Angka Partisipasi Angkatan Kerja
1	GAMPING	3.355	38.486	41.841	28.829	67.959	61,57
2	GODEAN	1.502	28.660	30.162	20.734	49.940	60,4
3	MOYUDAN	917	13.131	14.048	9.279	22.787	61,65
4	MINGGIR	976	12.749	13.725	8.862	21.980	62,44
5	SEYEGAN	1.442	20.107	21.549	15.897	36.350	59,28
6	MLATI	2.046	36.787	38.833	29.239	66.779	58,15
7	DEPOK	2.587	49.541	52.128	38.140	88.530	58,88
8	BERBAH	1.145	23.244	24.389	16.735	40.354	60,44
9	PRAMBANAN	1.494	23.583	25.077	13.888	37.771	66,39
10	KALASAN	2.107	34.022	36.129	26.352	61.045	59,18
11	NGEMPLAK	1.402	25.459	26.861	19.204	45.216	59,41
12	NGAGLIK	2.162	39.769	41.931	30.736	71.355	58,76
13	SLEMAN	1.667	28.067	29.734	21.409	50.109	59,34
14	TEMPEL	1.334	21.046	22.380	16.957	38.376	58,32
15	TURI	1.121	15.717	16.838	10.646	26.611	63,27
16	PAKEM	842	15.363	16.205	11.317	27.033	59,95
17	CANGKRINGAN	666	13.665	14.331	8.184	22.050	64,99
JUMLAH	SLEMAN	26.765	439.396	466.161	326.408	774.245	60,21

Sumber data : Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri Semester II , 2023)

Tabel 4. 49 Data Angkatan Kerja Kabupaten Sleman Tahun 2023

Kapanewon	Jumlah Penduduk Tahun 2023			Angkatan Kerja									Jumlah Angkatan Kerja		
				Penganggur			Bekerja								
	L						Bekerja Kurang 35 Jam			Bekerja Diatas 35 Jam					
				L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
Gamping	47.895	48.464	96.359	672	633	1305	6285	6349	12634	18156	15765	33921	25113	22747	47860
Godean	35.774	36.145	71.919	1446	1019	2465	5950	7035	12985	11927	9851	21778	19323	18332	37655
Moyudan	16.850	17.050	33.900	434	413	847	2846	2378	5224	7716	7048	14764	10996	9839	20835
Minggir	15.909	16.758	32.667	442	295	737	3184	3200	6384	6907	5205	12112	10533	8847	19380
Seyegan	26.114	26.518	52.632	1294	773	2067	3402	4781	8183	11631	9759	21390	16327	15313	31640
Mlati	47.299	47.713	95.012	1335	1281	2616	5064	6492	11556	24671	17967	42638	31070	25740	56810
Depok	62.018	63.765	125.783	2102	1705	3807	12690	12851	25541	26244	26000	52244	41036	40556	81592
Berbah	28.404	28.978	57.382	1646	780	2426	5142	5140	10282	9987	8035	18022	16775	14821	31596
Prambanan	27.255	27.960	55.215	1052	761	1813	5100	4180	9280	11321	9494	20815	17473	14435	31908
Kalasan	42.994	43.779	86.773	909	615	1524	14454	13671	28125	14323	14998	29321	29686	29578	59264
Ngemplak	32.479	33.020	65.499	1080	1136	2216	6383	7285	13668	10133	8942	19075	17596	17363	34959
Ngaglik	50.634	51.987	102.621	1617	1173	2790	9446	9087	18533	18087	17644	35731	29150	28348	57498
Sleman	35.606	36.302	71.908	1174	1369	2543	5640	6337	11977	15071	12741	27812	21885	20447	42332
Tempel	27.293	27.882	55.175	667	413	1080	6278	5097	11375	9422	9403	18825	16367	15167	31534
Turi	19.132	19.205	38.337	149	139	288	3212	2964	6176	7500	7216	14716	10861	10319	21180
Pakem	19.283	19.845	39.128	186	238	424	3414	2798	6212	8785	6679	15464	12385	9663	22048
Cangkringan	15.976	16.330	32.306	1107	771	1878	2300	1485	3785	3836	3136	6972	7243	5392	12635
KABUPATEN SLEMAN	550.915	561.701	1.112.616	17312	13514	30826	100790	101130	201920	215717	189883	405600	333819	306907	640726

Sumber data : Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri Semester II , dan Dinas Tenaga Kerja 2023)

Tabel 4.48 memperlihatkan bahwa Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Sleman sebesar 60,21 persen meliputi kelompok bekerja sebanyak 439.396 jiwa atau 94,26 persen dari Angkatan kerja dan tidak bekerja sebanyak 26.765 atau 5,74 persendari Angkatan kerja. Artinya dari 100 angkatan kerja yang ada di Kabupaten Sleman hanya 5,74 persen Angkatan kerja yang menganggur atau sedang mencari pekerjaan. Tingginya persentase angkatan kerja yang bekerja mencerminkan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Sleman sangat baik, karena semua angkatan kerja terserap dalam lapangan pekerjaan.

Ukuran ketenagakerjaan lain adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK atau Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) atau *Labour Force Participation Rate* adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja (AK) terhadap penduduk usia kerja (PUK) dinyatakan dalam persen. TPAK dapat digunakan untuk melihat potensi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari persediaan tenaga kerja (*labor supply*) untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa.

Dalam penjelasan berikutnya di tabel 4.49 yang bersumberkan Dinas Tenaga Kerja adalah penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu yaitu sebesar 201.920 jiwa atau merinci jumlah penganggur di kabupaten Sleman sebesar 30.826 atau 33,24 persen dari jumlah Angkatan kerja yang bekerja. Artinya ada orientasi jenis pekerjaan untuk penduduk kabupaten Sleman, dimana jumlah jam kerja tidak lagi menjadi ukuran pekerjaan yang diinginkan. Banyak penduduk yang berstatus bekerja freelance atau paruh waktu namun dengan penghasilan yang sesuai dengan harapan. Deskripsi ini akan lebih lengkap jika disandingkan dengan jumlah pendapatan penduduk di kabupaten Sleman. Sementara untuk sektor pekerjaan dengan jam kerja panjang (lebih dari 35 jam per minggu) menjadi orientasi bagi sebagian penduduk dengan jumlah 66,76 persen dari seluruh Angkatan kerja yang bekerja

Tabel 4. 50 Data Jenis Pekerjaan Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2023

NO.	PEKERJAAN	LAKI-LAKI (JIWA)	PEREMPUAN (JIWA)	JUMLAH (JIWA)	%
	KABUPATEN SLEMAN	550.915	561.701	1.112.616	100,00
1	TIDAK/BELUM BEKERJA	97.457	90.279	187.736	16,87
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	70	175.799	175.869	15,81
3	PELAJAR/MAHASISWA	114.801	108.793	223.594	20,10
4	PENSIUNAN	19.277	9.207	28.484	2,56
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	13.002	12.331	25.333	2,28
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	3.608	132	3.740	0,34
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	3.970	328	4.298	0,39
8	PERDAGANGAN	2.285	2.990	5.275	0,47
9	PETANI/PEKEBUN	18.254	13.143	31.397	2,82
10	PETERNAK	368	54	422	0,04
11	NELAYAN/PERIKANAN	45	1	46	0,00
12	INDUSTRI	140	79	219	0,02
13	KONSTRUKSI	253	11	264	0,02
14	TRANSPORTASI	327	7	334	0,03
15	KARYAWAN SWASTA	100.235	63.049	163.284	14,68
16	KARYAWAN BUMN	3.197	1.409	4.606	0,41
17	KARYAWAN BUMD	402	216	618	0,06
18	KARYAWAN HONORER	1.927	1.846	3.773	0,34
19	BURUH HARIAN LEPAS	85.411	24.301	109.712	9,86
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	15.819	9.939	25.758	2,32
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	49	8	57	0,01
22	BURUH PETERNAKAN	150	55	205	0,02
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	4	730	734	0,07
24	TUKANG CUKUR	104	6	110	0,01
25	TUKANG LISTRIK	126	0	126	0,01
26	TUKANG BATU	1.594	3	1.597	0,14
27	TUKANG KAYU	662	1	663	0,06
28	TUKANG SOL SEPATU	23	0	23	0,00
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	229	1	230	0,02
30	TUKANG JAHIT	250	860	1.110	0,10
31	TUKANG GIGI	10	0	10	0,00
32	PENATA RIAS	9	185	194	0,02
33	PENATA BUSANA	1	31	32	0,00
34	PENATA RAMBUT	20	92	112	0,01
35	MEKANIK	915	5	920	0,08
36	SENIMAN	586	124	710	0,06
37	TABIB	14	1	15	0,00
38	PARAJI	12	5	17	0,00
39	PERANCANG BUSANA	4	32	36	0,00
40	PENTERJEMAH	38	35	73	0,01
41	IMAM MASJID	12	0	12	0,00
42	PENDETA	130	43	173	0,02

NO.	PEKERJAAN	LAKI-LAKI (JIWA)	PEREMPUAN (JIWA)	JUMLAH (JIWA)	%
43	PASTOR	157	0	157	0,01
44	WARTAWAN	196	46	242	0,02
45	USTADZ/MUBALIGH	158	25	183	0,02
46	JURU MASAK	61	38	99	0,01
47	PROMOTOR ACARA	2	0	2	0,00
48	ANGGOTA DPR RI	1	1	2	0,00
49	ANGGOTA DPD RI	1	0	1	0,00
50	ANGGOTA BPK	2	0	2	0,00
51	PRESIDEN	0	0	0	0,00
52	WAKIL PRESIDEN	0	0	0	0,00
53	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	2	0	2	0,00
54	ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN	4	0	4	0,00
55	DUTA BESAR	0	1	1	0,00
56	GUBERNUR	0	0	0	0,00
57	WAKIL GUBERNUR	0	0	0	0,00
58	BUPATI	0	1	1	0,00
59	WAKIL BUPATI	1	0	1	0,00
60	WALIKOTA	0	0	0	0,00
61	WAKIL WALIKOTA	0	0	0	0,00
62	ANGGOTA DPRD PROP.	10	0	10	0,00
63	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	23	10	33	0,00
64	DOSEN	2.740	2.082	4.822	0,43
65	GURU	2.893	7.748	10.641	0,96
66	PILOT	27	0	27	0,00
67	PENGACARA	196	38	234	0,02
68	NOTARIS	64	116	180	0,02
69	ARSITEK	297	79	376	0,03
70	AKUNTAN	18	20	38	0,00
71	KONSULTAN	216	75	291	0,03
72	DOKTER	910	1.472	2.382	0,21
73	BIDAN	0	631	631	0,06
74	PERAWAT	300	1.627	1.927	0,17
75	APOTEKER	63	402	465	0,04

NO.	PEKERJAAN	LAKI-LAKI (JIWA)	PEREMPUAN (JIWA)	JUMLAH (JIWA)	%
76	PSIKIATER/PSIKOLOG	11	96	107	0,01
77	PENYIAR TELEVISI	3	5	8	0,00
78	PENYIAR RADIO	11	10	21	0,00
79	PELAUT	194	4	198	0,02
80	PENELITI	95	51	146	0,01
81	SOPIR	2.420	4	2.424	0,22
82	PIALANG	3	4	7	0,00
83	PARANORMAL	3	0	3	0,00
84	PEDAGANG	3.550	6.295	9.845	0,88
85	PERANGKAT DESA	1.656	281	1.937	0,17
86	KEPALA DESA	76	5	81	0,01
87	BIARAWAN/BIARAWATI	4	125	129	0,01
88	WIRASWASTA	48.391	24.010	72.401	6,51
89	ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAIN	292	231	523	0,05
90	ARTIS	14	6	20	0,00
91	ATLIT	33	1	34	0,00
92	CHEFF	0	0	0	0,00
93	MANAJER	0	0	0	0,00
94	TENAGA TATA USAHA	0	0	0	0,00
95	OPERATOR	0	0	0	0,00
96	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN	0	1	1	0,00
97	TEKNISI	2	0	2	0,00
98	ASISTEN AHLI	0	0	0	0,00
99	PEKERJAAN LAINNYA	25	29	54	0,00

Sumber data : Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri Semester II, 2023)

4.2.4 Sosial

4.2.4.1 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Pelaksanaan urusan sosial Pemerintah Kabupaten Sleman saat ini diarahkan salah satunya pada upaya mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin Hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, ruhani dan sosial) secara memadai dan wajar. Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di masyarakat memang menjadi salah satu permasalahan yang perlu ditangani secara serius. Hambatan sosial berupa keterlantaran, kecacatan, kemiskinan, bencana dan lain sebagainya menjadi salah satu penyebab yang membuat seseorang atau sekelompok orang mengalami disfungsi terhadap fungsi sosialnya di masyarakat. Di Kabupaten Sleman setidaknya terdapat 19 kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial di masyarakat.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Sleman menunjukkan jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan di Kabupaten Sleman pada tahun 2023 masih cukup banyak, yaitu sebanyak 20.730 yang terdiri dari anak balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan hukum, anak jalanan, anak dengan kecacatan, penyandang disabilitas, tuna susila, lansia terlantar, gelandangan, pengemis, pemulung, bekas warga binaan pemasyarakatan, pekerja migran bermasalah sosial, anak korban tindak kekerasan, keluarga bermasalah sosial psikologis, korban tindak kekerasan, perempuan rawan sosial ekonomi, korban penyalahgunaan NAPZA dan kelompok minoritas. Kategori yang paling banyak adalah lansia terlantar (LUT) dengan jumlah 7.345 (35,43 persen), penyandang disabilitas dengan jumlah 6.261 jiwa (30,2 persen) dan perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE) dengan jumlah 3.034 jiwa (7,95 persen). Untuk lebih jelasnya seperti yang dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4. 51 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2023

Kapanewon	Anak Balita Terlantar (ABT)	Anak Terlantar (AT)	Anak Berhadapan Hukum (ABH)	Anak Jalanan (AJ)	Anak Dengan Kecacatan (ADK)	Penyandang Disabilitas (PD)	Tuna Susila (TS)	Lansia Terlantar (LUT)	Gelandangan (GEL)	Pengemis (PENG)	Pemulung (PEM)	Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBLP)	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	Anak Korban Tindak Kekerasan (AKTK)	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP)	Korban Tindak Kekerasan (KTK)	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Korban Penyalahgunaan NAPZA (KPN)	Kelompok Minoritas (KM)	TOTAL
Gamping		68			78	555		427		4	13		20		40	2	136	20		1.363
Godean	2	99			83	559		723	1	1	8	5	4		105	4	147	12		1.753
Moyudan	1	97			95	258	1	299	1		3		1		14	1	139			910
Minggir		66			41	371		261	1		3		3		37	2	103	3		891
Seyegan	11	112			16	26	1	561	1		7	6	2	1	64	3	158	8		977
Mlati	2	84		1	53	408	5	532		1	6	6	2	4	42	29	209	3		1.387
Depok		11			68	461		206	1		3	8			11	1	81	2		853
Berbah	3	111			51	316	1	427			7	1	1		88	2	198	12		1.218
Prambanan		29		1	50	258		403	1	1	1	1	1		24	3	204	1		978
Kalasan	5	166			82	441		575	1		2	1	2		101	3	214	2		1.595
Ngemplak	2	65			59	498		471			2				1	6	160	1		1.265
Ngaglik	3	116		2	51	324	1	289			4	8	5		70	1	217	3		1.094
Sleman	1	122			49	337	1	527	2	1	13		2		101	11	167	11		1.345
Tempel	1	154			47	555	14	571	4	3	3	2	3		110	5	374	7		1.853
Turi	1	136			71	267		384			2		3		17		104			985
Pakem		28			44	361	1	256			4				43	20	69	7		833
Cangkringan	1	184		5	46	266		433	1		1	7			128	4	354			1.430
KABUPATEN SLEMAN	33	1.648		9	984	6.261	25	7.345	14	11	82	45	49	5	996	97	3.034	92		20.730

Sumber: Dinas Sosial, 2023

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Adapun kriteria lanjut usia terlantar adalah : Tidak ada keluarga yang mengurusnya, Keterbatasan kemampuan keluarga yang mengurusnya, Tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari, Menderita minimal 1 (satu) jenis penyakit yang dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan hidupnya, serta Lanjut usia yang hidup dalam keluarga fakir miskin. Untuk Lanjut Usia Terantar terbagi menjadi 2 kriteria yaitu: LUT Potensial : lanjut usia terlantar yang masih mampu melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa, serta LUT Tidak Potensial : lanjut usia terlantar yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sehingga hidupnya tergantung pada bantuan orang lain.

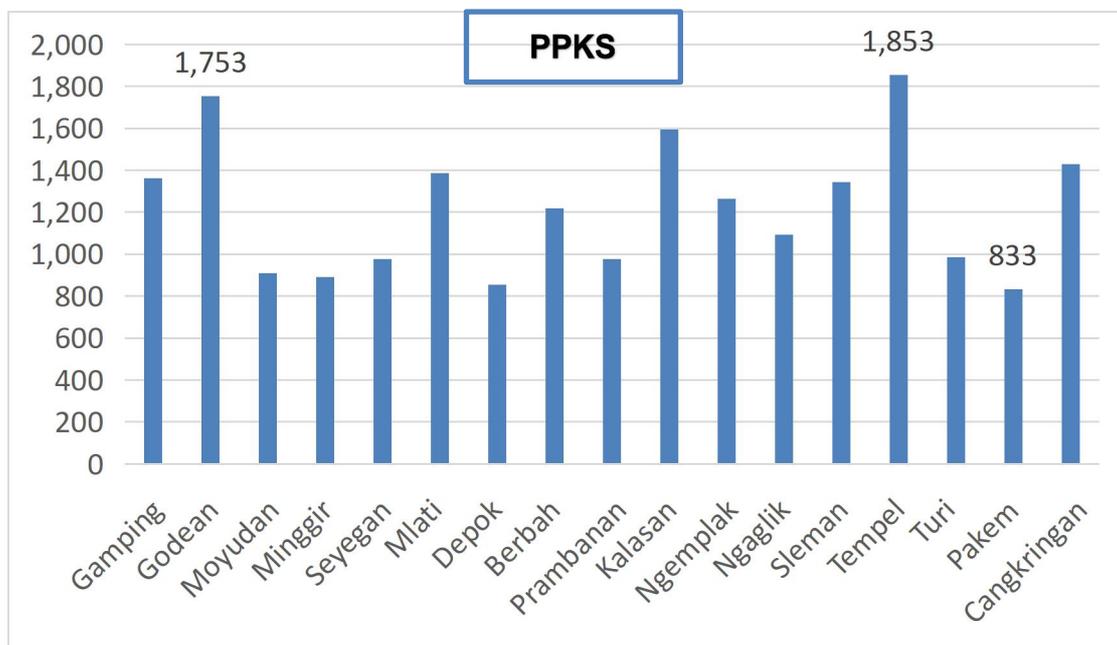
Data dari Dinas Sosial Kabupaten Sleman mencatat bahwa jumlah lansia terlantar tertinggi ada di Kapanewon Godean dengan jumlah 723 jiwa, Tempel (571 jiwa) dan Seyegan (561), sedangkan kapanewon dengan jumlah lansia terlantar paling sedikit ada di Depok (206 jiwa), serta Pakem (256 jiwa). Jika dilihat dari data keseluruhan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial paling banyak ada di kapanewon Tempel dengan jumlah keseluruhan mencapai 1.853 (8,94 persen) dan kapanewon Godean dengan jumlah 1753 jiwa (8,46 persen). Untuk kapanewon dengan jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial terendah ada di Pakem sejumlah 833 (4,02 persen) dan Depok (853 jiwa atau 4,11 persen).

4.2.4.2 Penyandang Disabilitas

Jenis penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman terdiri dari eks psikotik, ganda (fisik dan mental), mental retardasi, tuna daksa, tuna netra, tuna rungu wicara dan penyakit kronis dengan total penderita sebanyak 7.245 jiwa. Berdasarkan Data Dinas Sosial Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa jenis penyandang disabilitas paling banyak di Kabupaten Sleman adalah penyandang tuna daksa sebanyak 3.244 (44,5 persen), dan eks psikotik sebanyak 1.468 (20,26 persen). Kapanewon dengan jumlah penyandang disabilitas paling banyak yaitu Godean dengan jumlah

penyandang disabilitas sebanyak 642 (8,86 persen). Sementara itu, kapanewon dengan jumlah penyandang disabilitas paling sedikit Seyegan sejumlah kasus 42 (0,58 persen). Yang penting juga untuk dijawab adalah apakah masih ada penyandang disabilitas yang belum terjangkau oleh pendataan, mengingat masih ada persepsi di masyarakat dimana keluarga dengan penyandang disabilitas, memilih menyembunyikan penyandang disabilitas karena rasa malu. Berbagai upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas perlu harus di dorong Secara umum, tugas pemerintah adalah memenuhi hak dasar dalam memperoleh hidup, kemudian hak memperoleh layanan kesehatan dan hak mengenyam pendidikan, lalu yang terkecil adalah hak berpartisipasi dalam pembangunan.

Gambar 4.11 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2023



Sumber: Dinas Sosial, 2023

Tabel 4. 52 Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman Tahun 2023

Kecamatan	Penyandang Disabilitas Ganda (Fisik&Mental)	Perse n tase (%)	Penyandan gDisabilitas Mental Retardasi	Perse n tase (%)	Penyandan gDisabilitas Tuna Daksa	Perse n tase (%)	Penyandan gDisabilitas Tuna Netra	Perse n tase (%)	Penyandan gDisabilitas Tuna Rungu Wicara	Perse n tase (%)	Jumlah Penyandan gDisabilitas	Perse n tase (%)
Gamping	160	10,90	26	11,35	128	8,60	215	6,67	45	18,29	21	6,69
Godean	248	16,89	10	4,37	134	9,00	119	3,69	43	17,48	57	18,15
Moyudan	20	1,36	4	1,75	112	7,52	203	6,30	2	0,81	4	1,27
Minggir	61	4,16	19	8,30	55	3,69	247	7,66	7	2,85	11	3,50
Seyegan	6	0,41		0,00	23	1,54	7	0,22	4	1,63	1	0,32
Mlati	18	1,23	14	6,11	107	7,19	309	9,58	4	1,63	6	1,91
Depok	53	3,61	5	2,18	128	8,60	281	8,72	17	6,91	18	5,73
Berbah	142	9,67	13	5,68	48	3,22	137	4,25	10	4,07	4	1,27
Prambanan	2	0,14	3	1,31	31	2,08	269	8,34	1	0,41	2	0,64
Kalasan	62	4,22	7	3,06	126	8,46	280	8,68	17	6,91	24	7,64
Ngemplak	183	12,47	34	14,85	99	6,65	132	4,09	27	10,98	43	13,69
Ngaglik	77	5,25	11	4,80	115	7,72	114	3,54	14	5,69	21	6,69
Sleman	115	7,83	15	6,55	40	2,69	174	5,40	10	4,07	19	6,05
Tempel	214	14,58	40	17,47	100	6,72	152	4,71	22	8,94	29	9,24
Turi	4	0,27	13	5,68	67	4,50	247	7,66	5	2,03	2	0,64
Pakem	61	4,16	10	4,37	142	9,54	132	4,09	11	4,47	38	12,10
Cangkringan	42	2,86	5	2,18	34	2,28	206	6,39	7	2,85	14	4,46
Kabupate n Sleman	1.468	100,00	229	100,00	1.489	100,00	3.224	100,00	246	100	314	100

Sumber : Dinas Sosial, 2023

5 KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

5.1 Kepemilikan Kartu Keluarga dan KTP

Dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil meliputi biodata, KK, KTP, surat kependudukan dan akta pencatatan sipil. Dokumen tersebut sebagai bukti diri untuk memperoleh berbagai pelayanan publik seperti perbankan, pertanahan, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hukum dan sebagainya. Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain: kesadaran penduduk, kedekatan dan kemudahan akses ke tempat pelayanan dokumen, kualitas pelayanan dan kualitas informasi layanan kependudukan. Pemberian dokumen kependudukan bersifat stelsel aktif, dimana penduduk harus aktif untuk melaporkan dan mengurus sendiri dokumen kependudukan mereka, tetapi pemerintah tetap berperan aktif dan berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan. Upaya edukasi kepada masyarakat tentang kesadaran untuk mengupdate data kependudukan merupakan usaha agar data dalam database sesuai dengan dokumen dan realitas yang dialami penduduk.

Persentase kepemilikan KTP di Kabupaten Sleman sudah sangat baik, tingkat perekaman KTP ada di angka 98,39 persen. Kapanewon dengan ketercapaian rekam KTP tertinggi ada di Minggir dengan capaian 98,74 persen, sedangkan terendah ada di Prambanan 97,96 persen.

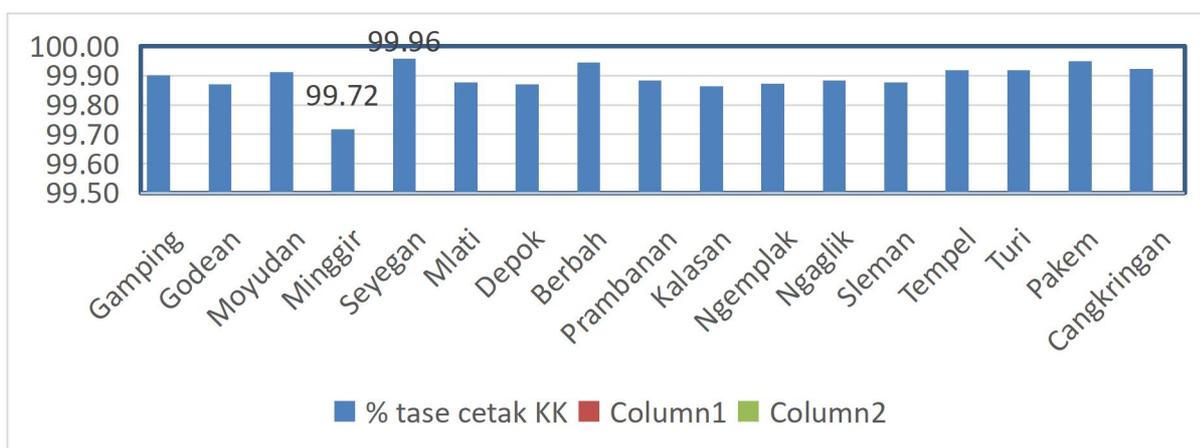
Tingginya capaian ini merupakan kerja keras dari Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sleman yang terus berinovasi untuk memberikan pelayanan jemput bola baik melalui pelayanan di tingkat kapanewon dan kalurahan sampai di sekolah untuk pendataan baru bagi warga yang menginjak usia 17 tahun.

Tabel 5.1 Capaian Persentase Kepemilikan KK dan KTP Kabupaten Sleman Tahun 2023

Kapanewon	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Cetak KK	Jumlah Belum Cetak KK	Wajib KTP	Jumlah Rekam	Jumlah Cetak
Gamping	33.266	33.233	33	75.239	74.021	59.747
Godean	25.208	25.175	33	56.474	55.670	40.099
Moyudan	12.486	12.475	11	27.242	26.847	25.611
Minggir	12.050	12.016	34	26.211	25.882	17.828
Seyegan	18.567	18.559	8	41.045	40.376	32.913
Mlati	33.096	33.055	41	74.115	72.950	53.683
Depok	43.672	43.615	57	98.334	96.760	80.618
Berbah	20.050	20.039	11	44.472	43.835	38.790
Prambanan	19.581	19.558	23	42.756	41.884	39.254
Kalasan	29.951	29.910	41	67.314	66.224	61.371
Ngemplak	22.544	22.515	29	50.526	49.694	37.671
Ngaglik	35.085	35.044	41	79.284	77.965	65.952
Sleman	25.193	25.162	31	55.778	54.774	40.027
Tempel	19.478	19.462	16	43.189	42.469	35.268
Turi	13.342	13.331	11	29.996	29.527	27.700
Pakem	13.833	13.826	7	30.717	30.238	27.115
Cangkringan	11.514	11.505	9	25.051	24.675	17.475
Kabupaten Sleman	388.916	388.480	436	867.743	853.791	701.122

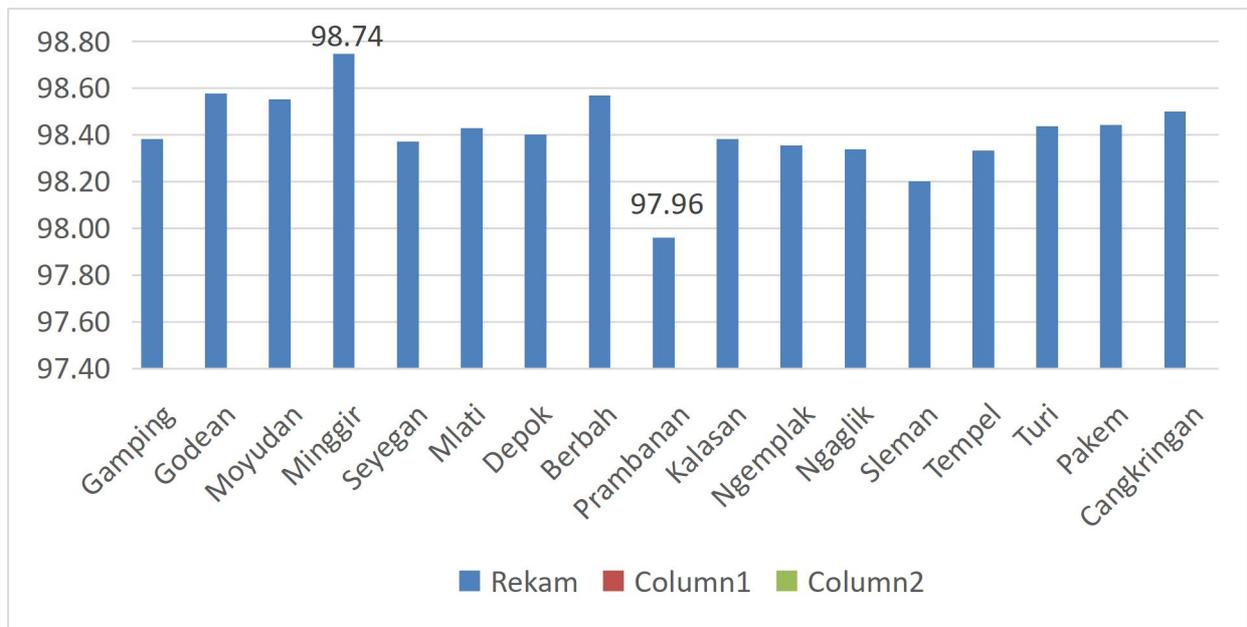
Sumber data : Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri Semester II, 2023)

Gambar 5.1 Capaian Persentase Kepemilikan KK



Sumber data : Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri Semester II, 2023)

Gambar 5.2 Capaian Persentase Rekam KTP



Sumber data : Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri Semester II, 2023)

5.2 Kepemilikan Akta Kelahiran

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ketentuan Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Pada Pasal 68, kutipan Akta Pencatatan sipil meliputi (1) kelahiran; (2) kematian; (3) perkawinan; (4) perceraian; (5) pengakuan anak (6) pengesahan anak.

Akta merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia. Akta merupakan pengakuan negara atas tatus keperdataan seseorang baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungannya dengan pelayanan legal lainnya. Akta-akta yang dimaksud meliputi akta kelahiran akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian.

Akta kelahiran merupakan identitas awal sekaligus bukti legal yang menunjukkan bahwa seseorang adalah bagian dari warga negara Indonesia. Selain itu, akta kelahiran merupakan bukti sah dan legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang

tua baik ayah maupun ibunya. Jika seorang ibu melahirkan tanpa ayah atau status perkawinannya tidak terdaftar, maka akta kelahiran hanya akan dicantumkan nama ibunya. Dalam hal ini si anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Kepemilikan akta kelahiran merupakan hal penting untuk memperoleh pelayanan publik seperti pendidikan, hak waris, pengurus paspor dan dokumen lainnya. Kepemilikan akta kelahiran dihitung dari jumlah bayi lahir dan sudah dicarikan akta kelahiran dan jumlah kelahiran dari wilayah tertentu. Kepemilikan akta kelahiran merupakan hal penting untuk memperoleh pelayanan publik seperti pendidikan, perbankan, pertanahan, kartu keluarga, hak waris, kesehatan dan dokumen lainnya.

Tabel 5.2. dibawah ini menggambarkan bahwa 39,86 persen dari penduduk di Kabupaten Sleman belum memiliki akta kelahiran, dari data tersebut diperkirakan yang tidak memiliki akta kelahiran adalah para lansia yang menilai bahwa dokumen akta kelahiran sudah tidak penting lagi. Penyebab dari banyaknya penduduk yang belum memiliki akta kelahiran adalah prosedur Stelsel pasif dimana kegiatan pencatatan yang menyebabkan petugas relatif menunggu laporan dari masyarakat, selain itu juga karena factor biaya pengurusan pencatatan yang relatif tinggi dan kurang terjangkau oleh masyarakat miskin, baik dari sisi administrasi maupun biaya tambahan lain seperti transportasi, saksi atau biaya lainnya. Selain itu, Akses ke titik pelayanan pencatatan kelahiran yang relatif sulit dicapai oleh masyarakat, terutama yang bermukim di daerah pedesaan yang jauh. Selain itu, faktor terpenting dari minimnya kepemilikan akta adalah tingkat kesadaran orang tua dan masyarakat yang rendah akan pentingnya akta kelahiran.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mensukseskan pencatatan akta kelahiran pada kurun beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk yang berusia dibawah 18 tahun yang belum memiliki dokumen akta kelahiran tinggal 1,24 persen dengan jumlah 3.406 jiwa, dari seluruh anak usia 0-18 tahun yaitu 275.477 jiwa. Dengan kata lain kepemilikan akta lahir anak usia 0-18 tahun sejumlah 272.071 anak atau 98,76 persen.

Tabel 5.2 Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran Kabupaten Sleman Tahun 2023

Kapanewon	Jml pnddk 0-18 th	Memiliki akta lahir	%	Tdk memiliki akta lahir	%
GAMPING	23.801	23.414	98,37	387	1,63
GODEAN	17.346	17.133	98,77	213	1,23
MOYUDAN	7.527	7.480	99,38	47	0,62
MINGGIR	7.276	7.236	99,45	40	0,55
SEYEGAN	12.985	12.930	99,58	55	0,42
MLATI	23.495	23.006	97,92	489	2,08
DEPOK	31.047	30.350	97,76	697	2,24
BERBAH	14.444	14.355	99,38	89	0,62
PRAMBANAN	14.034	13.956	99,44	78	0,56
KALASAN	21.927	21.596	98,49	331	1,51
NGEMPLAK	16.753	16.627	99,25	126	0,75
NGAGLIK	26.200	25.685	98,03	515	1,97
SLEMAN	18.126	17.978	99,18	148	0,82
TEMPEL	13.550	13.499	99,62	51	0,38
TURI	9.329	9.272	99,39	57	0,61
PAKEM	9.472	9.415	99,40	57	0,60
CANGKRINGAN	8.165	8.139	99,68	26	0,32
SLEMAN	275.477	272.071	98,76	3406	1,24

Sumber data : Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri Semester II, 2023)

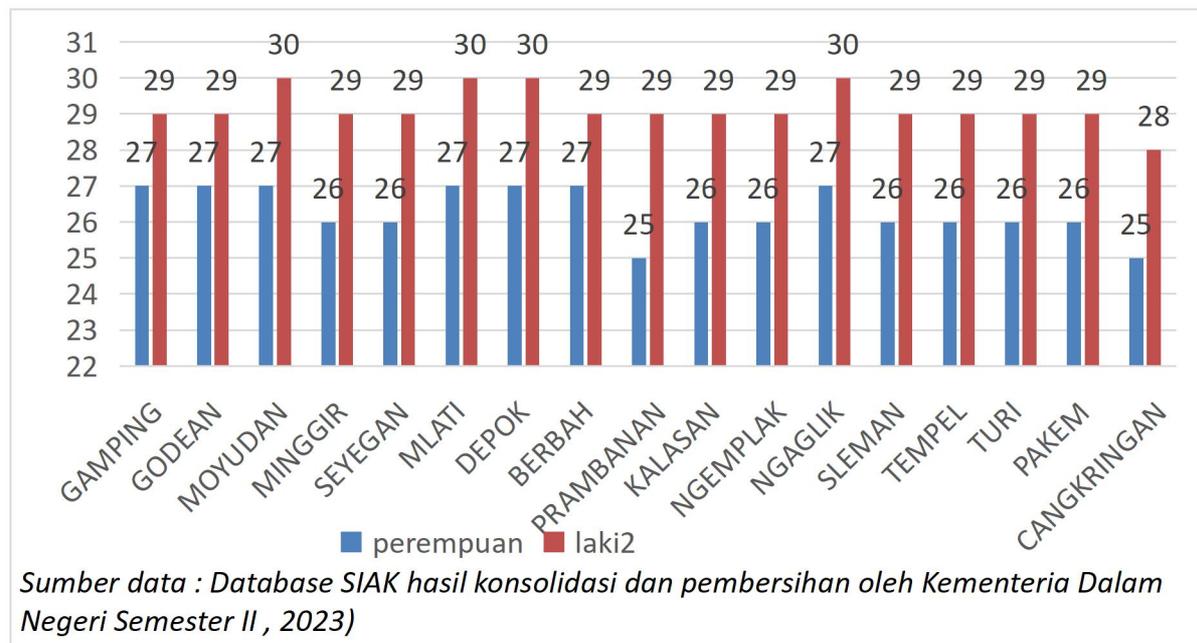
5.3 Kepemilikan Akta Perkawinan

Akta perkawinan adalah suatu legalitas untuk menentukan status hukum laki-laki dan perempuan bahwa mereka terikat sebagai suami isteri. Akta perkawinan merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberikan kepada penduduk non muslim, sedangkan penduduk muslim menggunakan buku nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bukti legal perkawinan mereka. Kepemilikan akta perkawinan yang dihitung adalah akta perkawinan yang dicatatkan dalam aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Sleman masih panjang. Tabel 5.3. menunjukkan bahwa dokumen-dokumen penting banyak yang belum dimiliki oleh masyarakat. Terdapat 88,38 persen penduduk dengan status kawin sudah melaporkan akta kawin dan 11,62 persen belum melaporkan akta kawin sehingga terlaporkan belum memiliki akta kawin. Status kawin tercatat diperlukan terutama menyangkut hak-hak perdata suami- istri.

Kapanewon dengan kepemilikan akta kawin tertinggi ada di Berbah, yaitu 94,57 persen atau 26.945 jiwa dari jumlah penduduk berstatus kawin sebanyak 28.480 jiwa. Sedangkan kepemilikan akta kawin terendah ada di kapanewon Godean sebesar 79,27 persen atau sejumlah 28.661 jiwa dari total 36.155 jiwa yang berstatus kawin.

Gambar 5.3 Kepemilikan Akta Perkawinan



Sumber data : Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri Semester II, 2023)

Tabel 5.3 Kepemilikan Dokumen Akta Perkawinan Kabupaten Sleman Tahun 223

No.	Kapanewon	Jumlah Kawin Muslim	Jumlah Kawin Non Muslim	Kawin			Memiliki Akta Kawin			% Memiliki Akta Kawin	Belum Memiliki Akta Kawin	% Belum Memiliki Akta Kawin
				Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah			
1	GAMPING	43.008	4.603	23.718	23.893	47.611	19.666	19.594	39.260	82,46	8.351	17,54
2	GODEAN	32.967	3.188	18.031	18.124	36.155	14.298	14.363	28.661	79,27	7.494	20,73
3	MOYUDAN	15.081	2.261	8.667	8.675	17.342	8.016	7.925	15.941	91,92	1.401	8,08
4	MINGGIR	13.399	3.365	8.346	8.418	16.764	7.772	7.701	15.473	92,3	1.291	7,7
5	SEYEGAN	25.768	880	13.295	13.353	26.648	12.481	12.494	24.975	93,72	1.673	6,28
6	MLATI	41.985	4.766	23.317	23.434	46.751	19.938	19.804	39.742	85,01	7.009	14,99
7	DEPOK	51.358	9.019	29.930	30.447	60.377	25.509	25.828	51.337	85,03	9.040	14,97
8	BERBAH	26.276	2.216	14.256	14.236	28.492	13.490	13.455	26.945	94,57	1.547	5,43
9	PRAMBANAN	27.008	1.472	14.243	14.237	28.480	13.032	13.038	26.070	91,54	2.410	8,46
10	KALASAN	38.199	4.639	21.328	21.510	42.838	18.272	18.250	36.522	85,26	6.316	14,74
11	NGEMPLAK	29.938	2.653	16.196	16.395	32.591	14.897	14.792	29.689	91,1	2.902	8,9
12	NGAGLIK	45.503	4.874	25.021	25.356	50.377	22.488	22.664	45.152	89,63	5.225	10,37
13	SLEMAN	33.081	2.472	17.706	17.847	35.553	16.055	16.059	32.114	90,33	3.439	9,67
14	TEMPEL	27.298	491	13.879	13.910	27.789	12.950	12.935	25.885	93,15	1.904	6,85
15	TURI	18.171	1.198	9.674	9.695	19.369	8.949	8.866	17.815	91,98	1.554	8,02
16	PAKEM	16.945	2.535	9.665	9.815	19.480	8.829	8.940	17.769	91,22	1.711	8,78
17	CANGKRINGAN	16.676	285	8.467	8.494	16.961	7.962	7.967	15.929	93,92	1.032	6,08
	KAB. SLEMAN	502.661	50.917	275.739	277.839	553.578	244.604	244.675	489.279	88,38	64.299	11,62

Sumber data : Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri Semester II, 2023)

5.4 Kepemilikan Akta Perceraian

Akta perceraian adalah suatu bukti outentik tentang putusnya suatu ikatan perkawinan. Akta Perceraianya merupakan bukti sahnya perceraian yang diperlukan sebagai dasar legalitas putusnya perkawinan dan perubahan status sebagai janda atau duda cerai hidup, pengurusan hak tunjangan anak dari suami istri, harta gono gini, dan perkawinansetelah perceraian.

Di Kabupaten Sleman sebanyak 18,22 persen perceraian belum memiliki akta perceraian. Untuk kepemilikan akta cerai tertinggi ada di kapanewon Pakem sejumlah 88,44 persen atau 696 jiwa dari 787 penduduk berstatus cerai. Sedangkan terendah kepemilikan akta cerai ada di kapanewon Tempel sejumlah 73,31 persen atau 791 jiwa dari 1.079 penduduk berstatus cerai. Akibatnya jika tidak memiliki akta perceraian yaitu mendapatkan kesulitan untuk menentukan status hukum seseorang sebagai janda atau duda yang bebas dari ikatan perkawinan, dan sulit untuk menentukan status perdata seseorang untuk bebas mencari pasangan lain atau yang hendak menikah lagi.

Manfaat akta perceraian bagi masyarakat tidak sebesar manfaat akta kelahiran sehingga masyarakat kurang peduli terhadap dokumen tersebut. Akta perceraian akan diurus ketika masyarakat hendak melakukan pengurusan hak-hak tunjangan atau pembagian harta. Namun demikian, selain untuk kepentingan tertib administrasi kependudukan sosialisasi kelengkapan dokumen pada masyarakat atas semua kejadian demografi tetap harus dilakukan.

Tabel 5. 4 Kepemilikan Dokumen Akta Perceraian Kabupaten Sleman Tahun 2023

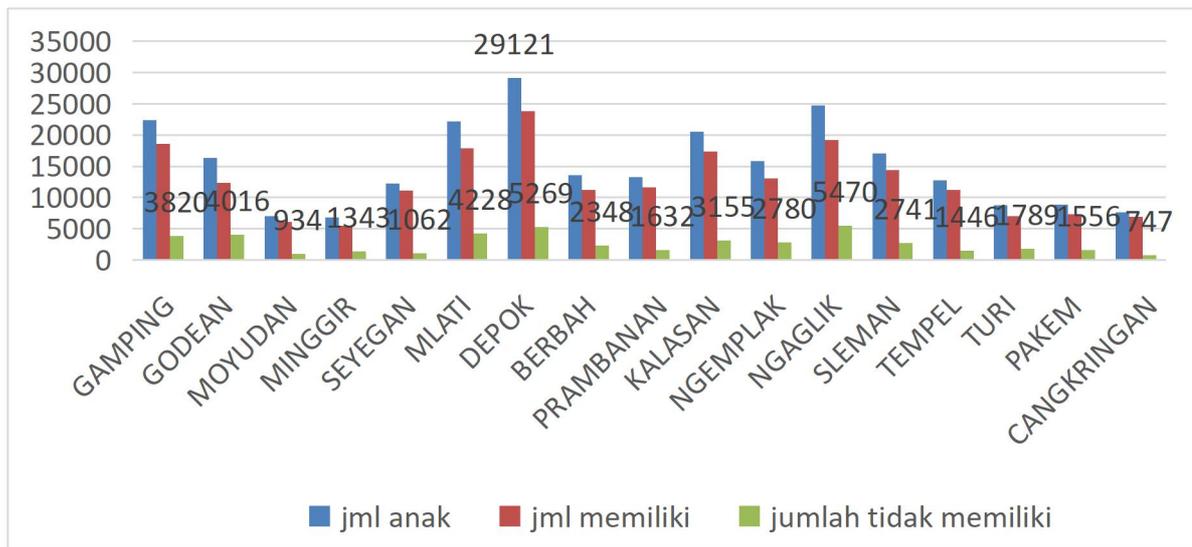
No.	Kapanewon	Jumlah Cerai Muslim	Jumlah Cerai Non Muslim	Cerai			Memiliki Akta Cerai			%	Belum Memiliki Akta
				Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Memiliki Akta	Cerai
										Cerai	
1	GAMPING	1.824	163	801	1.186	1.987	741	992	1.733	87,22	254
2	MOYUDAN	434	68	210	292	502	185	219	404	80,48	98
3	MINGGIR	463	82	224	321	545	200	231	431	79,08	114
4	SEYEGAN	1.000	15	411	604	1.015	344	410	754	74,29	261
5	MLATI	2.028	232	888	1.372	2.260	693	1.006	1.699	75,18	561
6	DEPOK	2.552	370	1.111	1.811	2.922	976	1.469	2.445	83,68	477
7	BERBAH	1.150	67	458	759	1.217	405	606	1.011	83,07	206
8	PRAMBANAN	997	55	441	611	1.052	392	509	901	85,65	151
9	KALASAN	1.706	180	739	1.147	1.886	646	886	1.532	81,23	354
10	NGEMPLAK	1.262	75	518	819	1.337	482	670	1.152	86,16	185
11	NGAGLIK	1.923	263	787	1.399	2.186	721	1.180	1.901	86,96	285
12	SLEMAN	1.411	68	607	872	1.479	558	691	1.249	84,45	230
13	TEMPEL	1.057	22	455	624	1.079	355	436	791	73,31	288
14	TURI	684	44	291	437	728	245	321	566	77,75	162
15	PAKEM	704	83	309	478	787	286	410	696	88,44	91
16	CANGKRINGAN	588	5	239	354	593	228	281	509	85,83	84
	KAB. SLEMAN	21.096	1.894	9.052	13.938	22.990	7.905	10.896	18.801	81,78	4.189

Sumber data : Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri Semester II, 2023)

5.5 Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

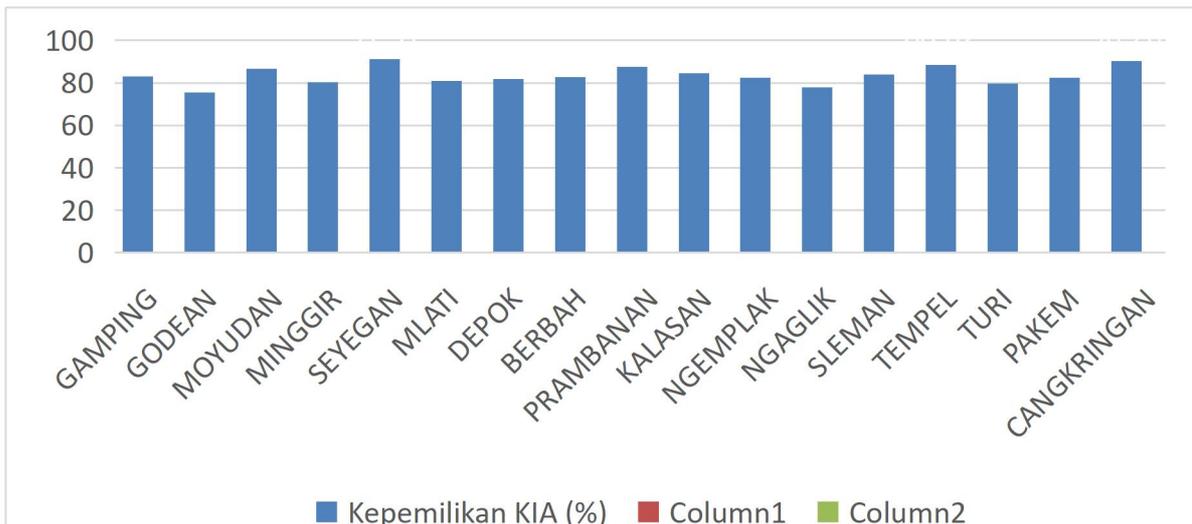
Anak sebagai bagian dari warga negara berhak memiliki identitas yang diwujudkan dalam bentuk kartu identitas anak (KIA). Kepemilikan KIA di Kabupaten Sleman meningkat dari tahun ke tahun seiring perkembangan layanan auto pada saat penerbitan akta kelahiran dan peningkatan kesadaran penduduk untuk mengajukan penerbitan KIA.

Gambar 5.4 Kepemilikan Kartu Identitas Anak



Sumber data : Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri Semester II, 2023)

Gambar 5.5 Kepemilikan Kartu Identitas Anak



Sumber data : Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri Semester II, 2023)